

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2° 22' Lintang Utara dan 3° 48' Lintang Selatan dan antara 119° 22'-124° 22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 77.295,9 Km² dengan jumlah pulau sebanyak 1.572 pulau. Luas wilayah perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 13.467.538 (tiga belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektare. Batas Wilayah Perencanaan Sulawesi Tengah meliputi:

- **Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara;
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makasar.

Sulawesi Tengah memiliki total luas wilayah 61.605,718 Km² terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 (satu) wilayah kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan dan 2.020 Desa/Kelurahan (BPS,Sulteng Dalam Angka tahun 2023).

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Daya Dukung Lingkungan Hidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung alam berupa kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi (permukaan bumi dan perut bumi) dapat berkurang sejalan dengan perubahan dan perkembangan waktu, olehnya, keberadaan lingkungan alam perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak.

Daya dukung alam ini tentunya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan daya dukung alam, diantaranya adalah kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (eksternal). Kerusakan dalam adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Kerusakan jenis ini sangat sulit untuk dicegah karena merupakan suatu proses alami yang sangat sulit untuk diduga, seperti letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan, gempa bumi yang berakibat runtuhnya lapisan tanah yang dapat mengancam organisme hayati maupun non hayati dan lain sebagainya. Kerusakan yang bersifat dari dalam ini biasanya berlangsung sangat cepat dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya kerusakan ini adalah sangat lama. Sedangkan kerusakan luar umumnya disebabkan oleh manusia seperti perambahan hutan, pembalakan liar, pengemboman ikan, dan lain sebagainya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 dilakukan melalui perhitungan penentuan status daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dan penyediaan air. Adapun perhitungan tersebut merupakan satu diantara amanat Pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

A.1 Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Salah satu jasa lingkungan hidup berdasarkan fungsi yaitu sebagai penyedia air. Daya dukung dan daya tampung tentang air ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Menteri LHK Nomor

207/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, dan dipilih jasa lingkungan sebagai penyedia air tersebut karena air merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan satu-satunya jasa lingkungan hidup yang dapat dirasakan merata oleh manusia hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya jasa lingkungan hidup yang disediakan oleh ekosistem dan langsung dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup sangat terkait dengan penyediaan air dan pangan, akan tetapi penyediaan pangan sangat dipengaruhi jasa lingkungan hidup sebagai pengatur iklim dan penyediaan air. Sama artinya, mengetahui daya dukung dan daya tampung air menjadi titik awal dalam mensintesa keterkaitan antara ketersediaan air dengan daya dukung dan daya tampung fungsi lainnya seperti pangan.

Untuk Pulau Sulawesi, berdasarkan keputusan menteri di atas yang dituangkan dalam Buku Infografis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Tahun 2019, secara agregat, daya dukung dan daya tampung air belum melampaui terlampau. Seluruh ketersediaan air di Pulau Sulawesi sebanyak 138.071.873.264 m³/tahun diperkirakan mampu mendukung populasi paling banyak 172.589.841 jiwa. Untuk kebutuhan air, Pulau Sulawesi membutuhkan air sebanyak 54.005.630.866 m³ dimana 3,02 persen untuk kegiatan rumah tangga dan 96,98 persen untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah dalam Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 ketersediaan air sebanyak 44.989.281.568 m³/tahun, sedangkan untuk kebutuhan airnya sebanyak 11.221.877.198 m³/tahun.

- Jasa Ekosistem Penyedia Air

Ekosistem dalam fungsinya berdasarkan jasa sebagai penyedia air memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau

maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*).

Tabel 2.1
Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air di Provinsi Sulawesi Tengah

KABUPATEN/ KOTA	RENDAH		SEDANG		TINGGI		N/A		TOTAL	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Banggai	361.347,13	5,90	441.614,15	7,21	16.818,63	0,27			819.779,91	13,38
Banggai Kepulauan	102.113,09	1,67	132.228,97	2,16	3.973,43	0,06			238.315,49	3,89
Banggai Laut	40.155,52	0,66	28.522,75	0,47	95,02	0,00			68.773,29	1,13
Buol	87.285,67	1,42	276.585,99	4,51	6.685,56	0,11			370.557,22	6,04
Donggala	108.557,23	1,77	401.859,66	6,56	3.295,48	0,05	28,36	0,0005	513.740,73	8,38
Morowali	141.685,08	2,31	294.830,87	4,81	3.417,11	0,06			439.933,06	7,18
Morowali Utara	306.173,48	5,00	538.546,61	8,79	15.223,54	0,25			859.943,63	14,04
Parigi Moutong	95.186,19	1,55	477.358,04	7,79	8.737,56	0,14			581.281,79	9,48
Poso	209.101,72	3,41	491.195,16	8,02	44.361,44	0,72			744.658,32	12,15
Sigi	21.862,12	0,36	490.124,85	8,00	9.996,23	0,16			521.983,20	8,52
Tojo Una-Una	222.170,47	3,63	334.305,89	5,46	5.663,54	0,09			562.139,90	9,18
Toli-Toli	61.046,91	1,00	304.234,46	4,97	5.168,73	0,08			370.450,10	6,05
Kota Palu	13.660,31	0,22	21.786,37	0,36	149,00	0,00	5,56	0,00009	35.601,24	0,58
Total	1.770.344,92	28,89	4.233.193,78	69,09	123.585,28	2,02	33,92	0,0006	6.127.157,90	100,00

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air bagi penataan ruang dan penyelenggaraan kehidupan di dalamnya. Hal ini harus ditunjang dengan kemampuan memelihara daerah tangkapan air (DTA) dan daerah aliran sungai (DAS) sebagai tindakan konservasi yang wajib dilaksanakan. Stabilitas DTA dan DS tentu saja kembali lagi terkait dengan ekosistem hulu dan sekelilingnya. Merosotnya tutupan alami akan menjadi peluang potensi berkurangnya ketersediaan air yang disediakan oleh alam.

Berdasarkan tabel di atas, 70 persen wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berkategori sedang dalam daya dukung penyedia air berbasis jasa ekosistem. Proposi daya dukung indikatif ini dapat dilihat juga sebarannya pada Sebagian wilayah, terutama Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai memiliki daya dukung penyedia air yang rendah.

- **Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air**

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (*evaporasi*), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, evaporasi, transpirasi dan evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem pengatur air di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh penutupan lahan serta bentanglahan. Pengaturan air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Tingginya layanan secara alami jasa pengaturan air ini disumbangkan oleh tutupan lahan yang sebagian besar adalah jenis tutupan lahan berhutan dan bentanglahan dengan ciri karakteristik pegunungan dan perbukitan yang memang sangat dominan di wilayah ini.

Faktor-faktor geomorfologi berperan besar dalam jasa layanan ekosistem ini, dengan struktur penutupan lahan yang mempunyai relief perbukitan dan memiliki lereng yang bervariasi mulai dari terjal hingga agak miring serta perbukitan struktural lipatan yang memiliki pola-pola struktur lipatan yang diantaranya dicirikan oleh adanya punggung-punggungan homoklinal memanjang (*hogback*) dan lembah-lembah dantaranya (*subsequent valley*), jenis bentanglahan ini besar mempengaruhi tata aliran air di bagian hulu dalam mengatur tata aliran air. Sedianya penutupan lahan dengan struktur perbukitan vulkanik yang diatasnya terdapat hutan lahan kering pun sangat baik dalam mengatur tata aliran air karena serapan air yang cukup baik di struktur geomorfologi ini, namun jenis penutupan lahan vulkanik di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di perbukitan yang tadinya ditutupi oleh jenis

hutan mulai terbuka dan dijadikan perkebunan dan pertanian lahan kering. Sedangkan jasa lingkungan pengatur air berdasarkan bentanglahan yang memiliki potensi dalam memberikan layanan pengatur air antara lain jenis perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik, jenis perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat, jenis perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar serta jenis dataran lakustrin bermaterial alluvium.

Tabel 2.2
Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Pengatur Air di Provinsi Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Banawa	13.285,80	0,72%	240.040,51	4,05%	170.487,78	2,91%	152.769,47	5,75%	29.619,02	0,40%	1021.022,08	11,47%
2	Bontol Kepulauan	602,07	0,01%	166.820,54	2,72%	32.575,61	0,53%	38.310,35	0,61%	3,21	0,0001%	235.315,49	3,89%
3	Bontol Laut	552,81	0,01%	15.780,31	0,26%	2.435,55	0,04%	48.613,43	0,79%	1.390,59	0,02%	68.773,29	1,12%
4	Buol	1.779,41	0,03%	99.554,21	1,62%	23.277,43	0,38%	218.101,59	3,56%	38.335,16	0,63%	381.050,80	6,22%
5	Donggala	2.933,85	0,05%	155.968,89	2,51%	25.055,35	0,41%	295.345,20	4,82%	34.021,65	0,56%	512.817,94	8,37%
6	Koba Paku	2.707,59	0,05%	30.482,57	0,51%	5.494,11	0,09%	8.948,86	0,15%	246,02	0,00%	37.389,12	0,62%
7	Marawali	15.214,32	0,25%	90.450,77	1,48%	42.424,98	0,69%	293.577,47	4,79%	299,77	0,00%	441.927,31	7,21%
8	Marawali Utara	19.012,67	0,31%	233.902,34	3,82%	93.343,19	1,52%	514.842,59	8,40%	17.629,74	0,29%	858.730,54	14,34%
9	Parigi Moutong	3.617,18	0,06%	261.377,43	4,27%	10.161,24	0,17%	251.363,44	4,10%	61.462,62	1,00%	587.981,92	9,59%
10	Pase	9.281,16	0,15%	164.588,28	2,69%	42.123,98	0,69%	370.175,48	6,51%	106.775,17	1,74%	722.044,07	11,78%
11	Sigi	1.162,45	0,02%	124.904,17	2,04%	21.777,52	0,35%	187.486,67	3,06%	154.740,17	2,51%	519.611,18	8,40%
12	Tojo Una-Una	9.462,58	0,15%	169.475,03	2,77%	77.139,61	1,26%	295.555,37	4,82%	4.252,81	0,07%	556.185,19	9,26%
13	Toli-Toli	1.175,67	0,02%	117.411,58	1,92%	18.914,30	0,31%	145.866,55	2,40%	55.580,47	0,91%	359.452,52	5,87%
TOTAL		80.827,58	1,32%	1.869.118,55	30,50%	581.015,66	9,68%	3.051.056,27	49,79%	574.541,84	9,72%	6.126.455,51	100%

Sumber: Buku Daya Dukung dan Daya Tampung PProvinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

- Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Data kebutuhan air diperoleh dari data jumlah populasi dan kegiatan ekonomi berbasis lahan (pertanian, industri, perkebunan, kehutanan dan lahan terbangun). Potensi ketersediaan air permukaan berdasarkan wilayah sungai dan sebaran ketersediaan air permukaan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Ka bupaten/ Kota	Total Ketersediaan Air (m³/tahun)	Total Kebutuhan Air (m³/tahun)	Surplus/defisit (m³/tahun)
Banggai	4.489.158.716	1.843.026.827	2.646.131.889
Banggai Kepulauan	808.625.634	597.986.570	210.639.064
Banggai Laut	285.389.590	150.816.425	134.573.165
Buol	1.783.074.142	654.417.852	1.128.656.290
Donggala	2.837.331.939	1.030.009.757	1.807.322.182
Morowali	5.828.432.233	601.704.635	5.226.727.598
Morowali Utara	10.329.292.391	1.118.654.155	9.210.638.236
Parigi Moutong	3.399.114.279	1.975.079.895	1.424.034.384
Poso	6.160.341.651	962.936.608	5.197.405.043
Sigi	2.869.261.244	765.568.252	2.103.692.992
Tojo Una-Una	4.593.357.120	538.022.926	4.055.334.194
Toli-Toli	1.435.604.054	912.406.713	523.197.341
Kota Palu	170.298.575	71.246.583	99.051.992
Sulawesi Tengah	44.989.281.568	11.221.877.198	33.767.404.370

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Dari tabel di atas, wilayah tertinggi sebagai penyedia air terdapat pada Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Tojo Una Una, Poso dan Banggai. Sementara Kebutuhan Tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Morowali Utara, Poso, dan Toli Toli.

Tabel 2.4
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Persentase Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2021 (persen)	
	Belum Terlampaui	Terlampaui
Banggai	78,57	21,43
Banggai Kepulauan	57,01	42,99
Banggai Laut	61,92	38,08
Buol	80,21	19,79
Donggala	81,33	18,67
Morowali	98,76	1,24
Morowali Utara	98,93	1,07
Parigi Moutong	69,25	30,75
Poso	96,98	3,02
Sigi	89,09	10,91
Tojo Una-Una	98,90	1,10
Toli-Toli	66,84	33,16
Kota Palu	86,19	13,81

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Hasil analisis ketersediaan air menunjukkan daya dukung air yang sebagian besar belum terlampaui di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun terdapat juga kondisi daya dukung air yang telah terlampaui bermakna bahwa area tersebut tidak mampu menyediakan air secara mandiri. Oleh karenanya, perlu disusun strategi peningkatan tangkapan dan distribusi air untuk memenuhi kurangnya daya dukung penyedia air.

A.2 Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Daya dukung pangan dianalisa untuk mengetahui kemampuan Sulawesi Tengah menyediakan pangan secara mandiri bagi penduduknya. Oleh karenanya, kebijakan Pemerintah yang mendukung konservasi jasa lingkungan akan berpengaruh pada kemampuan wilayah untuk menyediakan pangan secara mandiri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum status daya dukung pangan di Sulawesi Tengah belum terlampaui. Meski demikian, terdapat wilayah-wilayah dengan daya dukung pangannya terlampaui dengan luasan yang cukup besar jika dilihat dari total luasan administrasi wilayah tersebut seperti daerah Banggai Laut dan Tojo Una Una.

Tabel 2.5
Status Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Belum Terlampaui		Terlampaui		(N/A)		Total	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Banggai	487.388,63	7,95%	332.391,28	5,42%		0,00%	819.779,92	13,38%
Banggai Kepulauan	70.692,96	1,15%	167.622,53	2,74%		0,00%	238.315,49	3,89%
Banggai Laut		0,00%	68.773,29	1,12%		0,00%	68.773,29	1,12%
Buol	229.176,61	3,74%	141.380,60	2,31%		0,00%	370.557,22	6,05%
Donggala	281.465,31	4,59%	232.247,05	3,79%	28,36	0,00%	513.740,73	8,38%
Morowali	270.308,99	4,41%	169.624,07	2,77%		0,00%	439.933,06	7,18%
Morowali Utara	567.681,15	9,26%	292.262,50	4,77%		0,00%	859.943,65	14,03%
Parigi Moutong	279.641,91	4,56%	301.639,88	4,92%		0,00%	581.281,79	9,49%
Poso	451.784,64	7,37%	292.873,68	4,78%		0,00%	744.658,32	12,15%
Sigi	353.429,94	5,77%	168.553,25	2,75%		0,00%	521.983,19	8,52%
Tojo Una-Una	348.895,34	5,69%	213.244,56	3,48%		0,00%	562.139,90	9,17%
Toli Toli	178.323,63	2,91%	192.126,48	3,14%		0,00%	370.450,11	6,05%
Kota Palu	15.130,91	0,25%	20.464,77	0,33%	5,56	0,00%	35.601,25	0,58%
Total	3.533.920,02	57,68%	2.593.203,96	42,32%	33,92	0,00%	6.127.157,90	100,00%

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Upaya menjaga daya dukung lingkungan hidup yang belum terlampaui adalah memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya alam agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu

sekarang maupun yang akan datang. Adapun upaya konservasi daya dukung lingkungan hidup dapat ditempuh dengan:

1. Sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi pengelolaan sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan;
2. Eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya alam;
3. Diperlukan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada agar dapat lestari dan ^L_{SEP}berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungannya;
4. Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya untuk pembaruannya;
5. Dampak negatif pengelolaannya harus ikut dikelola, misalnya dengan daur ulang;
6. Pengelolaannya harus secara serentak disertai proses pembaruannya;
7. Mempertahankan lahan basah untuk pengendalian banjir;
8. Upaya pelestarian hutan hulu untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati untuk mendukung jasa lingkungan.

A.3 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perhitungan :

(Realisasi Program pada Indikasi Program Pemanfaatan Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah / Target Realisasi Program Pemanfaatan Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025) x 100%

Tabel 2.6
Perhitungan Pencapaian Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW
Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor	Tahun	Pencapaian (Program/Kegiatan)	Target (Program/Kegiatan)	Realisasi (%)
3	2021	14	89	15.73
4	2022	20	89	22.47
5	2023	27	89	30.34
Total		61	89	68.54

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, 2024

A.4 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan penanggulangan bencana juga tidak hanya ketika terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut menjadi kewajiban yang mesti dijalankan di setiap daerah.

Dengan memperhatikan ketiga tahapan tersebut dalam upaya mengurangi indeks risiko bencana dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Dalam upaya pengurangan indeks risiko bencana tersebut tidak hanya melibatkan BPBD saja sebagai koordinator

dalam penanggulangan bencana di daerah, tapi membutuhkan instansi-instansi lintas sektor dalam melaksanakan upaya tersebut.

Setidaknya terdapat 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan yang mesti dijawab dalam setiap pengisian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Ke-284 pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang tidak hanya dimiliki BPBD saja, tapi juga memerlukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait untuk bersinergi menuntaskannya seperti Bappeda dan Litbang, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan lainnya.

Berdasarkan data hasil publikasi BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan yakni dari 0,25 (Kategori rendah) pada Tahun 2019 menjadi 0,38 (kategori rendah) pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Sulteng, 2024 (data diolah kembali)

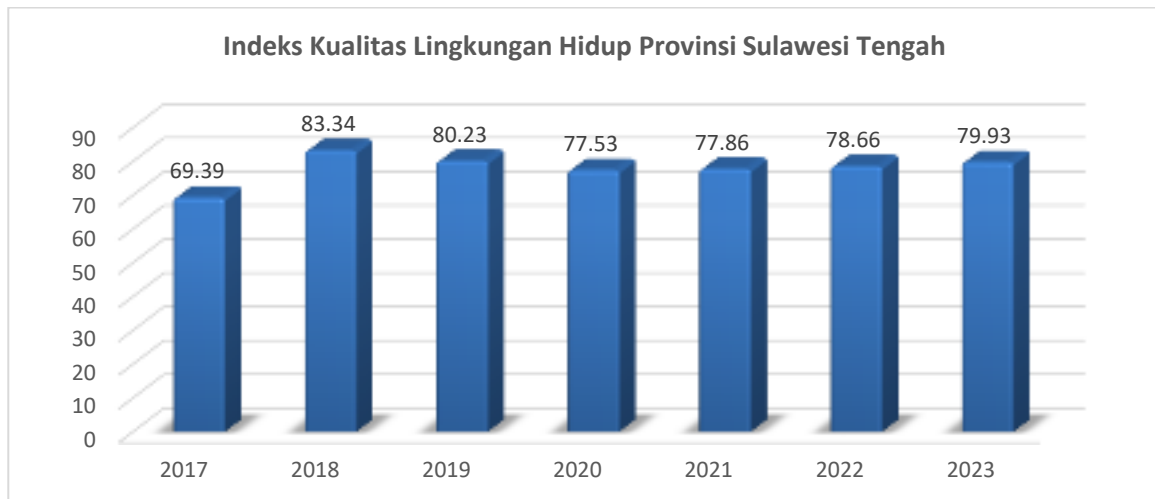
Gambar 2.1

**Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2019 – 2023**

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Terdapat empat komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKLH Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2017 - 2023 berfluktuasi karena komponen IKA yang menurun setiap tahunnya. Tahun 2017 IKLH sebesar 69,39 meningkat pada tahun 2018 sebesar 83,34, dan menurun menjadi 80,23

pada tahun 2019, karena pada komponen IKA dan IKL juga mengalami penurunan berturut-turut dari 75,95 menjadi 62,59 serta 84,58 menjadi 83,89. Demikian juga Tahun 2020 menurun menjadi 77,53 karena menurunnya keempat komponen IKLH. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 77,78 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 78,66 serta pada tahun 2023 menjadi 79,93.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.2
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017 – 2023

Adapun komponen pembentuk IKLH periode 2018-2022 disajikan berikut.

Tabel 2.7
Komponen Pembentuk IKLH Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018 – 2022

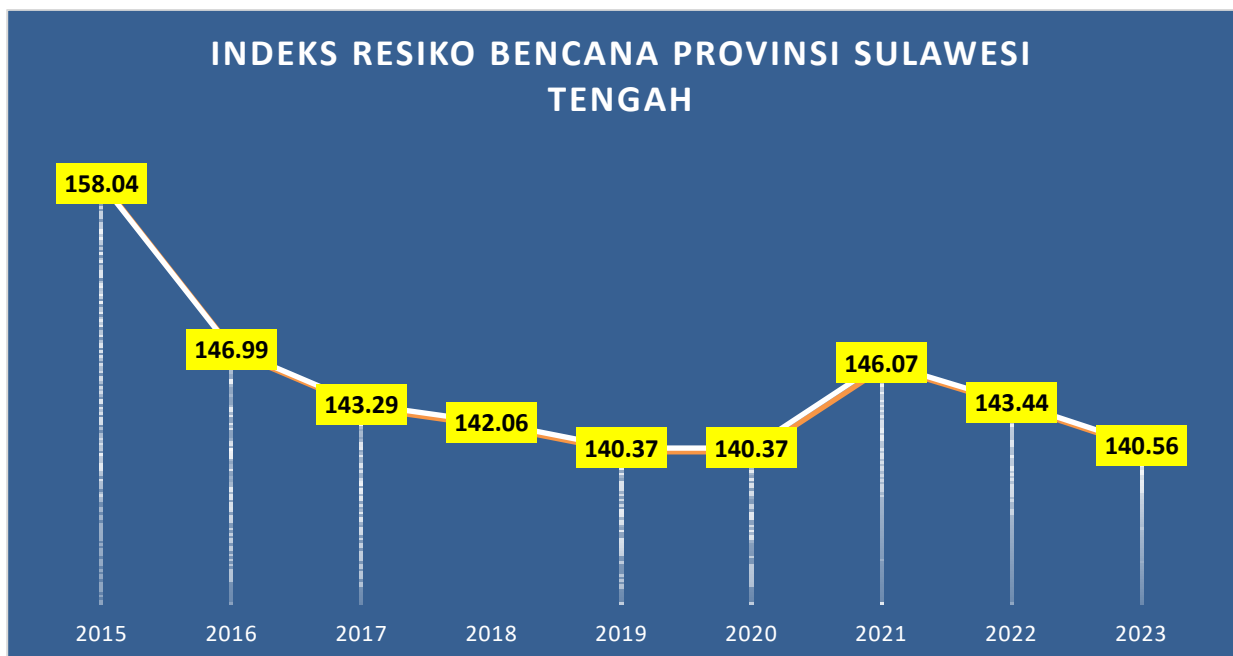
Tahun	Capaian				
	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
2018	75,95	89,09	84,58	0	83,34
2019	62,59	92,98	83,89	0	80,23
2020	61,67	91,8	83,88	61,76	77,53
2021	55,84	91,33	83,1	87,36	77,78
2022	57,71	91,86	82,48	88,42	78,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, 2023

C. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat kinerja pemerintah dalam mengelola risiko bencana. Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum sangat rentan terhadap bencana alam maupun bencana-bencana yang disebabkan kegiatan manusia, sehingga indeks risiko ini sangat diperlukan untuk menunjukkan sejauh mana tingkat bahaya, risiko, maupun tingkat kinerja kita dalam mengelola risiko. Tidak hanya mengenai bencana, tapi sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan risiko-risiko lain yang ada dalam pembangunan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 memiliki kecenderungan yang fluktuatif yakni pada tahun 2015 Indeks Risiki Bencana sebesar 158,04 menurun menjadi 146,99 pada Tahun 2016, selanjutnya pada Tahun 2020 menurun menjadi 140,37 dan meningkat menjadi 146,07 pada Tahun 2021, sedangkan pada Tahun 2022 Indeks Resiko Bencana menurun hingga menjadi 143,444 dengan nilai indeks kategori sedang, serta pada tahun 2023 juga menurun sebesar 140,56. sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

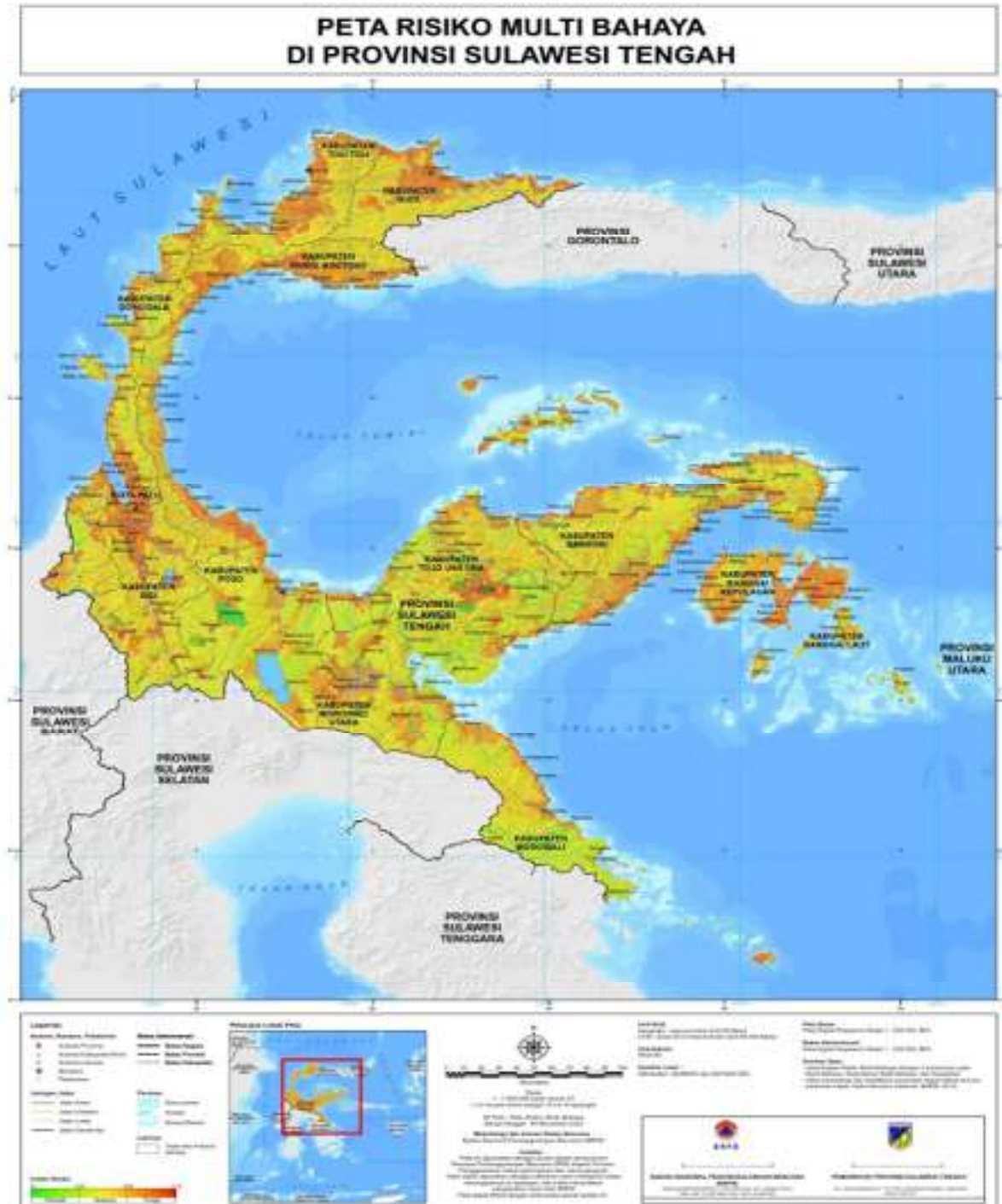


Sumber: BPBD Provinsi Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.3

Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015 - 2023

Selanjutnya Kawasan Multi Bahaya dan peta Multi Kerentanan Provinsi Sulawesi Tengah secara spasial disajikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasioanal Provinsi Sulawesi Tengah 2020 - 2026

Gambar 2.4
Peta Multi Bahaya di Provinsi Sulawesi Tengah

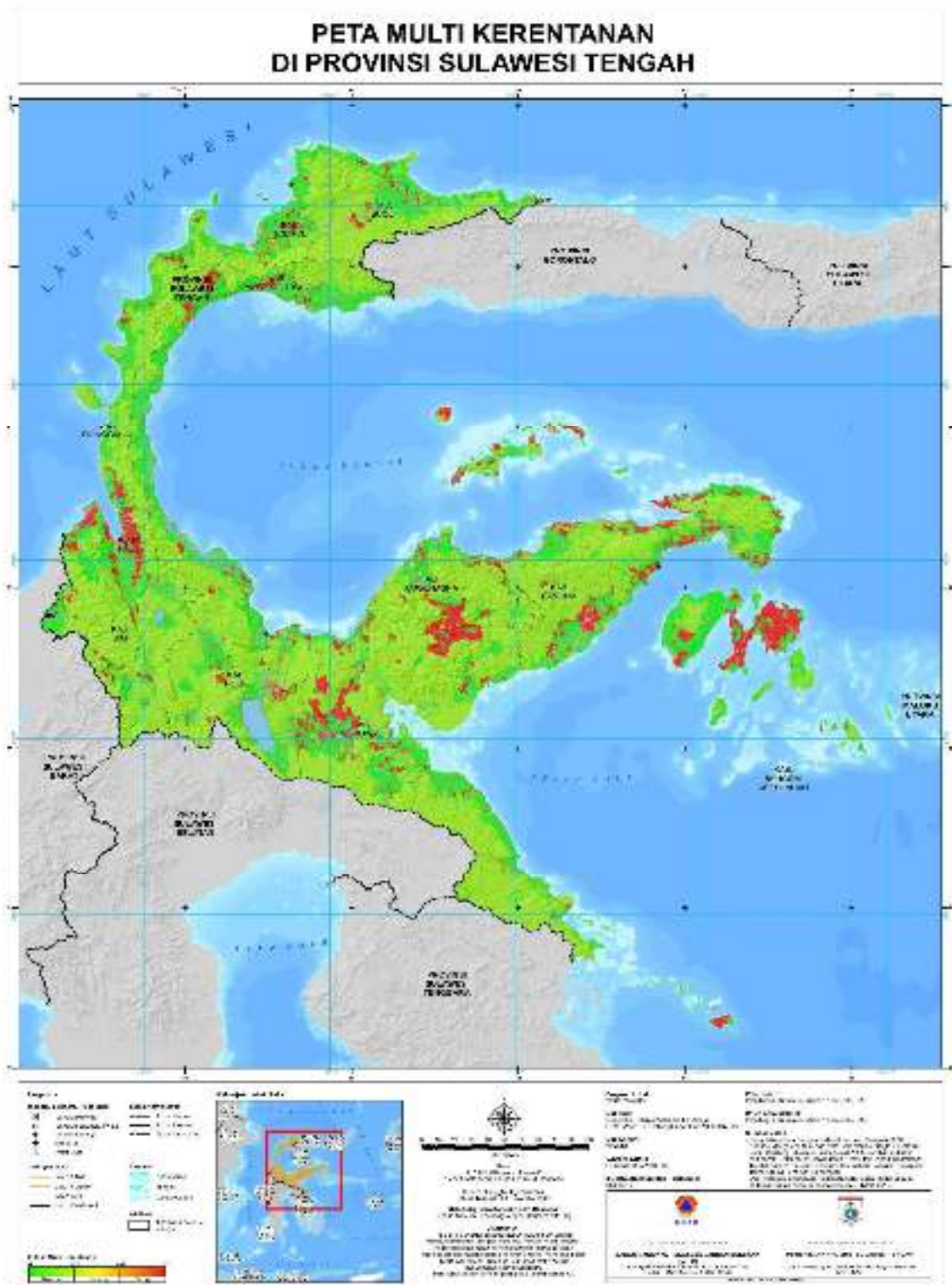
Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah.

Dari hasil dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2026 menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali Utara menjadi kabupaten terluas terdampak bencana multi bahaya sebesar 1.000.428 Ha. Kabupaten Morowali Utara memiliki luasan tertinggi di kelas rendah sebesar 33.744 Ha, di kelas sedang sebesar 362.147 Ha dan kelas tinggi sebesar 604.537 Ha. Secara keseluruhan potensi luas multibahaya Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 6.184.129 Ha, dan termasuk dalam kategori kelas tinggi. Dengan rincian per kelas yaitu kelas rendah seluas 98.856 Ha; kelas sedang seluas 1.663.469Ha dan kelas tinggi seluas 4.421.803 Ha.

Tabel 2.8
Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	BANGGAI	6.580	395.182	565.508	967.270	TINGGI
2	BANGGAI KEPULAUAN	3.992	120.171	124.717	248.879	TINGGI
3	BANGGAI LAUT	12.825	20.852	38.890	72.567	TINGGI
4	BUOL	-	8.007	396.350	404.357	TINGGI
5	DONGGALA	3.816	113.800	309.892	427.508	TINGGI
6	MOROWALI	7.243	158.990	137.466	303.704	TINGGI
7	MOROWALI UTARA	33.744	362.147	604.537	1.000.428	TINGGI
8	PARIGI MOUTONG	1.507	79.818	427.666	508.991	TINGGI
9	POSO	6.716	110.922	593.586	711.225	TINGGI
10	SIGI	41	3.618	515.943	519.602	TINGGI
11	TOJO UNA UNA	22.393	207.715	342.007	572.115	TINGGI
12	TOLI TOLI	-	81.517	326.460	407.977	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA PALU	-	725	38.781	39.506	TINGGI
Provinsi Sulawesi Tengah		98.856	1.663.469	4.421.803	6.184.129	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 2020 - 2026



Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 2020 - 2026

Gambar 2.5
Peta Multi Kerentanan Di Provinsi Sulawesi Tengah

Kajian kerentanan multibahaya dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Provinsi Sulawesi Tengah. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian ekonomi maupun lingkungan.

Dari hasil Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-206 menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar multibahaya di Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 3.032.535 jiwa. Jumlah penduduk terpapar merupakan total jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Potensi penduduk terpapar multibahaya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kelas sedang. Penduduk usia rentan sebanyak 290.681 jiwa, penduduk miskin sebanyak 310.242 jiwa dan penduduk disabilitas sebanyak 15.629 jiwa. Seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi terpapar multibahaya dikarenakan perhitungannya merupakan gabungan beberapa bencana, sehingga seluruh area tercakup bencana.

Tabel 2.9
Potensi Penduduk Terpapar Multibahaya di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
A	Kabupaten					
1	BANGGAI	369.436	35.295	40.897	2.029	SEDANG
2	POSO	248.698	22.780	28.034	1.565	SEDANG
3	DONGGALA	306.598	27.716	36.912	1.512	SEDANG
4	TOLI TOLI	223.427	23.991	26.062	1.185	SEDANG
5	BUJOL	150.924	16.494	19.136	1.157	SEDANG
6	MOROWALI	162.098	17.405	10.910	752	SEDANG
7	BANGGAI KEPULAUAN	123.934	11.539	14.129	1.144	SEDANG
8	PARIGI MOUTONG	449.242	36.077	52.018	2.139	SEDANG
9	TOJO UNA UNA	166.327	17.183	19.062	1.182	SEDANG
10	SIGI	258.483	25.646	26.852	1.178	SEDANG
11	BANGGAI LAUT	72.902	6.888	4.881	590	SEDANG
12	MOROWALI UTARA	126.812	12.281	11.274	865	SEDANG
B	Kota					
1	KOTA PALU	373.654	37.386	20.075	331	SEDANG
	Provinsi Sulawesi Tengah	3.032.535	290.681	310.242	15.629	SEDANG

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 2020 - 2026

Selanjutnya, berdasarkan hasil Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2026 menunjukkan bahwa total potensi kerugian bencana multibahaya di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 64,698 triliun rupiah yang berada pada kelas Sedang. Potensi kerusakan lingkungan adalah 2.451.681 Ha dan berada pada kelas Tinggi.

Tabel 2.10
Potensi Kerugian Multibahaya di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas Kerugian	Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian			
A	Kabupaten						
1	BANGGAI	3.044.919	4.488.816	7.533.735	SEDANG	308.050	TINGGI
2	POSO	2.509.884	3.232.798	5.742.682	SEDANG	343.073	TINGGI
3	DONGGALA	3.062.110	3.172.368	6.234.477	SEDANG	220.626	TINGGI
4	TOLI TOLI	2.577.092	2.886.232	5.463.323	SEDANG	153.501	TINGGI
5	BUOL	1.884.700	2.595.796	4.480.495	SEDANG	179.995	TINGGI
6	MOROWALI	1.365.660	1.538.557	2.904.217	SEDANG	140.061	TINGGI
7	BANGGAI KEPULAUAN	1.024.551	1.263.600	2.288.151	SEDANG	80.099	TINGGI
8	PARIGI MOUTONG	4.619.480	6.233.976	10.853.456	SEDANG	211.329	TINGGI
9	TOJO UNA UNA	1.261.075	1.393.768	2.654.841	SEDANG	213.753	TINGGI
10	SIGI	3.031.607	3.753.465	6.785.072	SEDANG	257.066	TINGGI
11	BANGGAI LAUT	373.091	896.941	1.270.032	SEDANG	15.284	TINGGI
12	MOROWALI UTARA	1.154.940	2.709.231	3.864.172	SEDANG	319.135	TINGGI
B	Kota						
1	KOTA PALU	3.720.978	902.716	4.623.694	SEDANG	9.689	TINGGI
Provinsi Sulawesi Tengah		29.630.086	35.068.261	64.698.347	SEDANG	2.451.681	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 2020 - 2026

D. Luas Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan

Peta penutupan lahan merupakan salah satu data masukan untuk perhitungan jasa ekosistem. Komponen data masukan lainnya yaitu peta bentanglahan dan peta vegetasi asli. Penutupan lahan merupakan komponen yang memiliki kedudukan sangat penting dalam penyusunan jasa ekosistem dan mempunyai bobot yang paling tinggi untuk hampir semua perhitungan jasa ekosistem yaitu kecuali pada perhitungan jasa ekosistem pengaturan permurnian air. Hal demikian dikarenakan jenis penutupan lahan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyediaan jasa ekosistem. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), penggunaan lahan adalah modifikasi lahan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, permukiman. Sedangkan menurut Arsyad (1989) penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi (campuran) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya baik materil dan spiritual. Berikut disajikan penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 2.11
Luas Penggunaan Lahan di Sulawesi Tengah Tahun 2022

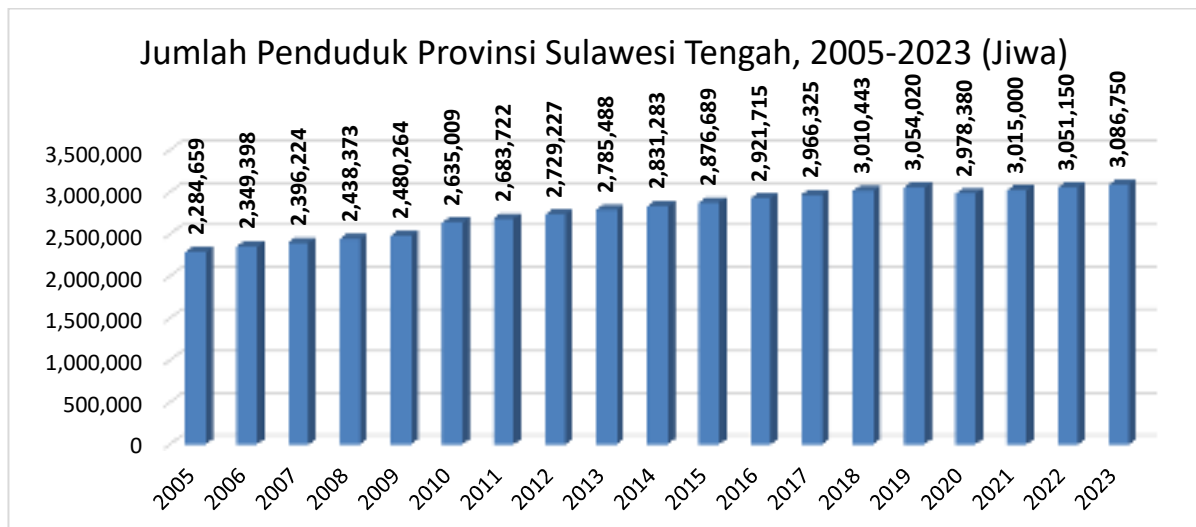
NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSEN LUAS
1	Badan Air	69.971,01	1,14%
2	Bandara / Pelabuhan	588,45	0,01%
3	Belukar	535.350,13	8,70%
4	Belukar Rawa	7.533,52	0,12%
5	Hutan Lahan Kering Primer	2.187.297,12	35,53%
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.550.361,71	25,19%
7	Hutan Mangrove Primer	13.830,71	0,22%
8	Hutan Mangrove Sekunder	29.172,55	0,47%
9	Hutan Rawa Primer	7.764,67	0,13%
10	Hutan Rawa Sekunder	1.489,24	0,02%
11	Hutan Tanaman	9.199,35	0,15%
12	Pemukiman	72.148,43	1,17%
13	Perkebunan	302.966,61	4,92%
14	Pertambangan	12.861,60	0,21%
15	Pertanian Lahan Kering	282.138,47	4,58%
16	Pertanian Lahan Kering Campur	805.255,91	13,08%
17	Rawa	782,96	0,01%
18	Rumput	63.637,69	1,03%
19	Sawah	151.795,87	2,47%
20	Tambak	20.881,02	0,34%
21	Tanah Kosong	23.760,19	0,39%
22	Transmigrasi	7.077,64	0,11%
	Grand Total	6.155.864,87	100,00%

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel terdapat penggunaan lahan terbesar di Sulawesi Tengah adalah hutan lahan kering primer sebesar 35,53 persen, hutan lahan kering sekunder 25,19 persen, dan pertanian lahan kering campur 13,08 persen, disajikan pada gambar berikut:

A. Jumlah Penduduk

Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah ruah menyebabkan mobilitas penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah cukup tinggi, yakni Jumlah penduduk selama kurang lebih dua dekade terus mengalami peningkatan signifikan yaitu dari 2.284.659 jiwa pada tahun 2005 menjadi 3.086.750 jiwa pada tahun 2023, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1-1,5 persen pertahunnya dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa per kilometer persegi.



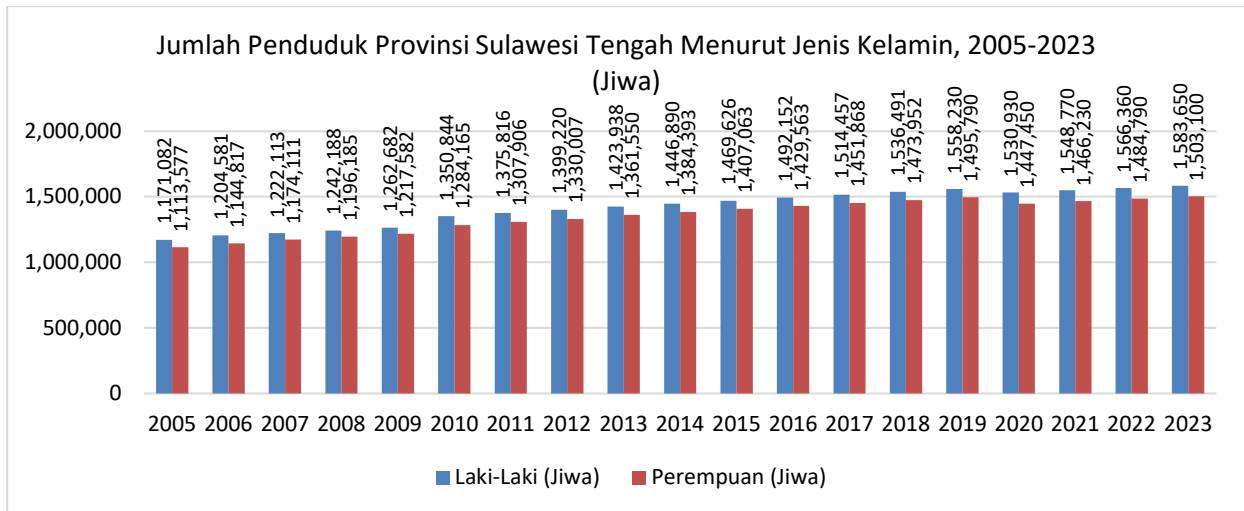
Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005 – 2023

B. Komposisi Penduduk

- Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 didominasi oleh kaum laki-laki yakni pada tahun 2005 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.171.082 jiwa (51,26 persen) meningkat menjadi 1.583.650 jiwa (51,30 persen) pada Tahun 2023, sedangkan jumlah perempuan dari 1.113.577 jiwa (48,74 persen) pada Tahun 2005 meningkat menjadi 1.503.100 jiwa (48,70 persen) pada Tahun 2023.

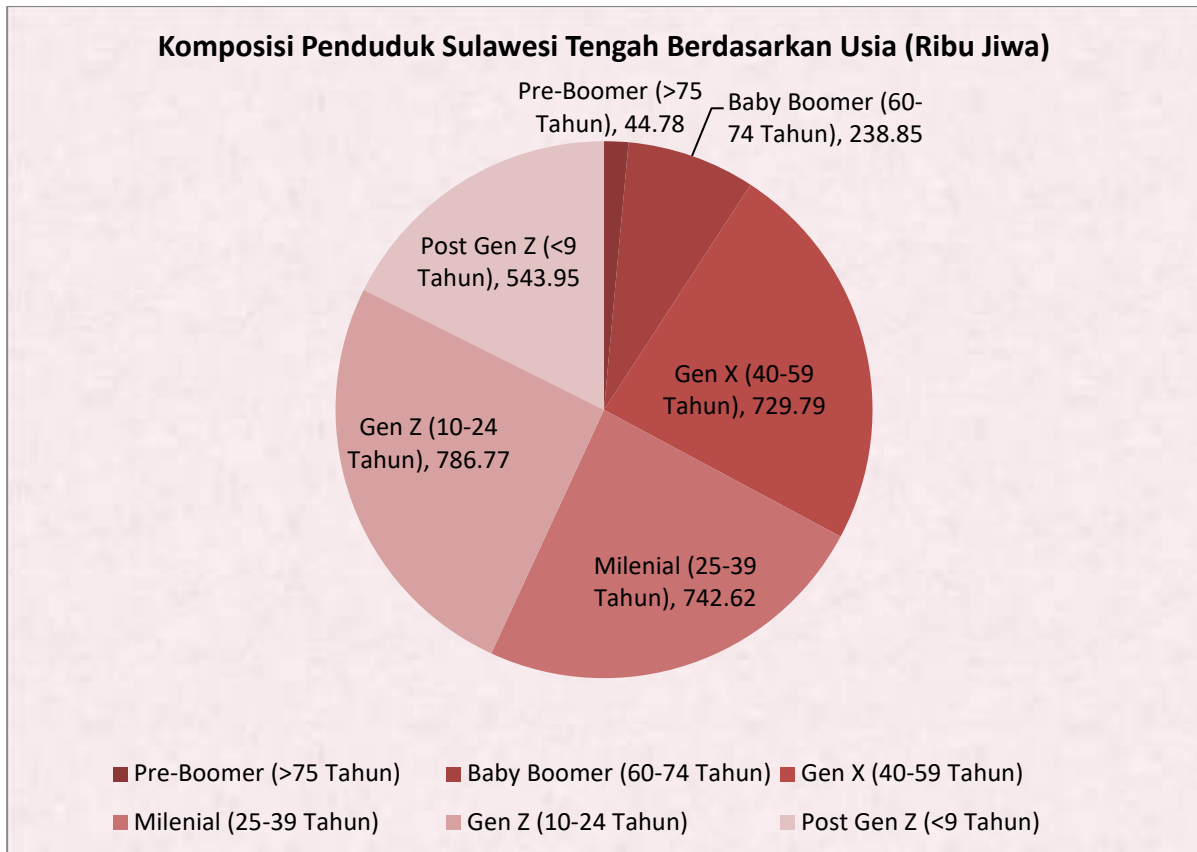


Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.8
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Laki-Laki dan Perempuan Periode 2005 – 2023

- **Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkatan Usia**

Berdasarkan klasifikasi umur, penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 didominasi oleh usia produktif, yakni Generasi Z sebanyak 786.770 jiwa (25,49 persen), Generasi Milenial sebanyak 742.620 jiwa (24,06 persen), Generasi X sebanyak 729.790 jiwa (23,64 persen). Sedangkan Post Generasi Z sebanyak 543.950 jiwa (17,62 persen) dan Baby Boomer sebanyak 238.850 jiwa (7,74 persen) serta Pre-Boomer sebanyak 44.780 jiwa (1,45 persen).

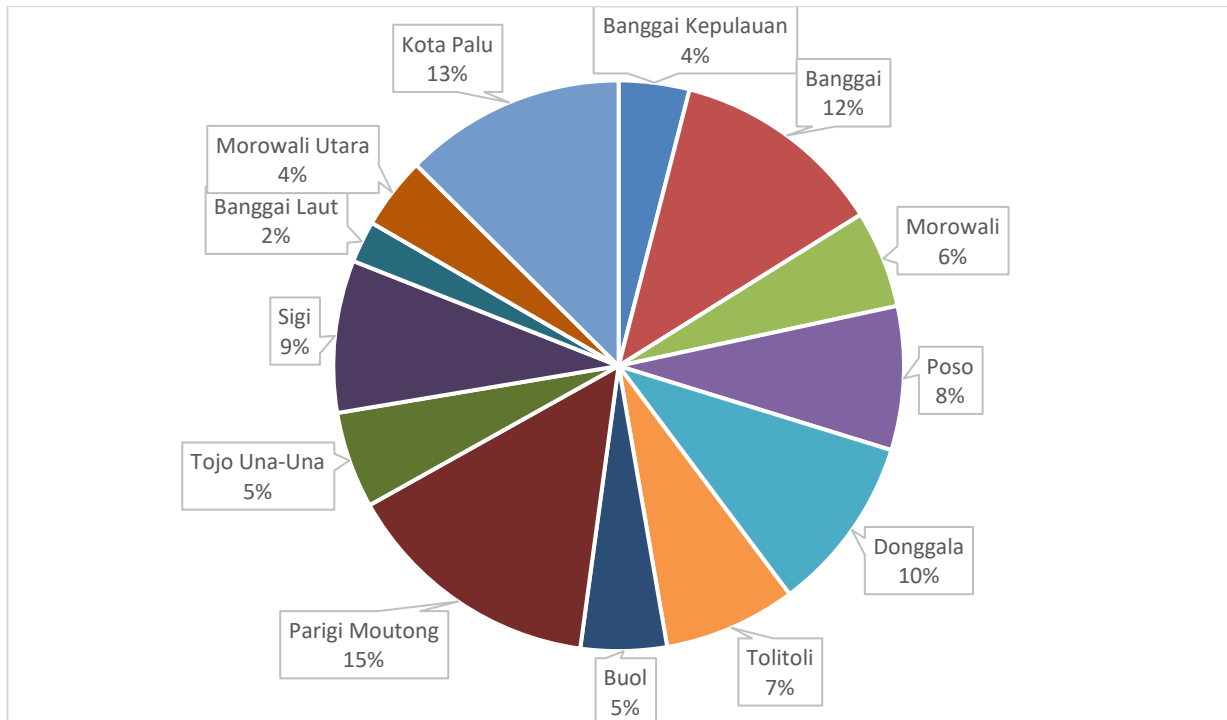


Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.9
Komposisi Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

- Komposisi Penduduk berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota

Dilihat distribusinya Tahun 2023, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong yaitu 454.700 jiwa (15 persen), disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kota Palu sebanyak 387.490 jiwa (13 persen) dan Kabupaten Banggai sebanyak 373.690 jiwa (12 persen).

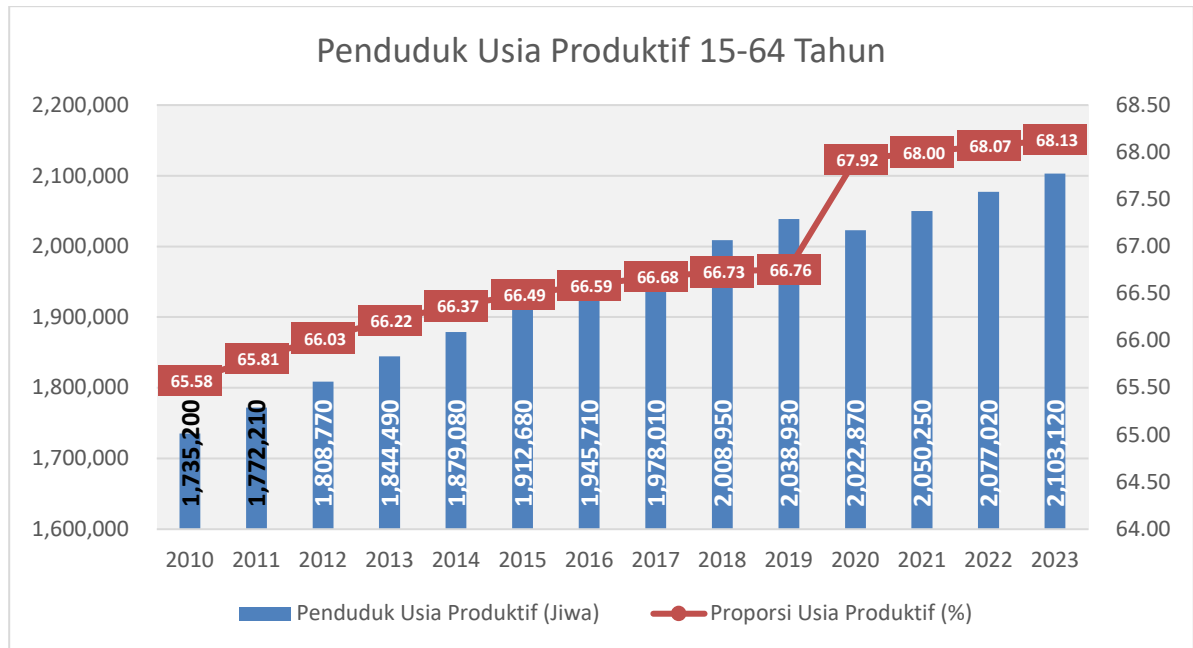


Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

C. Bonus Demografi

Bonus demografi dilihat dari proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif (65 tahun keatas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah Bonus Demografi terjadi pada Tahun 2010 dengan nilai 65,58 persen, dan terus meningkat pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 67,92 persen, dan pada Tahun 2022 juga terjadi bonus demografi namun nilainya menurun yaitu sebesar 68,52 persen, dan pada tahun 2023 bonus demografi meningkat menjadi 68,13 persen.



Gambar 2. 11
Bonus Demografi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2010-2023

D. Penduduk Dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki banyak Komunitas Adat Terpencil yang belum diberdayakan. Berdasarkan data Tahun 2021, masih terdapat 16.679 jumlah Kepala Keluarga atau 66.659 jiwa komunitas adat yang tersebar di 12 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Persebaran tersebut terbagi atas beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Menurut Kabupaten dan Suku
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	NAMA SUKU	KK	JIWA
1.	Banggai Kepulauan	1. Sea-Sea	275	1.100
		2. Bajo	-	-
2.	Banggai	1. Loinang (Saluan)	1.117	4.468
		2. Wana	-	-
		3. Balantak/Masama	-	-
3.	Morowali	1. Wana (Taa)	392	1.568
4.	Poso	1. Mori	94	376
5.	Donggala	1. Tolare (Da'a)	1.259	5.036
		2. Wana	-	-
		3. Kori Rai	-	-
		4. Unde	-	-
		5. Tajo	-	-
		6. Pendau	-	-
		7. Ado	-	-
		8. Tado	-	-
		9. Uma	-	-
		10. Tara	-	-
		11. Ledo	-	-
		12. Lauje	-	-
6.	Tolitoli	1. Lautje	1.218	4.922
		2. Pendau	1.082	4.420
		3. Dondo	2.104	8.343
		4. Pandau dan Dondo	165	591
		5. Lanje	-	-
		6. Hanje	100	400
		7. Bajo	145	604
7.	Buol		-	-
8.	Parigi Moutong	1. Lauje	2.377	9.508
		2. Tara	-	-
		3. Pendau	-	-
9.	Sigi	1. Da'a	3.250	12.969
10.	Banggai Laut	1. Banggai	592	2.370
		2. Banggai Bajo	320	1.280
11.	Morowali Utara		1.032	4.128
Jumlah			16.679	66.659

Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

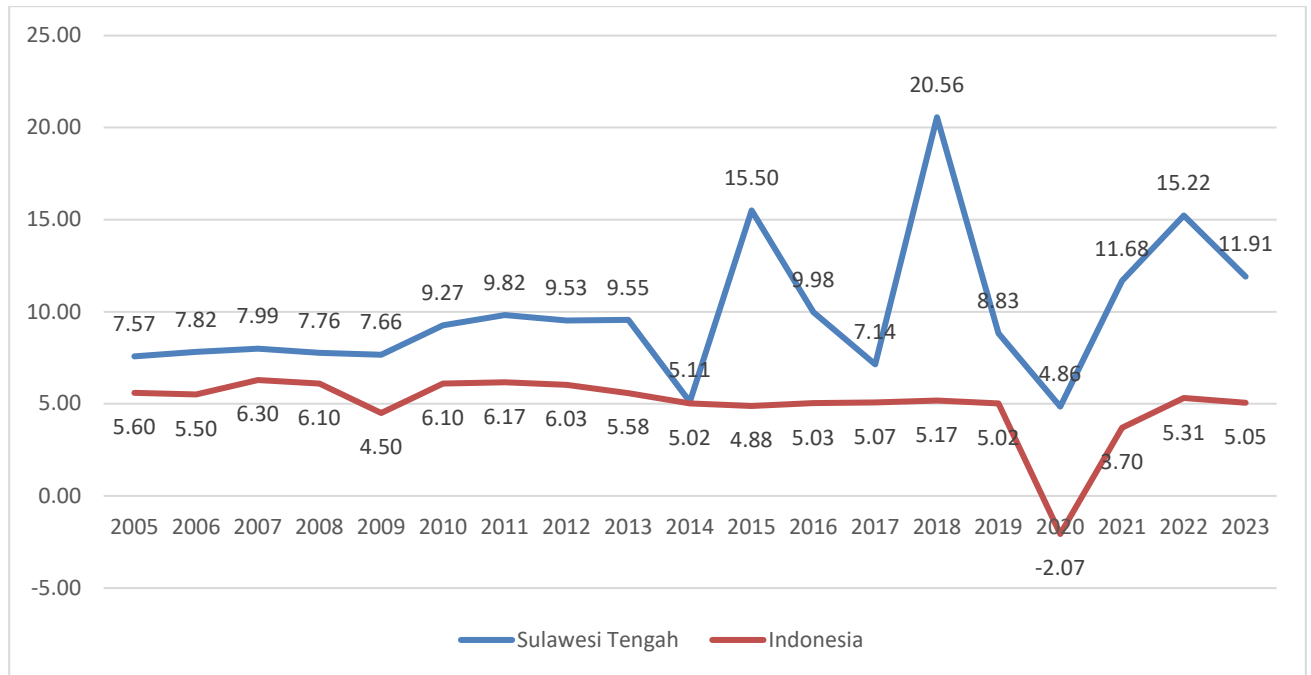
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif. Kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang Periode 2005-2007, Periode 2010-2011, Tahun 2015, Tahun 2018, dan Tahun 2022. Pada Tahun 2015 dan 2019 sedikit melambat sebagai konsekuensi adanya pembatasan larangan ekspor bahan mentah minerba sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta pada Tahun 2020 LPE kembali menurun hingga menjadi 4,86 persen sebagai dampak dari adanya Bencana Alam berupa gempa bumi tsunami dan liquifaksi serta bencana pandemi Covid19. Kinerja ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pasca pandemi covid-19 kembali mengalami percepatan pemulihan dengan LPE pada tahun 2021 meningkat signifikan hingga mencapai 11,68 persen, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 11,91 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara detail perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut:

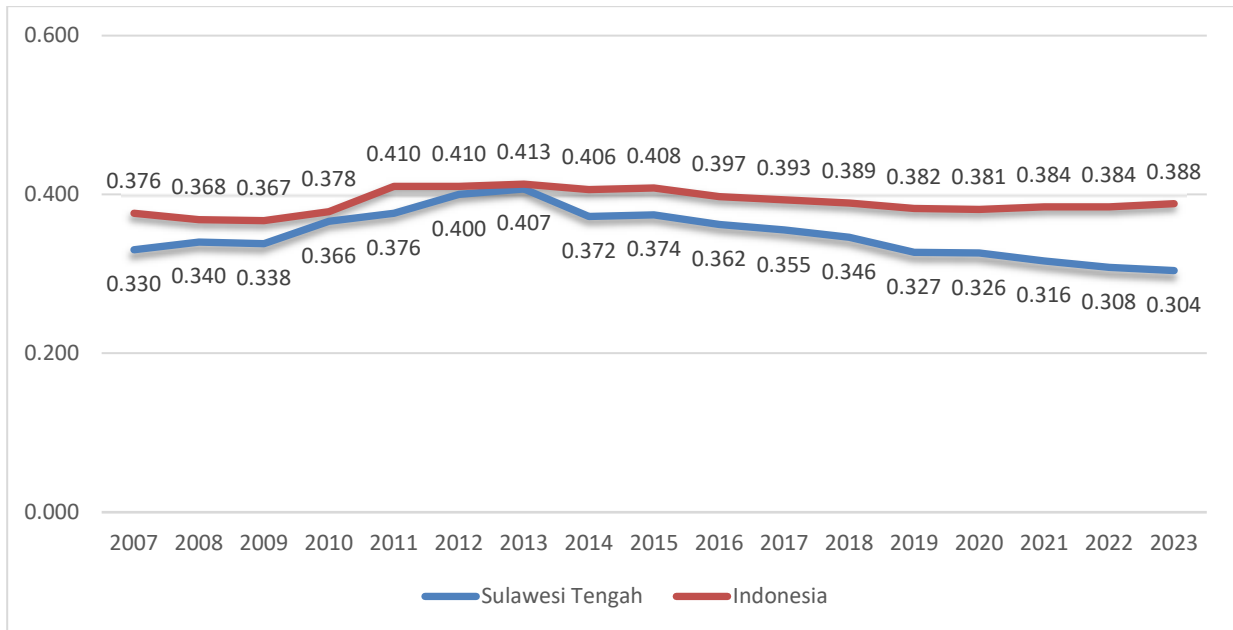


Sumber: BPS, 2005-2023(data diolah kembali)

Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

B. Indeks Gini

Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni Indeks Gini atau Koefisien Gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna. Perkembangan capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Maret 2007 sampai dengan Maret 2023 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS, 2007- 2023 (data diolah kembali)

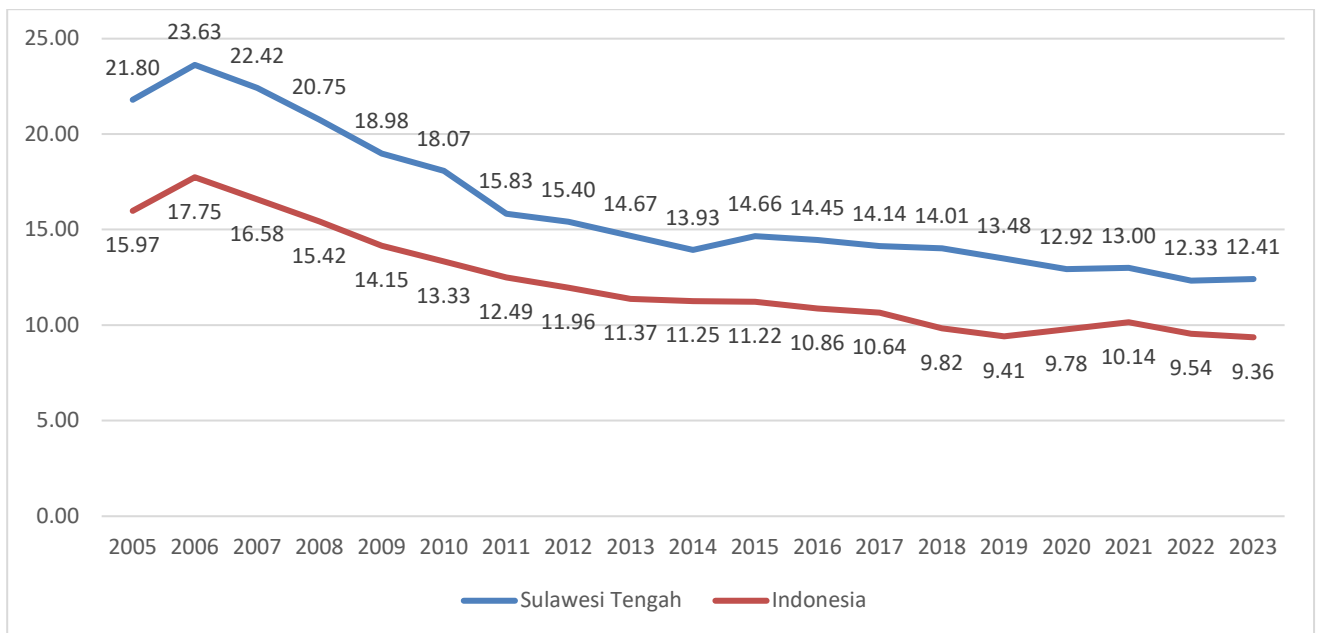
Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Periode Maret 2007-Maret 2023

Capaian Indeks gini Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2007 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dan kecenderungan mengalami penurunan, yakni pada Maret 2007 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,330 pada tahun 2023 yaitu 0,304 dan masih berada di bawah nasional. Meningkatnya indeks gini pada Maret 2021 disebabkan adanya dampak pandemic Covid-19 dan berakhirnya bantuan sosial kebencanaan. Berbagai upaya telah dilakukan melalui kebijakan konvergensi program peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengakibatkan turunnya indeks gini pada Maret 2023.

C. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Maret 2005 sampai dengan Maret 2023 cenderung mengalami fluktuasi dan masih berada diatas rata-rata persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan pada Maret 2005 sebesar 21,80 persen dan pada tahun 2023 menjadi 12,41 persen , selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 12,92 persen pada Maret 2020, sebagai dampak adanya pandemi covid-19 pada september 2020 persentase kemiskinan meningkat menjadi 13,06 persen. Pada September 2021 kemiskinan dapat di tekan hingga menjadi 12,18 persen. Selanjutnya pada Maret persentase kemiskinan meningkat menjadi 12,33 persen. Lebih lanjut, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021. Pada Maret 2023, angka kemiskinan meningkat 0,11 persen menjadi 12,41 persen.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.14
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

➤ Kemiskinan Ekstrem

Dalam perspektif kemiskinan ekstrem, Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan yakni dari 3,15 persen (97,91 Ribu Jiwa) pada tahun 2021 menurun menjadi 1,44 persen (45,76 ribu jiwa) pada tahun

2023. Dilihat dari tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebesar 3,38 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,41 persen, dan Kabupaten Sigi sebesar 2,07 persen.

Tabel 2.13
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021 – 2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Tengah	97,91	95,02	45,76	3,15	3,02	1,44
2	Banggai Kepulauan	1,79	1,60	2,25	1,50	1,34	1,87
3	Banggai	6,96	5,61	0,00	1,81	1,44	0,00
4	Morowali	3,55	4,08	0,93	2,86	3,24	0,73
5	Poso	11,01	9,03	4,93	4,17	3,36	1,80
6	Donggala	11,05	11,07	6,02	3,61	3,59	1,94
7	Toli-Toli	3,00	3,64	2,77	1,26	1,51	1,14
8	Buol	4,49	2,11	0,89	2,69	1,24	0,52
9	Parigi Moutong	29,94	32,57	12,47	5,69	6,39	2,41
10	Tojo Una-Una	8,22	5,37	2,08	5,27	3,42	1,31
11	Sigi	4,40	6,19	5,08	1,82	2,54	2,07
12	Banggai Laut	4,16	3,08	1,33	5,40	3,93	1,67
13	Morowali Utara	5,74	4,10	4,64	4,34	3,04	3,38
14	Kota Palu	3,61	6,57	2,38	0,90	1,63	0,58

Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga

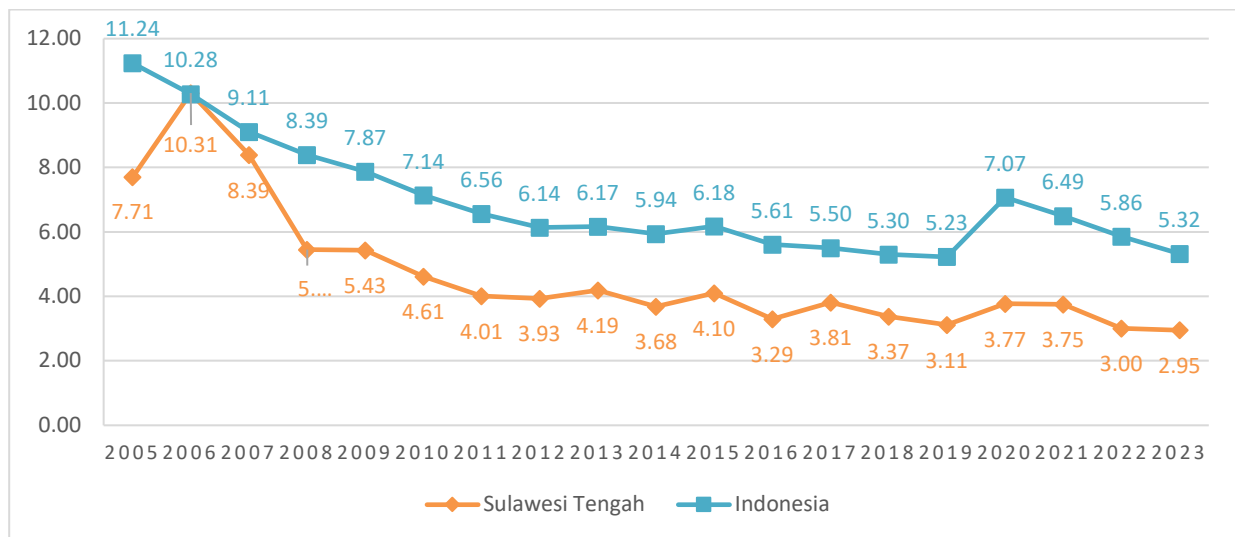
Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

1. **Strategi Keterjangkauan Harga** dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga;
2. **Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga** komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi misalnya hortikultura di pekarangan rumah atau di dalam pot;
3. **Kelancaran Distribusi** dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan **digitalisasi pasar tradisional** menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
4. **Strategi komunikasi efektif** untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni menggambarkan tenaga kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Semakin rendah indikator tingkat pengangguran terbuka di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan TPT di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Agustus 2005 sampai dengan Agustus 2023 mengalami kecenderungan fluktuatif dan sejak tahun 2006 secara detail mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 berada dibawah nasional. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali).

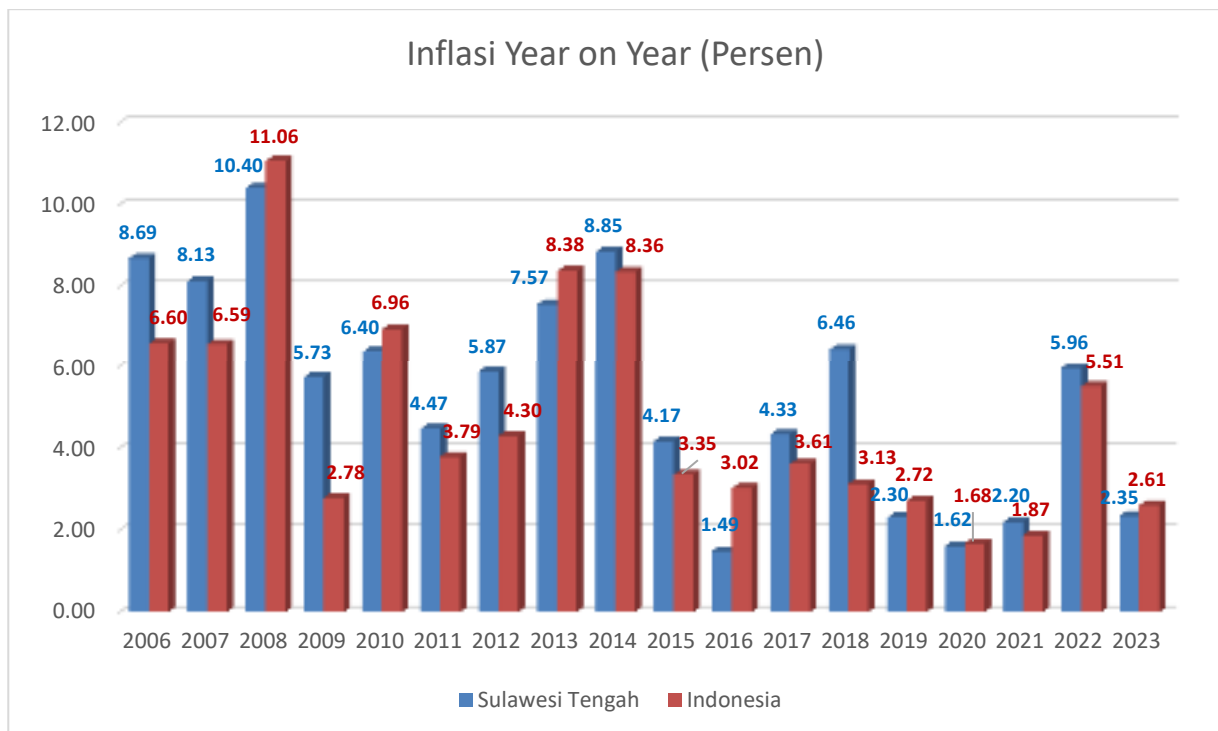
Gambar 2.15
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

E. Tingkat Inflasi Year-on-Year

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi merupakan suatu proses terjadinya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perkembangan laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 mengalami kecenderungan yang fluktuatif, yakni pada tahun 2006 laju inflasi sebesar 8,69 persen menurun menjadi 9,13 persen pada tahun 2007, pada tahun 2008 inflasi melonjak

hingga 10,40 persen dan dapat ditekan kembali hingga menjadi 5,73 persen dan kembali dapat ditekan hingga menjadi 4,47 persen pada tahun 2011. Selanjutnya laju inflasi kembali meningkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 5,87 persen menjadi 8,85 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 laju inflasi dapat diredam hingga menjadi 4,17 persen dan sebesar 1,49 persen pada tahun 2016. Selanjutnya laju inflasi mengalami kenaikan dari 4,33 persen pada tahun 2017 menjadi 6,46 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebesar 2,30 persen menurun menjadi 1,62 persen pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,20 persen dan sebesar 5,96 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 inflasi dapat ditekan hingga menjadi 2,35 persen. Kenaikan inflasi 2022 ini masih merupakan dampak dari adanya kenaikan BBM pada September 2022. Selanjutnya, mengenai perkembangan inflasi Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut ini.



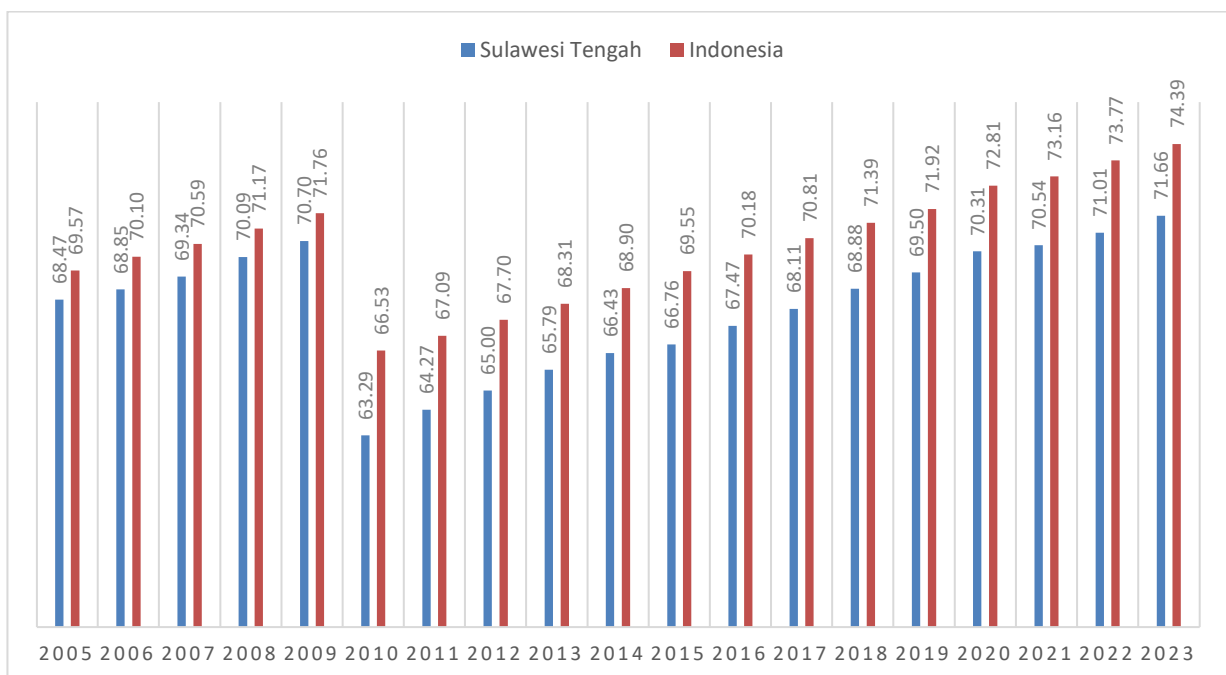
Sumber: BPS 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.16
Tingkat Inflasi Year-on-Year Sulawesi Tengah Periode 2006-2023

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi pengeluaran riil per Kapita; aspek pendidikan meliputi angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek kesehatan meliputi angka harapan hidup. Selanjutnya, capaian IPM di suatu wilayah/daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kategori Rendah: $IPM < 60$; (2) Kategori Sedang: $60 \leq IPM < 70$; (3) Kategori Tinggi: $70 \leq IPM < 80$; dan (4) Kategori Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Gambaran mengenai perkembangan Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.17
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan. Status pembangunan manusia di Sulawesi Tengah sudah berada di level “tinggi” saat ini. Selama 2005–2023, IPM Sulawesi

Tengah meningkat pada Tahun 2005 sebesar 68,47 persen menjadi 71,66 persen pada Tahun 2023.

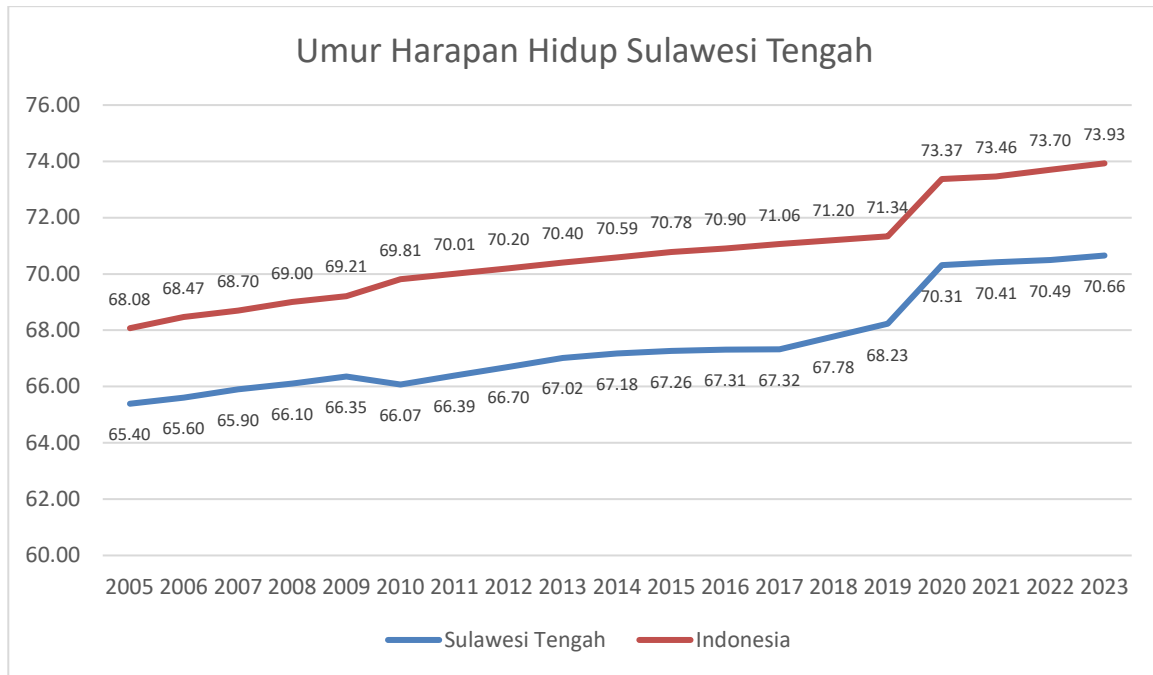
Peningkatan IPM Tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Tiga indikator pembentuk IPM mengalami percepatan pertumbuhan.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Dimensi
Pembentuknya Periode 2020–2023

Dimensi / Indikator Pembentuk IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	Tahun	70,31	70,41	70,49	70,66
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,17	13,23	13,32	13,33
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,83	8,89	8,89	8,96
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.	9.335.000	9.378.000	9.696.000	10.149.000

Sumber: BPS, 2024. (data diolah kembali)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2005 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,35 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. Pada Tahun 2005, UHH Sulawesi Tengah adalah 65,40 Tahun dan pada Tahun 2023 mencapai 70,66 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,17 Tahun (0,24 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,13 persen per tahun). Berikut gambar UHH Provinsi Sulawesi Tengah dan Indonesia periode 2005-2023:



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.18
Umur Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

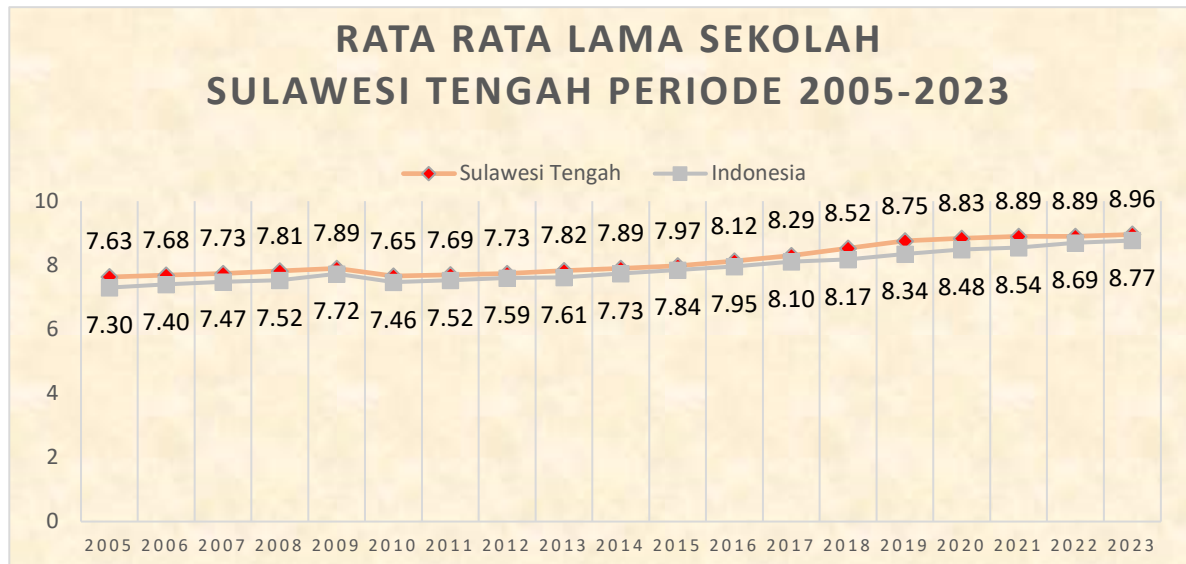
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2005 hingga 2023, HLS Sulawesi Tengah rata-rata meningkat 0,40 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,49 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2022, sementara RLS meningkat 0,07 tahun (0,79 persen) dibandingkan tahun 2022. Berikut RLS dan HLS Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun belajar pada pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Capaian angka RLS Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan, yakni dari 7,63 tahun pada Tahun 2005 meningkat menjadi 7,68 tahun pada Tahun 2006, dan angka RLS tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 8,89 tahun pada Tahun 2022, serta pada Tahun 2023 meningkat menjadi 8,96 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat usia

sekolah yang mengenyam bangku sekolah setiap tahun semakin membaik dan meningkat.

Perkembangan mengenai capaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS, 2024 (data diolah kembali)

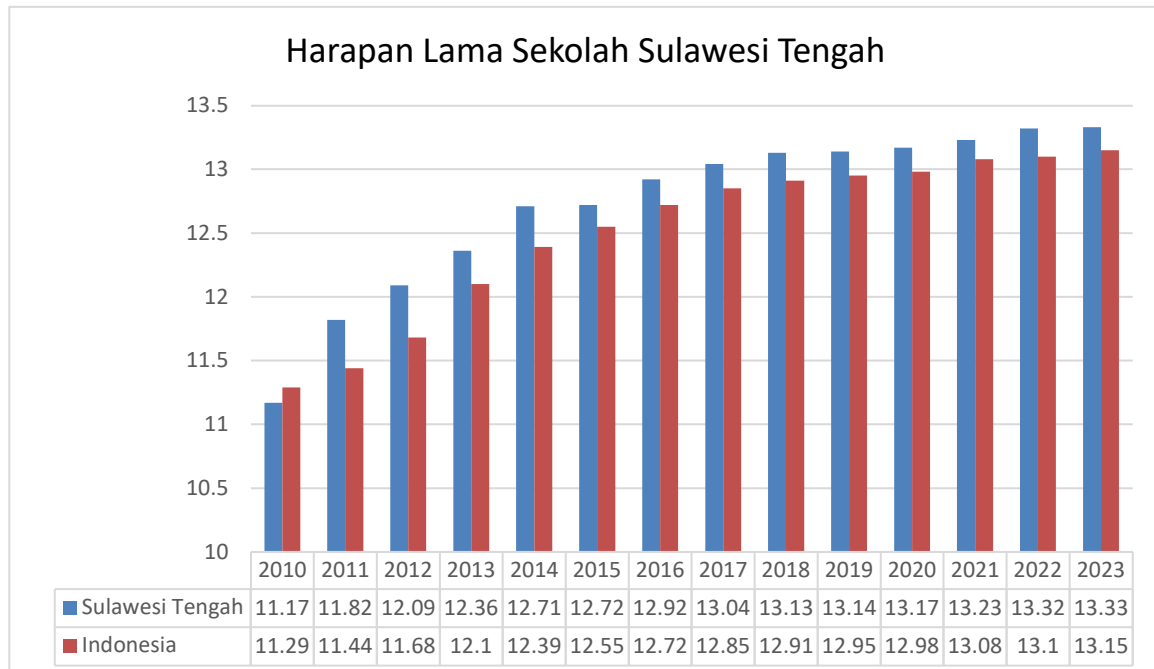
Gambar 2.19
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menyatakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan angka HLS, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan tentang pendidikan dan perubahannya yang terjadi di masa datang.

Kinerja bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang semakin membaik yang direfleksikan melalui perkembangan capaian indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 yang cenderung mengalami peningkatan dan berada diatas capaian HLS Nasional. Pada tahun 2010 angka HLS sebesar 11,17 tahun meningkat menjadi 11,82 tahun pada tahun 2011, pada tahun 2012 meningkat menjadi 12,09 tahun, selanjutnya secara terus menerus setiap tahunnya mengalami peningkatan

hingga mencapai 13,33 tahun pada tahun 2023. Secara rinci mengenai perkembangan angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



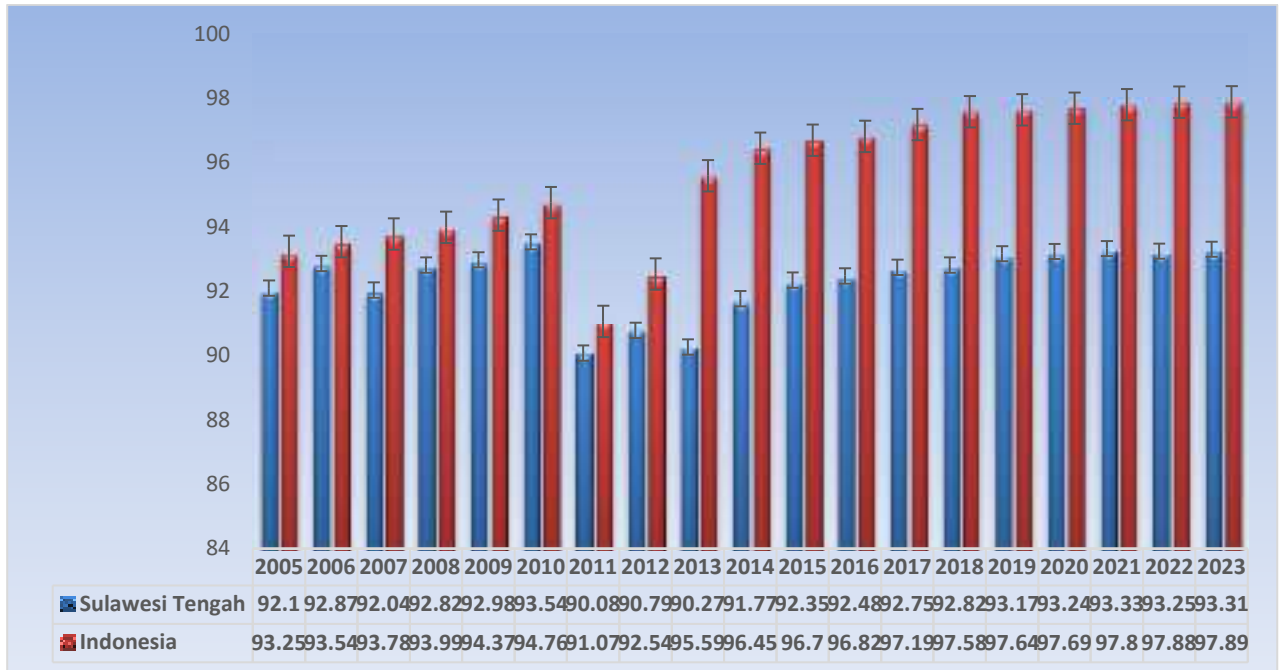
Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.20
Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tengah dan Nasional, Periode 2010-2023

- **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Kinerja bidang pendidikan juga direfleksikan melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan indikator perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Secara umum, APM pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah trendnya 19 tahun terakhir atau sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2005 APM SD/Mi sebesar 92,10 tahun meningkat menjadi 92,87 tahun pada tahun 2006, pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 92,04 tahun, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi 93,54 tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011 APM SD/Mi menurun menjadi 90,08 tahun dan sebesar 90,27 tahun pada tahun 2013, pada tahun 2014 APM SD/Mi mengalami peningkatan menjadi 91,77 tahun. Selanjutnya APM SD/Mi secara

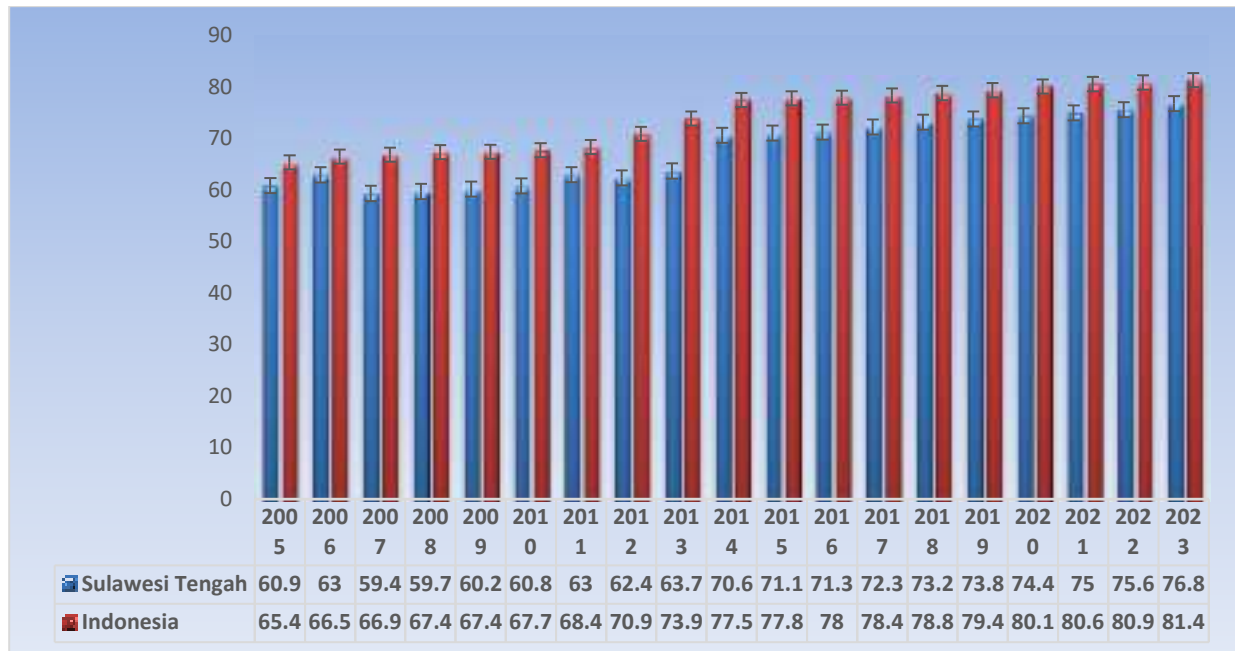
terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 93,31 tahun pada tahun 2023. Secara detail mengenai perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni SD/Mi di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

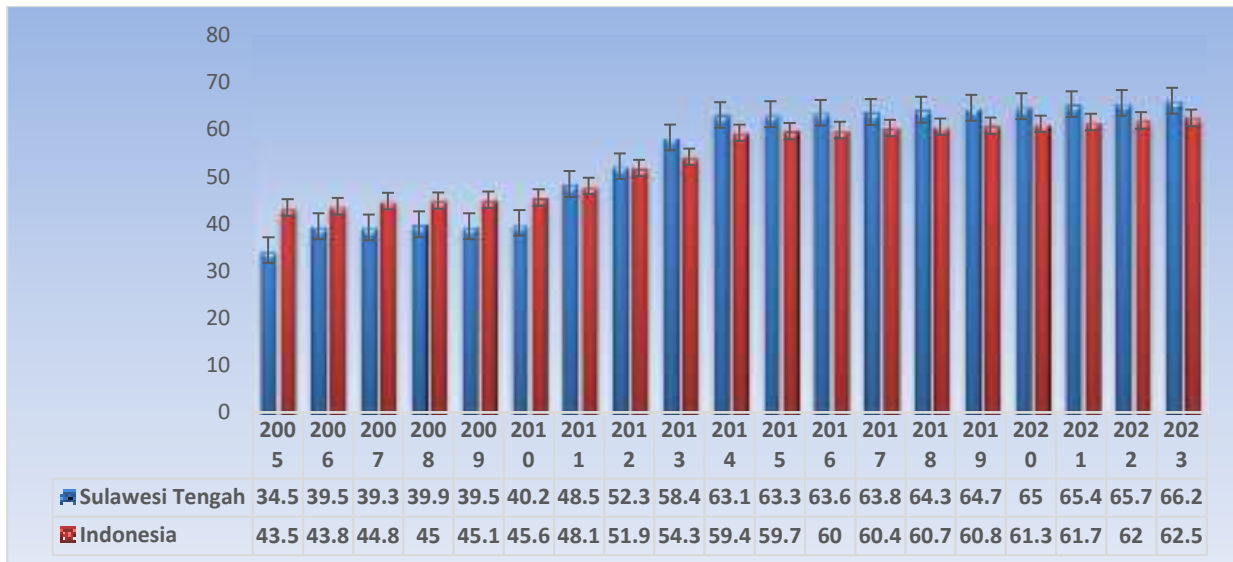
Selanjutnya, capaian APM SMP/MTs sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan, dan capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata capaian nasional. Pada tahun 2005 capaian APM SMP/MTs sebesar 60,89 persen meningkat menjadi 62,97 persen pada tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 59,36 persen, pada tahun 2008 APM SMP/MTs kembali meningkat menjadi 59,73 persen. Selanjutnya APM SMP/MTs secara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 76,8 persen pada tahun 2023. Secara detail mengenai perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.22
APM SMP/MTs Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

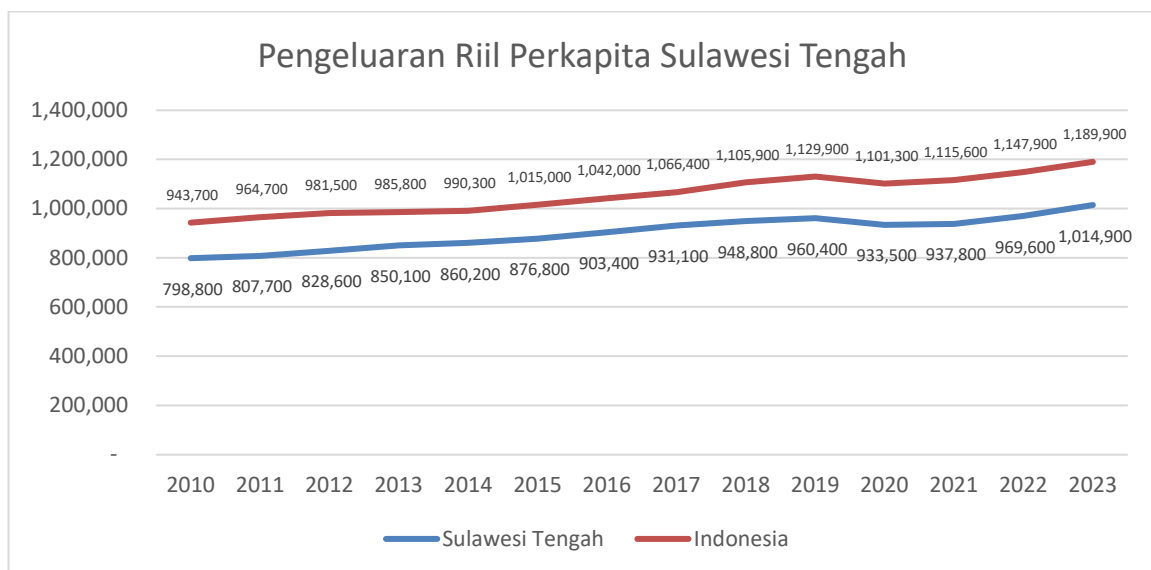
Capaian APM SMA/SMK/MA sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 juga cenderung mengalami peningkatan dan capaian tersebut masih berada diatas rata-rata capaian nasional. Pada tahun 2005 capaian APM SMA/SMK/MA sebesar 34,45 persen meningkat menjadi 39,51 persen pada tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 39,27 persen, pada tahun 2008 APM SMA/SMK/MA kembali meningkat menjadi 39,93 persen. Selanjutnya APM SMA/SMK/MA secara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 66,18 persen pada tahun 2023. Secara detail mengenai perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.23
APM SMA/SMK/MA Sulawesi Tengah Periode 2005-2023

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Tengah mencapai Rp10,15 juta per tahun. Capaian ini meningkat Rp.453.000,- (4,67 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,93 persen per tahun. Berikut gambar pengeluaran riil perkapita Provinsi Sulawesi Tengah dan Indonesia periode 2010-2023:



Sumber: BPS, 2024

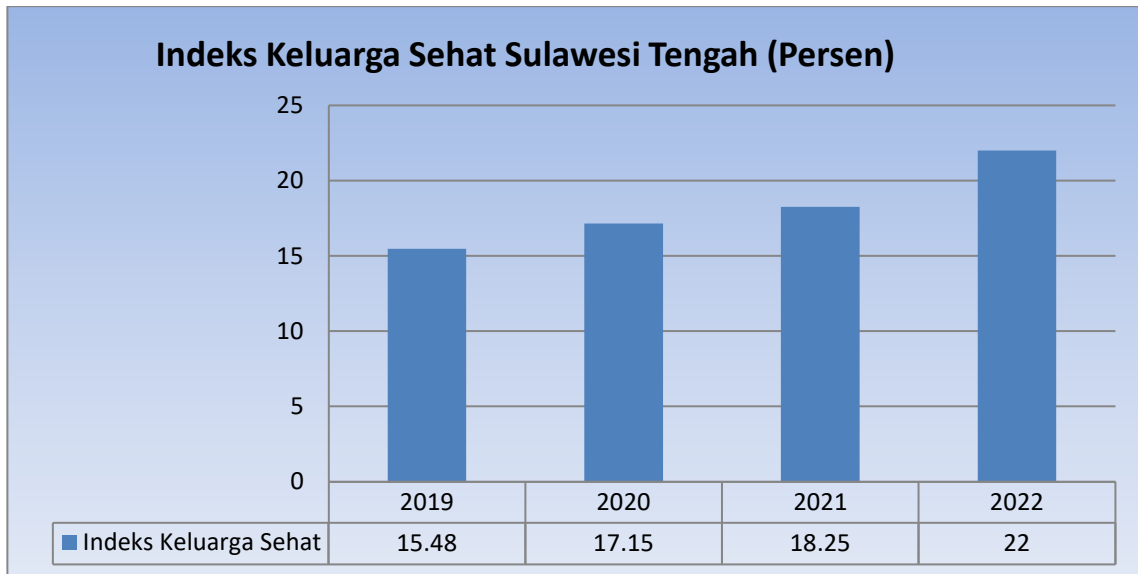
Gambar 2.24
Pengeluaran Riil Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2010-2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga sehat merupakan pondasi masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 12 indikator keluarga sehat sebagai indeks komposit pembentuk yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai, serta diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal. Adapun 12 indikator tersebut yaitu: (1) Keluarga mengikuti program KB; (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap; (4) Bayi mendapat ASI eksklusif; (5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; (6) Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar; (7) Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan; (8) Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan; (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih; dan (12) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Berdasarkan potret capaian IKS di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, mengalami perbaikan dan cenderung meningkat, yakni dari 15,48 persen pada Tahun 2019 menjadi 22 persen pada Tahun 2022. Secara detail mengenai perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

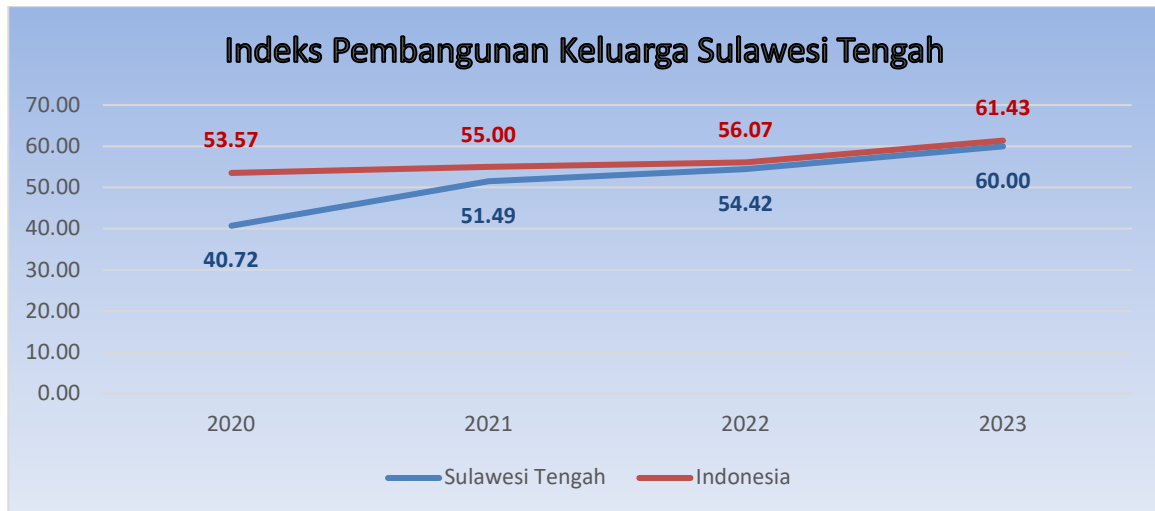
Gambar 2.25

Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2022

B. Indeks Pembangunan Keluarga Sulawesi Tengah

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.

Berdasarkan potret capaian, Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) di Provinsi Sulawesi Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan dan peningkatan yang signifikan, yakni dari 40,72 persen pada Tahun 2020 meningkat menjadi 54,42 persen pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat mencapai angka 60,00 persen akan tetapi Provinsi Sulawesi Tengah masih di bawah nasional. Secara detail mengenai perkembangan IBangga di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

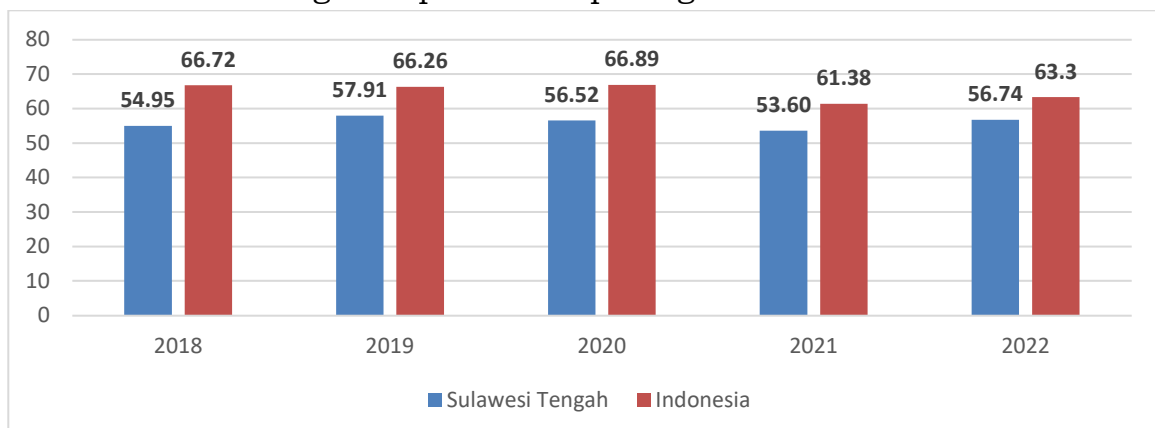


Sumber: BKKBN, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Keluarga Sulawesi Tengah Periode 2020-2023

C. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Capaian Indeks Perlindungan Anak di Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif pada 5 (lima) tahun terakhir. Terlihat pada Tahun 2018 Indeks Perlindungan anak sebesar 54,95 persen meningkat menjadi 57,91 persen pada Tahun 2019, selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 56,52 persen dan sebesar 53,60 persen pada Tahun 2021, kemudian terjadi peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 56,74 persen dan masih di bawah nasional. Secara detail mengenai perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



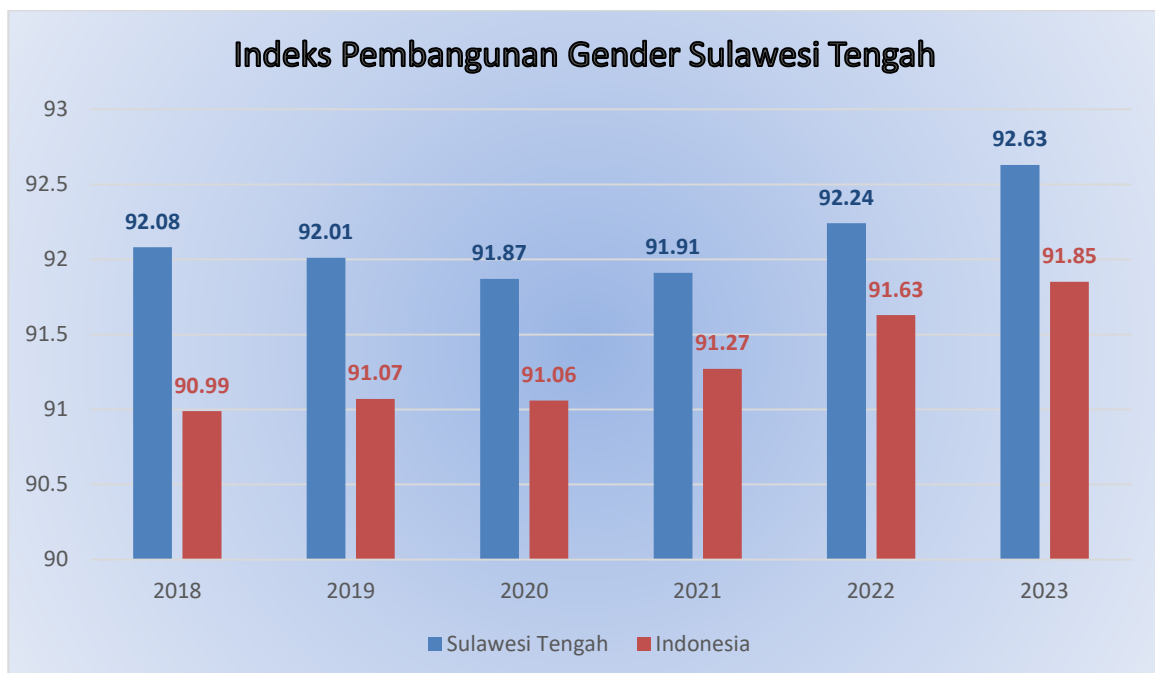
Sumber: Kementerian PPPA, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.27
Indeks Perlindungan Anak Sulawesi Tengah Periode 2018-2022

D. Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Tengah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, hanya kalau IPG memberikan makna atau mengungkapkan adanya ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Berdasarkan potret capaian, perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan capaian yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2018 sebesar 92,08 persen menurun menjadi 92,01 persen pada Tahun 2019, dan sebesar 91,87 persen pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2021 IPG meningkat menjadi 91,91 persen, pada Tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai angka 92,24 persen, serta pada Tahun 2023 meningkat mencapai 92,63 persen, dan sepanjang Tahun 2018-2023 Provinsi Sulawesi Tengah berada di atas nasional.

Selanjutnya, secara detail mengenai perkembangan IPG di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

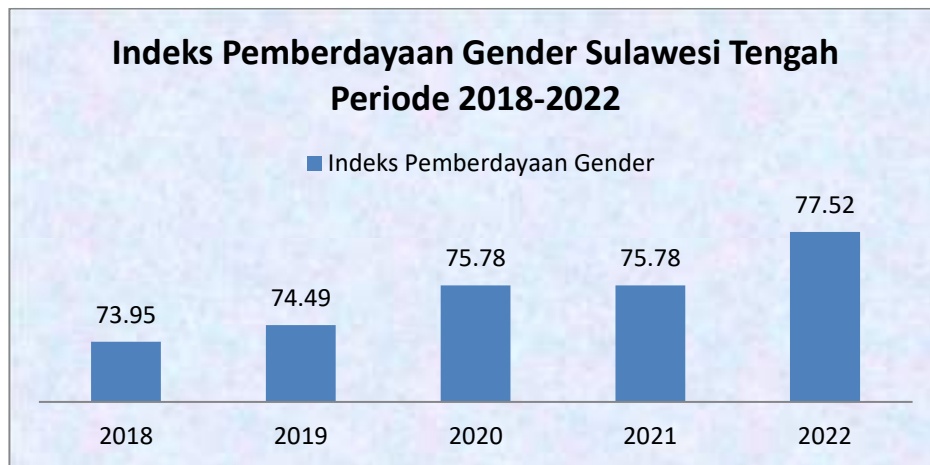


Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.28
Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

E. Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Tengah

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 meningkat menjadi 77,52. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik meningkat. Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.29

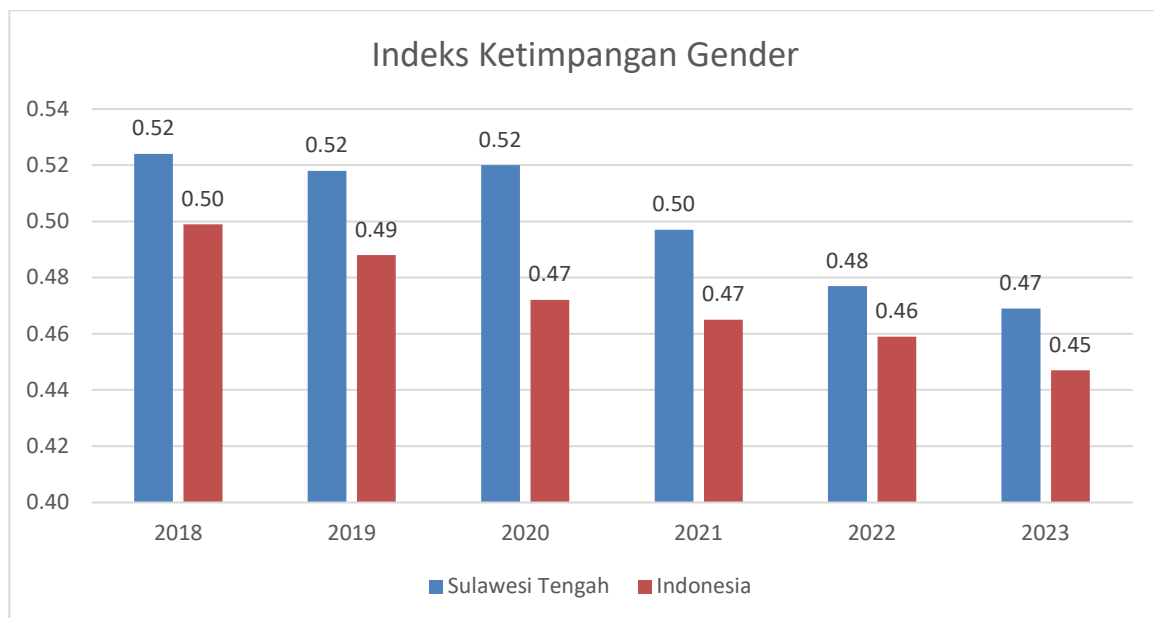
Indeks Pemberdayaan Gender Sulawesi Tengah Periode 2018-2022

F. Indeks Ketimpangan Gender

Salah satu tujuan dan menjadi agenda pembangunan nasional adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sedangkan keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Perspektif mutu modal manusia (*human capital*) telah menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi.

Menurut Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (2016), bahwa ketimpangan/ketidaksetaraan gender atau Indeks Ketimpangan Gender (IPG) digunakan untuk menunjukkan masih adanya kesenjangan gender pada berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan (partisipasi ekonomi).

Berdasarkan potret capaian IPG di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami perbaikan dan angkanya semakin menurun yakni dari 0,52 pada Tahun 2018 menurun signifikan menjadi 0,47 pada Tahun 2023. Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan IPG di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

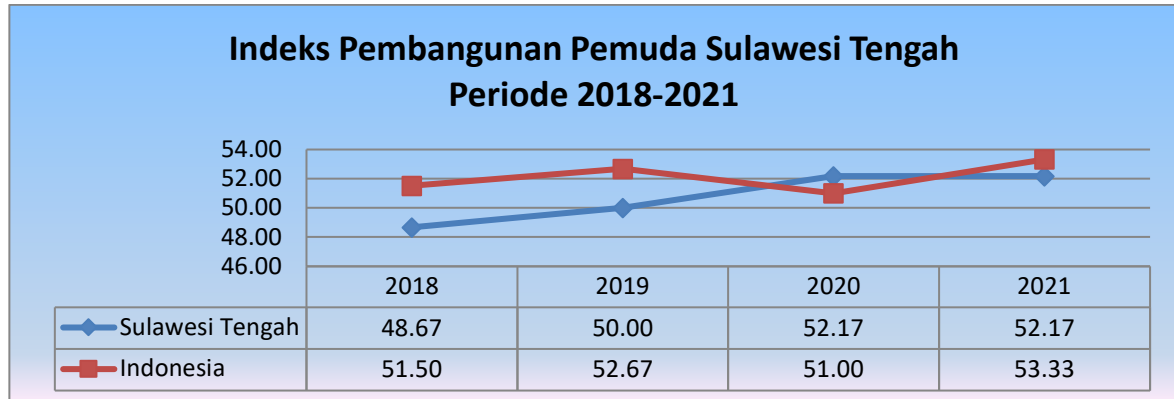
Gambar 2.30
Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Tengah Periode 2018-2023

G. Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain, yaitu: pembangunan individu; pembangunan kehidupan dan kesejahteraan; dan partisipasi dan diskriminasi. Terlihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 cenderung

mengalami perbaikan dan peningkatan, yakni 48,67 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 52,17 persen pada tahun 2021.

Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (data diolah kembali)

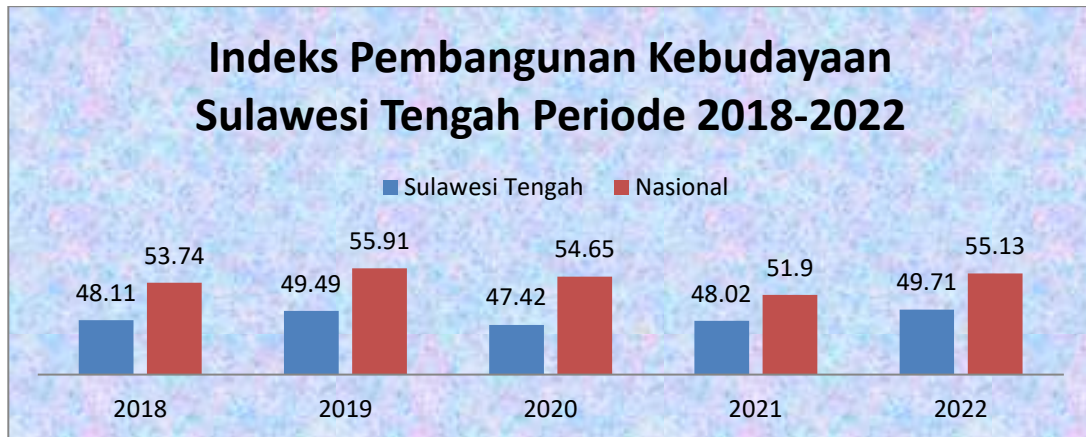
Gambar 2.31

Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah Periode 2018-2021

H. Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai kebijakan bidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Berdasarkan potret capaian, IPK di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 masih dibawah rata-rata capaian nasional dan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 2018 IPK sebesar 48,11 persen meningkat menjadi 49,49 persen pada Tahun 2019, selanjutnya pada Tahun 2020 menurun menjadi 47,41 persen, sedangkan pada Tahun 2021 IPK mengalami peningkatan menjadi 48,02 persen, serta pada Tahun 2022 meningkat menjadi 49,71 persen. IPK di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah nasional yaitu 55,13 persen.

Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kemdikbud, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.32

Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah Periode 2018-2022

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia, fasilitas wilayah atau infrastruktur serta iklim investasi. Dalam konteks otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, potensi gas dan minyak bumi, serta potensi pertambangan. Potensi ini perlu dikembangkan untuk peningkatan perekonomian dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup, selain itu pengembangan potensi energi terbarukan juga perlu mendapat perhatian. Sulawesi Tengah memiliki potensi energi air cukup banyak dalam skala besar, potensi panas bumi serta sumber energi alternatif yakni Solar Home System (SHS) dengan memanfaatkan intensitas sinar matahari cukup tinggi karena Sulawesi Tengah dilalui oleh garis khatulistiwa.

LPE Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mampu menembus angka 15,17 persen dari angka tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,7 persen. Angka ini menempatkan Sulawesi Tengah pada posisi tertinggi kedua secara nasional dan yang tertinggi untuk wilayah Sulawesi bahkan melebihi pertumbuhan

ekonomi nasional. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,69 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap bruto sebesar 23,22 persen. Pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini disertai dengan menurunnya TPT menjadi 3,0 persen, Tingkat Kemiskinan 12,30 persen, Rasio Gini 0,308 serta peningkatan IPM yang meningkat dari angka 69,79 menjadi 70,28 (BPS, 2022).

Dilihat dari struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama kontribusinya dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah semakin menurun yakni 36,61 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 15,77 persen pada tahun 2023, sementara kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung meningkat yakni dari 10,12 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 15,30 persen pada tahun 2023. Sedangkan Kontribusi Sektor Industri pengolahan cenderung meningkat signifikan yakni dari 6,24 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 40,37 persen pada tahun 2023. Industri pengolahan ini dominan disumbangkan atau berasal dari industri logam dasar. Untuk itu diharapkan kedepan kontribusi sektor industri pengolahan didominasi oleh nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Respon Kebijakan Industrisalisasi Hulu-Hilir sektor pertanian secara umum menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah kedepan.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

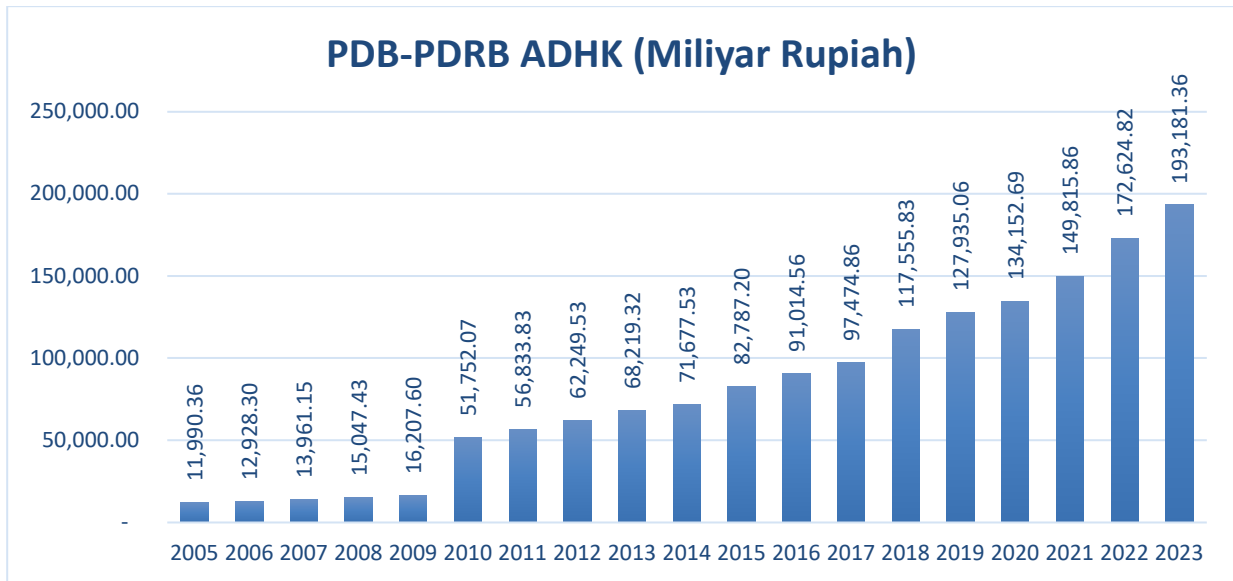
Gambar 2.33

Struktur PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2023 (Persen)

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia disuatu daerah capaiannya menjadi lebih dari sebelumnya melalui strategi kebijakan pemerintah dan perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai tambah sektor ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas. Diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi daerah mengingat adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi disetiap daerah, adanya perbedaan tingkat pembangunan antar daerah dan ketimpangan ekonomi antar daerah, serta adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah lain. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain, mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia, memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh, memperkirakan potensi, prospek perkembangan, hambatan dan resiko masa yang akan datang, memberi kesempatan untuk memperoleh pilihan terbaik, dan memperoleh skala prioritas dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

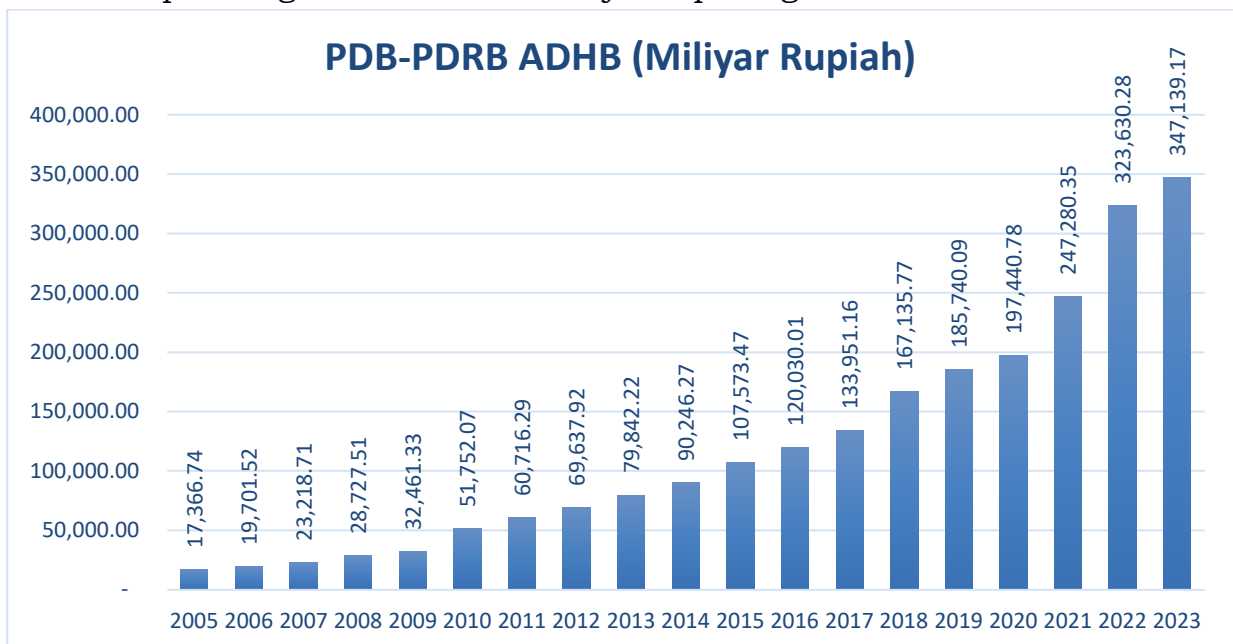
Aktivitas perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2005 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp.11,99 Trilyun meningkat menjadi Rp.12,92 Trilyun, selanjutnya secara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp.193,18 Trilyun pada tahun 2023. Secara rinci mengenai perkembangan PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.34
Produk Domestik Regional Bruto ADHK Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2005-2023

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005 nilai PDRB ADHB mencapai Rp.17,36 Trilyun meningkat menjadi Rp.19,70 Trilyun, selanjutnya secara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp.347,13 Trilyun pada tahun 2023. Secara rinci mengenai perkembangan PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.35
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2005-2023

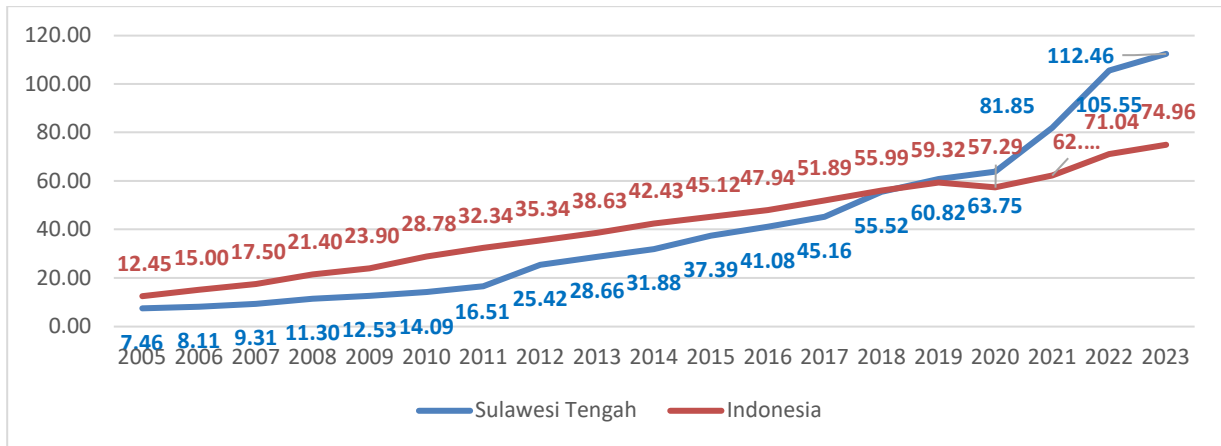
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Sulawesi Tengah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah/daerah. PDRB per Kapita adalah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah/daerah dalam selang waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB per Kapita suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Sselanjutnya, Bank Dunia mengklasifikasi negara berdasarkan PDB per capita dalam 4 (empat kategori, yaitu:

1. *Low Income* / Pendapatan Rendah dengan kategori pendapatan perkapita sebesar USD1.035;
2. *Lower Middle Income* / Pendapatan Menengah Bawah dengan kategori pendapatan perkapita sebesar USD 1.036 - USD 4,045;
3. *Upper Middle Income* /Pendapatan Menengah Atas dengan kategori pendapatan perkapita sebesar USD 4.046 - USD12.535) dan
4. *High Income* / Pendapatan Tinggi yaitu dengan kategori pendapatan perkapita sebesar >USD12.535.

Capaian PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan dan berada diatas capaian PRDB berdasarkan harga berlaku Nasional. Terlihat PDRB per Kapita ADHB pada Tahun 2005 hanya sebesar Rp. 7,46 juta meningkat menjadi Rp.8,11 juta pada Tahun 2006, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.9,31 juta, selanjutnya PDRB per Kapita ADHB secara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp.112,46 juta atau sekitar US\$ 7.380,52, pada tahun 2023 dan capaian PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah ini masuk dalam klasifikasi *Upper Middle Income* (Pendapatan Menengah Atas). Secara detail mengenai perkembangan PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 dapat di lihat pada gambar berikut:



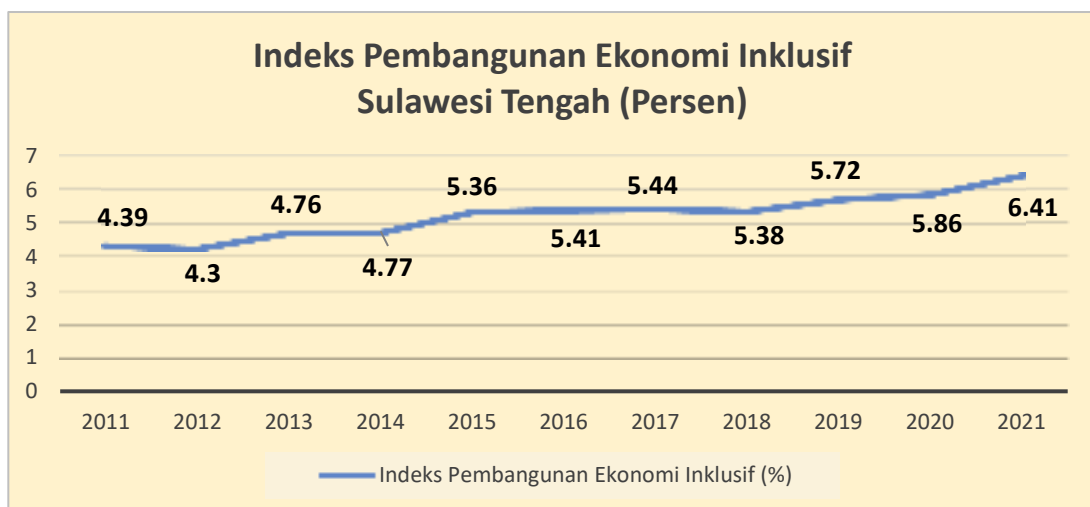
Sumber: BPS, 2023. (data diolah kembali)

Gambar 2.36
PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2023 (Rp)

C. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2011 hingga Tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 4,39 persen pada Tahun 2011 menjadi 6,41 persen pada Tahun 2021. Perkembangan mengenai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2013 hingga Tahun 2021 dapat di lihat pada gambar berikut:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022 (data diolah kembali)

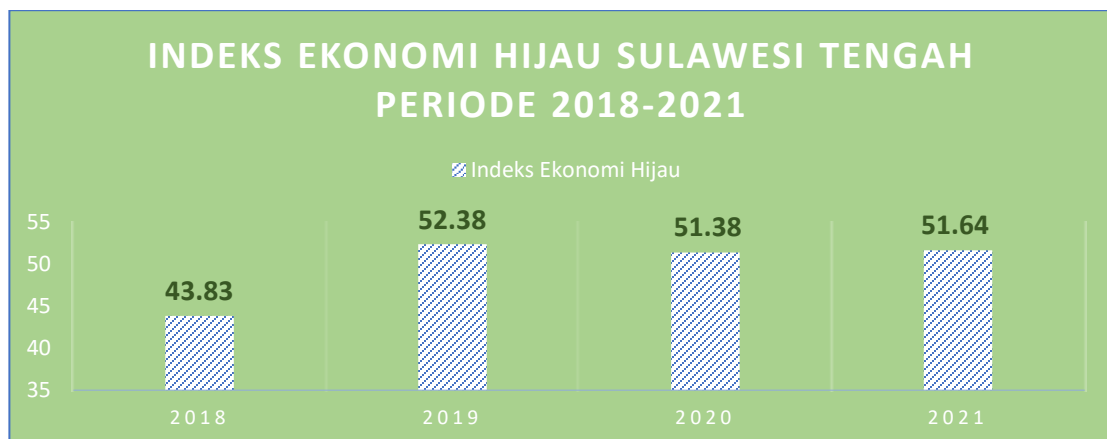
Gambar 2.37
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2021

D. Indeks Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau terus digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif dan secara sosial. Pemahaman terhadap pentingnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Planning/GGP*) juga sebagai indikator pendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index (GEI)* sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2018 nilai Indeks Ekonomi Hijau sebesar 48,83 meningkat menjadi 52,38 pada tahun 2019, selanjutnya pada tahun nilainya menurun menjadi 51,38, sedangkan pada tahun 2021 Indeks Ekonomi Hijau kembali meningkat menjadi 51,64.

Selanjutnya perkembangan mengenai Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat di lihat pada gambar berikut:



Sumber: Capaian & Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015-2021, Kementerian PPN/Bappenas 2023.

Gambar 2.38
Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Tengah Periode 2018-2021

Meningkatnya indeks ekonomi hijau pada tahun 2018 sebesar 43,83 point menjadi 52,38 point tahun 2021 disebabkan oleh adanya bantuan sosial kebencanaan akibat bencana alam September 2018, dan pada tahun 2020

menurun diakibatkan berakhirnya bantuan sosial kebencanaan dan adanya pandemi Covid-19.

E. Indeks Ekonomi Biru

Indeks ekonomi biru adalah indikator untuk menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Indeks ekonomi biru disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor ekonomi biru.

Tabel 2.15
Indeks Ekonomi Biru Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

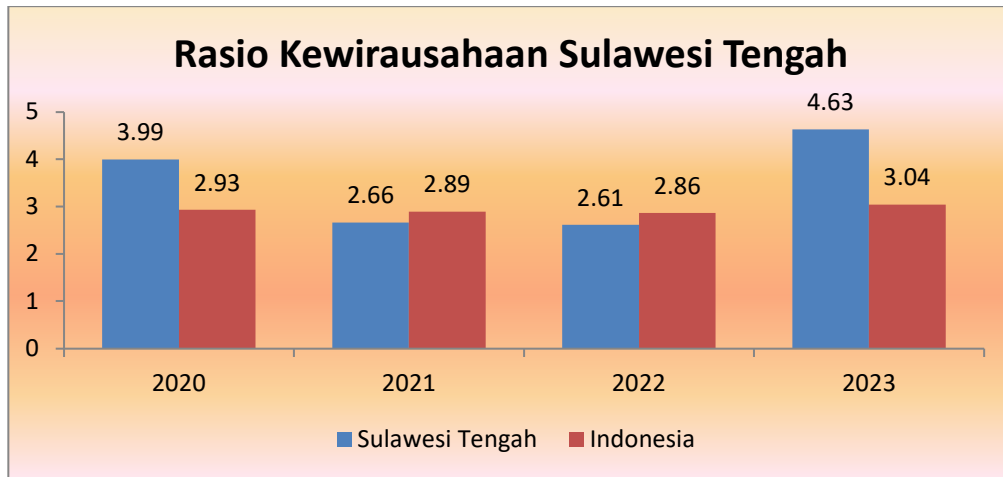
Provinsi/Kabupaten Kota	2023 (ORI)	2023 (Normalized)
SULAWESI TENGAH	59,90	46,63
NATIONAL IBEI	43,98	34,25
BANGGAI LAUT	59,27	46,16
BANGGAI KEPULAUAN	56,88	44,30
BANGGAI	56,88	44,30
TOUNA	65,86	51,29
MOROWALI UTARA	58,67	45,70
MOROWALI	58,67	45,70
POSO	58,07	45,23
PARIGI MOUTONG	65,86	51,29
DONGGALA	53,88	41,97
TOLI-TOLI	56,88	44,30
BUOL	53,88	41,97
SIGI	20,95	16,32
PALU	23,95	18,65

Sumber: Bappeda, 2024 (Data diolah)

Untuk tahun 2023 capaian indikator indeks ekonomi biru Sulawesi Tengah sebesar 59,90 melampaui capaian nasional sebesar 43,98 sedangkan untuk tingkat kabupaten/Kota capaian indeks ekonomin tertinggi terdapat pada Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 65,86.

F. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan antara jumlah wirausaha dengan jumlah penduduk dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, bahwa rasio kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 2,35 persen masih dibawah rasio kewirausahaan nasional yaitu 2,89 persen.



Sumber: Kemenkop UKM, 2021 (data diolah kembali)

Gambar 2.39
Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

F. Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

(1) Potensi Sektor Pertanian

Sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar 15,82 persen. Kontribusi ini ditopang oleh seluruh produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan Perikanan.

Produksi tanaman padi selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada tahun 2009 produksi padi sebanyak 953.396,00 ton meningkat menjadi 957.108,00 ton pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2021 produksinya meningkat menjadi 867.012,77 ton, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 744.408,70 ton, sementara pada tahun 2023 produksi padi kembali meningkat hingga mencapai 821.367,49 ton atau meningkat sebesar 9,21 persen pada tahun 2023.



Sumber: BPS, 2024.

Gambar 2.40
Produksi Padi Provinsi Sulawesi Tengah dan Indonesia Periode 2009-2023

Dilihat dari sebaran produksi padi pada tahun 2023, Produksi padi terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 249.300,33 ton atau sebesar 30,67 persen dari total produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai sebanyak 141.013,22 ton (21,46 persen), dan Kabupaten Poso sebanyak 95.815,06 ton (11,79 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2019-2023

Kabupaten	Produksi Padi (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	3 061,64	3 010,66	1 880,25	992,99	2.238,44
Banggai	163 726,27	150 885,18	163 827,06	141.013,22	174.431,76
Morowali	44 671,91	42 068,22	44 595,26	35.483,73	26.115,52
Poso	118 785,13	99 359,51	101 237,39	77.879,42	95.815,06
Donggala	59 488,83	66 260,44	60 479,93	57.266,29	60.933,39
Tolitoli	77 913,21	83 556,72	63 800,78	57.937,49	55.315,19
Buol	18 436,84	20 866,59	26 235,29	16.798,44	18.384,26
Parigi Moutong	253 922,36	219 829,78	279 343,58	245.039,66	249.300,33
Tojo Una–Una	7 237,19	6 660,20	5 233,28	5.677,34	7.356,78
Sigi	64 949,47	83 143,90	87 082,49	80.066,14	92.758,17
Banggai Laut	—	—	—	-	-
Morowali Utara	32 253,90	34 133,56	32 533,18	25.365,23	29.579,76
Palu	457,55	333,5	764,28	888,75	719,83
Sulawesi Tengah	844 904,30	810 108,26	867 012,77	744.408,70	821.367,41

Sumber: BPS, 2024

Perkembangan produksi beras selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 produksi beras sebanyak 496.160,06 ton menurun menjadi 475.726,51 ton pada tahun 2020, pada tahun 2021 produksinya menurun menjadi 455.414,85 ton, dan pada tahun 2022 sebanyak 439.408,72 ton, selanjutnya pada tahun 2023 produksi beras kembali meningkat hingga mencapai 479.866,30 ton atau meningkat sebesar 9,21 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya dilihat dari sebaran produksi beras pada tahun 2023, Produksi beras terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 147.156,72 ton atau sebesar 30,66 persen dari total produksi beras di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai sebanyak 102.963,38 ton (21,46 persen), dan Kabupaten Poso sebanyak 56.557,59 ton (11,79 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2019-2023

Kabupaten	Produksi Beras (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	1 797,89	1 767,97	1 109,86	586,15	1.321,30
Banggai	96 146,32	88 605,55	96 703,64	83.237,12	102.963,38
Morowali	26 233,06	24 704,05	26 323,64	20.945,28	15.415,44
Poso	69 755,16	58 347,70	59 758,29	45.970,57	56.557,59
Donggala	34 934,11	38 910,66	35 700,03	33.803,08	35.967,69
Tolitoli	45 753,62	49 067,70	37 660,26	34.199,29	32.651,39
Buol	10 826,82	12 253,67	15 486,13	9.915,76	10.851,84
Parigi Moutong	149 112,90	129 092,44	164 890,61	144.641,73	147.156,72
Tojo Una–Una	4 249,97	3 911,12	3 089,08	3.351,22	4.342,53
Sigi	38 140,81	48 825,27	51 402,97	47.261,35	54.753,19
Banggai Laut	-	-	-	-	-
Morowali Utara	18 940,70	20 044,53	16 612,46	14.972,56	17.460,34
Palu	268,7	195,85	487,44	524,61	424,89
Sulawesi Tengah	496 160,06	475 726,51	455 414,85	439 408,72	479.866,30

Sumber: BPS, 2024.

(2) Potensi Sektor Perkebunan

Produksi tanaman kelapa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada tahun 2019 produksi tanaman kelapa sebanyak 155.341,39 ton meningkat menjadi 195.160,06 ton pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 produksinya meningkat menjadi 195.179,72 ton, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 201.665,20 ton, sementara pada tahun 2023 produksi kelapa meningkat hingga mencapai 188.329,76 ton atau menurun sebesar -6,61 persen pada tahun 2023.

Dilihat dari sebaran produksi kelapa pada tahun 2023, Produksi kelapa terbesar berada di Kabupaten Banggai sebanyak 49.819,74 ton atau sebesar 26,45 persen dari total produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 35.891,59 ton (19,06 persen), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 33.150,39 ton (17,60 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2019-2023

Kabupaten Kota	Produksi Kelapa (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	10 237,03	10 200,05	10.210,05	10.496,20	10.496,70
Banggai	48 894,61	49 116,34	49.120,34	94 50.760,01	49.819,74
Morowali	1 147,00	1 207,30	1.207,30	733,49	1.195,72
Poso	4 123,80	4 394,21	4.395,21	5.310,35	5.310,49
Donggala	28 678,20	30 139,10	30.139,10	31.874,22	22.760,64
Tolitoli	16 929,10	17 742,52	17.743,52	17.474,89	17.474,89
Buol	8 062,11	8 035,50	8.035,70	8.000,85	4.381,23
Parigi Moutong	36,297,85	36 571,19	36.571,85	36.205,99	35.891,59
Tojo Una–Una	31 953,45	31 245,74	31.246,55	33.164,23	33.150,39
Sigi	2 514,20	2 670,90	2.671,91	3.070,25	3.070,25
Banggai Laut	2 225,90	3 161,42	3.161,72	3.688,25	3.834,04
Morowali Utara	404,56	401,53	401,95	488,77	506,38
Palu	171,43	274,26	274,52	397,70	437,70
Sulawesi Tengah	155 341,39	195 160,06	195.179,72	201.665,20	188.329,76

Sumber: BPS, 2024

Produksi tanaman kakao sepanjang periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terlihat pada tahun 2019 produksi tanaman kakao sebanyak 128.153,73 ton menurun menjadi 127.206,86 ton pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 produksinya kembali meningkat menjadi 130.649,47 ton, dan pada tahun 2022 menurun menjadi 125.989,86 ton, sementara pada tahun 2023 produksi kakao mengalami peningkatan menjadi 128.255,28 ton atau meningkat sebesar 1,80 persen pada tahun 2023.

Dilihat dari sebaran produksi kakao pada tahun 2023, Produksi kaka terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 28.827,11 ton atau sebesar 22,48 persen dari total produksi kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Poso sebanyak 25.291,25 ton (19,72 persen), dan Kabupaten Sigi sebanyak 19.511,26 ton (15,21 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kakao di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Produksi Kakao (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banggai Kepulauan	277,50	277,50	276,00	270,00	275,00
2.	Banggai	15.516,86	15.530,30	15.534,05	15.338,48	15.418,21
3.	Morowali	2.419,85	697,17	1.870,00	1.727,75	1.733,00
4.	Poso	23.740,27	23.992,32	23.450,00	24.498,20	25.291,25
5.	Donggala	17.880,11	17.952,48	18.200,00	18.287,62	18.314,10
6.	Tolitoli	8.887,14	10.133,95	8.241,40	7.085,28	7.285,25
7.	Buol	3.681,09	3.105,32	2.885,06	2.173,23	2.511,21
8.	Parigi Moutong	25.318,80	23.323,80	28.690,84	28.713,23	28.827,11
9.	Tojo Una-Una	5.199,50	5.200,00	5.451,20	3.603,60	3.995,75
10.	Sigi	19.366,35	19.356,00	19.726,00	19.498,65	19.511,26
11.	Banggai Laut	103,32	94,67	91,00	85,85	85,00
12.	Morowali Utara	5.710,60	5.491,05	6.182,26	4.645,30	4.955,71
13.	Kota Palu	52,35	52,30	52,15	52,30	52,43
SULAWESI TENGAH		128.153,72	127.206,86	130.649,96	125.989,47	128.255,28

Sumber: BPS, 2024

Produksi tanaman kelapa sawit sepanjang periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat pada tahun 2019 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 239.285,26 ton meningkat menjadi 272.275,15 ton pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 produksinya meningkat menjadi 310.435,97 ton, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 139.055,48 ton, sementara pada tahun 2023 produksi kelapa sawit mengalami peningkatan signifikan menjadi 190.302,46 ton atau meningkat sebesar 36,85 persen pada tahun 2023.

Sementara dilihat dari sebaran produksi kelapa sawit pada tahun 2023, produksi kelapa sawit terbesar berada di Kabupaten Morowali sebanyak 62.324,06 ton atau sebesar 32,75 persen dari total produksi pala di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Buol sebanyak 43.050,00 ton (22,62 persen), dan Kabupaten Banggai sebanyak 35.540,94 ton (18,68 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Produksi Kelapa Sawit (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-
2.	Banggai	51 763,65	51 928,98	52 674,28	35.540,94	35.540,94
3.	Morowali	69 755,41	77 284,90	74 092,52	48.360,13	62.324,06
4.	Poso	547,25	49,22	2 995,77	3.371,71	3.371,71
5.	Donggala	53 246,88	52 467,11	52 587,38	17.074,33	19.456,52
6.	Tolitoli	3 445,00	4 132,60	6 537,60	1.167,50	9.479,00
7.	Buol	60 334,67	63 781,47	70 170,99	16.850,37	43.050,00
8.	Parigi Moutong	192,4	194,7	194,71	218,51	216,32
9.	Tojo Una-Una	-	-	-	-	164,45
10.	Sigi	-	-	-	15,00	22,50
11.	Banggai Laut	-	-	-	-	-
12.	Morowali Utara	22,394,14	22 436,17	51 182,72	16.457,00	16.676,96
13.	Kota Palu	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah		239 285,26	272 275,15	310 435,97	139.055,48	190.302,46

Sumber: BPS, 2024

(3) Potensi Sektor Peternakan

Perkembangan populasi ternak sapi sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2020 populasi sapi sebanyak 402.191 ekor meningkat menjadi 431.339 ekor pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 produksinya meningkat menjadi 463.563 ekor, dan serta pada tahun 2023 populasi sapi mengalami peningkatan signifikan menjadi 522.794 ekor atau meningkat sebesar 12,78 persen pada tahun 2023.

Sementara dilihat dari sebaran populasi sapi pada tahun 2023, populasi terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai sebanyak 137.897 ekor atau sebesar 26,38 persen dari total populasi sapi di Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Sigi sebanyak 60.728 ekor (11,62 persen), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 47.966 ekor (9,17 persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kemiri di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023

Kabupaten/Kota	Populasi Sapi Potong (ekor)			
	2020	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	19.403	20.336	20.455	20.624
Banggai	101.541	113.169	125.528	137.897
Morowali	9.020	9.394	11.263	13.142
Poso	21.353	21.606	21.705	21.784
Donggala	40.485	41.227	42.229	43.181
Tolitoli	17.891	18.903	19.935	20.967
Buol	30.518	33.052	35.586	38.142
Parigi Moutong	32.796	34.282	35.482	36.652
Tojo Una-Una	40.023	43.579	47.757	47.966
Sigi	47.262	51.504	56.131	60.728
Banggai Laut	3.112	3.229	3.298	3.377
Morowali Utara	31.797	34.049	36.627	39.167
Palu	6.990	7.009	7.567	39.167
Sulawesi Tengah	402.191	431.339	463.563	522.794

Sumber: BPS, 2024.

(4) Potensi Sektor Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2020 produksinya sebanyak 177.352,80 ton dengan nilai produksi Rp.3.793.937.441.200,- meningkat setiap tahunnya hingga produksinya mencapai 373.509,36 ton dengan nilai produksi Rp.8.140.993.918.900,- pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan produksi sebesar 66,51 persen pada tahun 2023.

Dilihat dari sebaran produksi perikanan tangkap pada tahun 2023, produksi perikanan tangka terbanyak terdapat di Kabupaten Donggala dengan produksi mencapai 115.335,00 ton (30,88 persen) dan nilai produksi sebesar Rp.3.345.872.800,-, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Banggai dengan produksi mencapai 57.963,90 ton (15,52 persen) dan nilai produksi sebesar Rp.275.616.718.100,-, dan Kabupaten Parigi Moutong dengan produksi mencapai 39.872,30 ton (10,68 persen) dan nilai produksi sebesar Rp.799.522.000.000,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023

Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)
Kabupaten Banggai Kepulauan	9.839,00	251.530.668,70	10.223,50	251.851.247,90	10.790,40	359.551.034,60	20.791,90	588.359.200,00
Kabupaten Banggai	18.751,10	331.517.700,00	22.657,90	482.920.820,00	23.618,20	672.217.905,00	57.963,90	275.616.718,10
Kabupaten Morowali	27.377,30	654.492.400,00	33.086,90	720.511.550,00	36.392,20	1.223.827.250,00	36.414,70	717.563.100,00
Kabupaten Poso	6.400,20	226.791.534,00	8.382,80	227.896.774,50	8.133,29	114.113.955,00	5.646,56	158.500.210,00
Kabupaten Donggala	19.438,50	336.051.850,00	25.184,40	440.269.553,87	30.423,20	779.403.689,43	115.335,00	3.345.872.800,00
Kabupaten Tolitoli	16.572,10	495.647.761,10	18.436,80	436.448.292,20	20.239,20	504.345.300,00	20.031,40	447.836.733,10
Kabupaten Buol	21.096,40	222.287.804,80	22.397,60	435.414.000,00	23.286,10	244.300.450,00	20.035,10	465.372.535,60
Kabupaten Parigi Moutong	16.872,80	392.521.587,50	20.814,80	494.736.104,70	21.789,40	492.086.946,80	39.872,30	799.522.000,00
Kabupaten Tojo Una-Una	13.430,50	396.799.926,40	13.430,50	398.938.176,40	14.146,00	396.820.326,40	15.854,20	564.572.000,00
Kabupaten Morowali Utara	2.200,10	47.026.460,10	2.446,60	75.098.973,20	2.455,10	70.669.988,90	1.789,90	64.571.022,10
Kabupaten Banggai Laut	24.916,60	409.823.695,60	29.609,20	556.767.801,50	31.640,60	841.654.723,80	37.517,40	636.779.100,00
Kota Palu	412,00	29.367.000,00	1.119,30	45.117.000,00	1.264,60	114.354.500,00	1.897,30	75.899.500,00
Kabupaten Sigi	46,20	79.053,00	150,20	257.008,00	135,00	231.000,00	359,70	529.000,00
Total	177.352,80	3.793.937.441,20	207.940,50	4.566.227.302,27	224.313,29	5.813.577.069,93	373.509,36	8.140.993.918,90

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, 2024.

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya sebanyak 248.496,11 ton dengan nilai produksi Rp.3.714.465.950,- meningkat menjadi 763.520,32 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.9.758.863.654.000,- pada tahun 2023, atau terjadi peningkatan produksi sebesar 9,65 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya dilihat dari sebaran produksi perikanan budidaya pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan produksi mencapai 631.354,15 ton (82,69 persen) dan nilai produksi mencapai Rp.7.010.181.520,000,-, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Morowali dengan produksi sebanyak 34.291,30 ton dan nilai produksi sebesar Rp.191.286.000.000,- (4,49 persen), dan Kabupaten Parigi Moutong dengan produksi sebanyak 24.378,23 ton dan nilai produksi sebesar Rp.762.361.626.000,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023

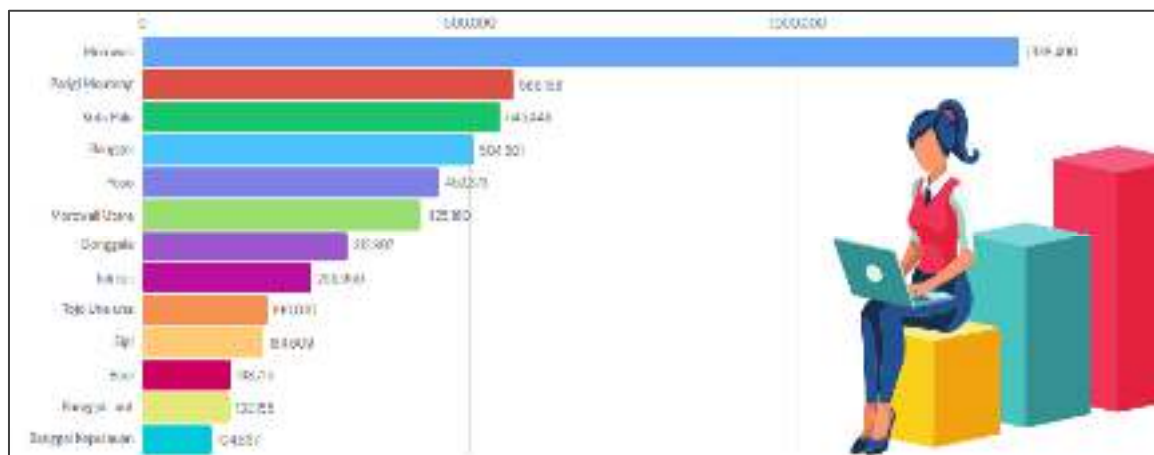
Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp1.000)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	692.271,82	1.855.057.648,00	569.925,00	2.724.214.000,00	562.747,81	5.645.516.784,40	631.354,15	7.010.181.520,00
KABUPATEN BANGGAI	3.296,39	40.798.019,00	4.328,43	51.655.585,00	3.002,82	301.246.820,00	623,88	97.054.480,00
KABUPATEN MOROWALI	186.525,00	351.759.200,00	71.600,67	151.749.500,00	48.174,60	312.570.525,00	34.291,30	191.286.000,00
KABUPATEN POSO	3.320,22	68.415.238,00	3.777,81	77.724.306,00	4.118,35	95.015.509,00	4.496,38	93.817.871,00
KABUPATEN DONGGALA	17.585,00	719.899.000,00	20.344,00	928.760.000,00	20.551,00	1.891.152.000,00	21.778,00	1.142.704.000,00
KABUPATEN TOLI TOLI	1.145,09	33.525.125,00	591,02	18.695.660,00	919,58	115.251.965,00	1.565,75	117.290.290,00
KABUPATEN BUOL	1.174,36	27.093.510,00	227,69	9.619.450,00	710,33	52.104.610,00	716,74	32.151.205,00
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	22.386,96	487.397.659,50	26.510,74	976.732.250,00	14.796,60	616.255.907,00	24.378,23	762.361.626,00
KABUPATEN TOJO UNA-UNA	7.298,80	22.298.640,00	2.643,03	23.191.275,00	7.873,38	72.990.790,00	8.226,39	57.060.950,00
KABUPATEN SIGI	632,80	22.534.500,00	616,67	24.648.790,00	767,32	31.865.747,00	899,47	36.149.100,00
KOTA PALU	121,81	4.022.888,00	123,60	3.622.000,00	124,35	3.844.385,00	124,75	3.696.250,00
KABUPATEN BANGGAI LAUT	2.504,84	63.080.803,50	28.831,50	130.061.362,00	29.039,43	73.782.550,00	29.707,63	75.470.850,00
KABUPATEN MOROWALI UTARA	2.504,84	18.583.719,00	2.446,43	26.618.388,00	3.503,03	140.663.910,00	5.357,66	139.639.512,00
TOTAL	940.767,93	3.714.465.950,00	731.966,58	5.147.292.566,00	696.328,60	9.352.261.502,40	763.520,32	9.758.863.654,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, 2024.

(5) Potensi Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,47 persen pada tahun 2023.

Jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebanyak 5.148.361 Kunjungan. Jumlah kunjungan terbanyak berada di Kabupaten Morowali dengan jumlah kunjungan 1,338,490 kemudian Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kunjungan 566,158 kunjungan. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan kunjungan terkecil yaitu sebanyak 104,837 kunjungan.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng, 2024

Gambar 2.41

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pasca pandemi Covid-19 Kunjungan Wisatawan Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkat, di tahun 2021 - 2022 kunjungan wisatawan naik 137,89% Kunjungan dan di tahun 2022 - 2023 naik mencapai 289,66% Kunjungan.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng, 2024

Gambar 2.42
Rata-Rata Kenaikan Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021 - 2023

Selanjutnya, beberapa Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:

- a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;

- c.** Kabupaten Donggala dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- d.** Kabupaten Morowali – Morowali Utara dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;
- e.** Kabupaten Parigi Moutong dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- f.** Kabupaten Poso dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;

- g.** Kabupaten Tolitoli dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- h.** Kabupaten Tojo Una-una dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakko, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;
- i.** Kabupaten Banggai dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- j.** Kota Palu dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.
- k.** Kabupaten Sigi dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandiaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah.

(6) Potensi Pertambangan

Sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalan telah memberikan andil cukup besar dalam mendorong perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya nikel. Wilayah Sulawesi Tengah kaya akan nikel dan menjadi salah satu penggerak utama ekspor serta ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor pertambangan dan Penggalan berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar 15,30 persen.

Potensi Mineral yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah yaitu nikel dengan luas areal bahan galian mencapai 322.200 Ha dengan besar cadangan diperkirakan mencapai 8.000.000 WMT. Cadangan Infered Imonit 14.062,20 juta ton, gelena potensi cadangan sebesar 100.000.000 ton, Emas 16.000.000 ton, Molibdenum 100 juta ton, Granit potensi cadangan terukur berdasarkan pemetaan semi mikro 1:50.000 sebesar 259.461.283.470 m³.

Potensi cadangan minyak dan gas bumi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di dua Kabupaten yaitu, di Lapangan Tiaka Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali dan Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan kapasitas 16,5-23 juta barel per tahun dan potensi gas bumi terdapat di Dongi Senoro Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan kapasitas 1,6 triliun kaki kubik.

Potensi cadangan emas yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu

- Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha;
- Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha;
- Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha;
- Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha; dan

- Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
I.	Batuan Ornamen/poles		
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
II.	Batuan Bahan Konstruksi		
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri daribatuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro,Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit,juga dari Breksi dan KonglomeratDi Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulauan keKalimantan Timur.
III.	Mineral Non Logam lainnya		
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, BanggaiKepulauan mempunyai potensiBahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan danAMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan

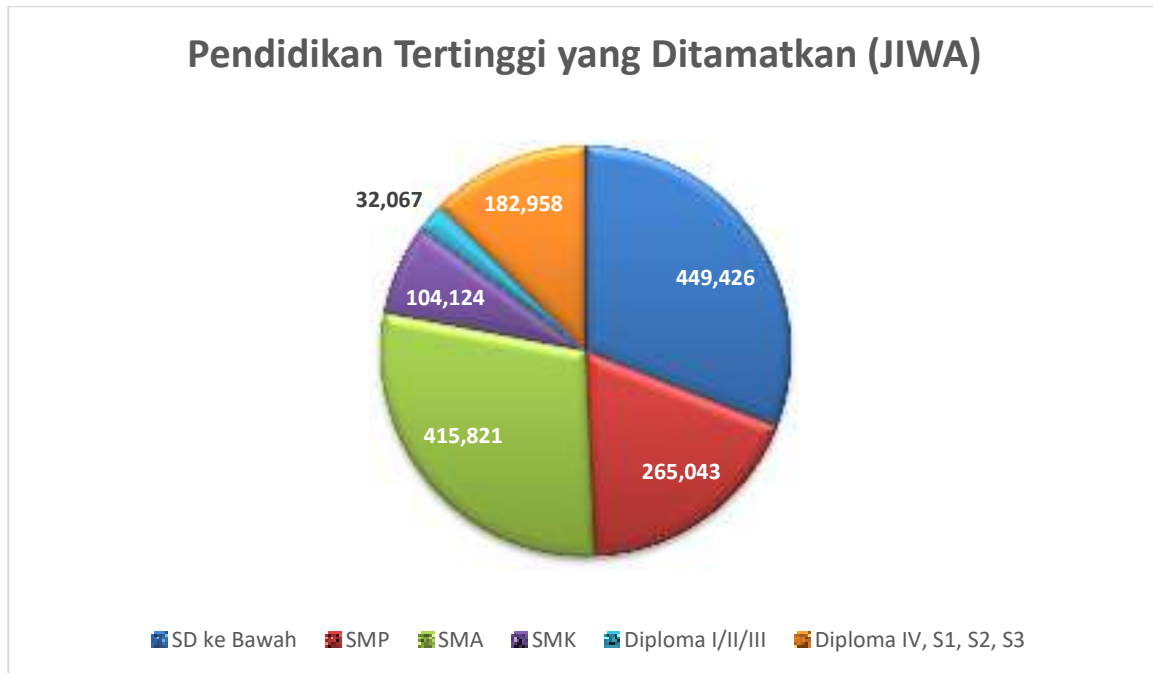
No.	Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
			dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO ₃ kurang dari 75 %
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan Ultrabasa Pertanian (Kaptan), Kadar Mg 03
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur (Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng, 2023.

2.3.2 Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Penduduk dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Struktur penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 449.426 orang, selanjutnya disusul secara hirarki yaitu penduduk dengan tingkat pendidikan 415.821 orang, pendidikan SMP sebanyak 265.043 orang, pendidikan Diploma IV/S1/S2/S3 sebanyak 182.958 orang, pendidikan SMK sebanyak 104.124 orang, dan Diploma I/II/III sebanyak 32.067 orang. Secara rinci mengenai struktur penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.43
Jumlah Penduduk dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023

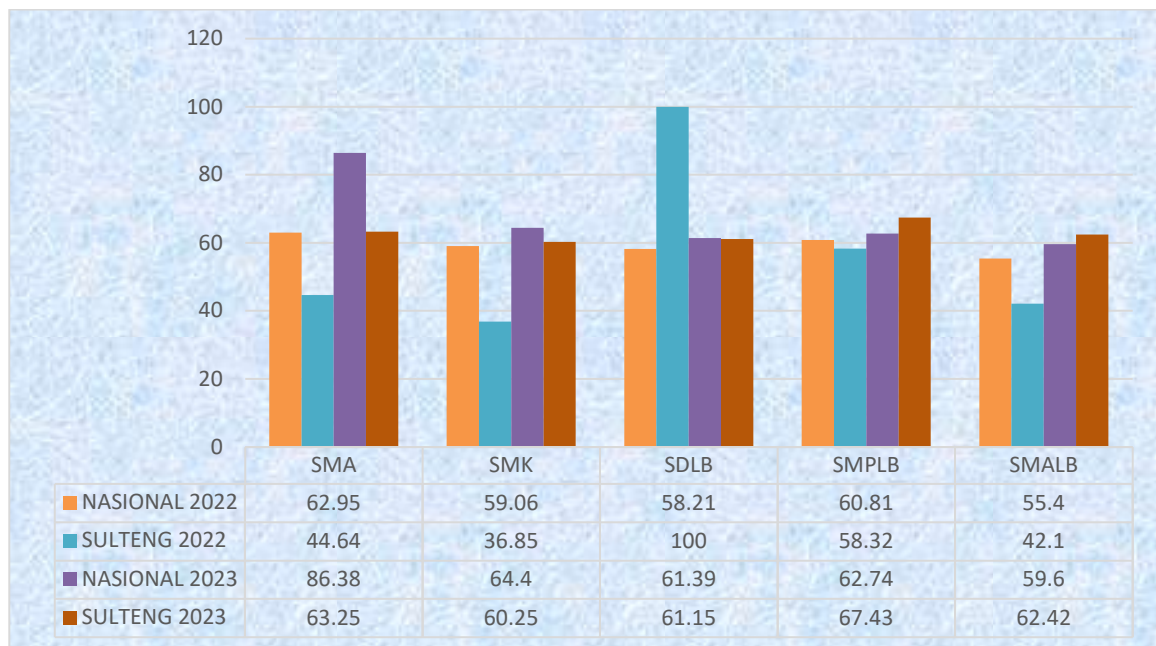
B. Angka Literasi/Numerasi

1. Angka Literasi

Literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Kemampuan Literasi Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat pendidikan dasar dan menengah masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Pada tingkat SMALB Tahun 2022 sebesar 55,40 persen dan meningkat pada Tahun 2023 mencapai 59,60 persen, SMA Tahun 2022 sebesar 62,95 persen, dan meningkat pada Tahun 2023 mencapai 68,38 persen, selanjutnya tingkat SMK pada Tahun 2022 sebesar 59,06 persen, dan meningkat pada Tahun 2023 mencapai 64,40 persen, dan angka ini pada tahun 2023 masih berada di bawah nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, program yang akan dilakukan berdasarkan Rapor Pendidikan adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pemenuhan sarana prasarana termasuk didalamnya adalah

perpustakaan sekolah dan ketersediaan buku diperpustakaan dan memaksimalkan dana BOS sebanyak 5 (lima) persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Perpustakaan. Berikut Angka Literasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2022 dan Tahun 2023.



Sumber: Laporan Rapor Pendidikan Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

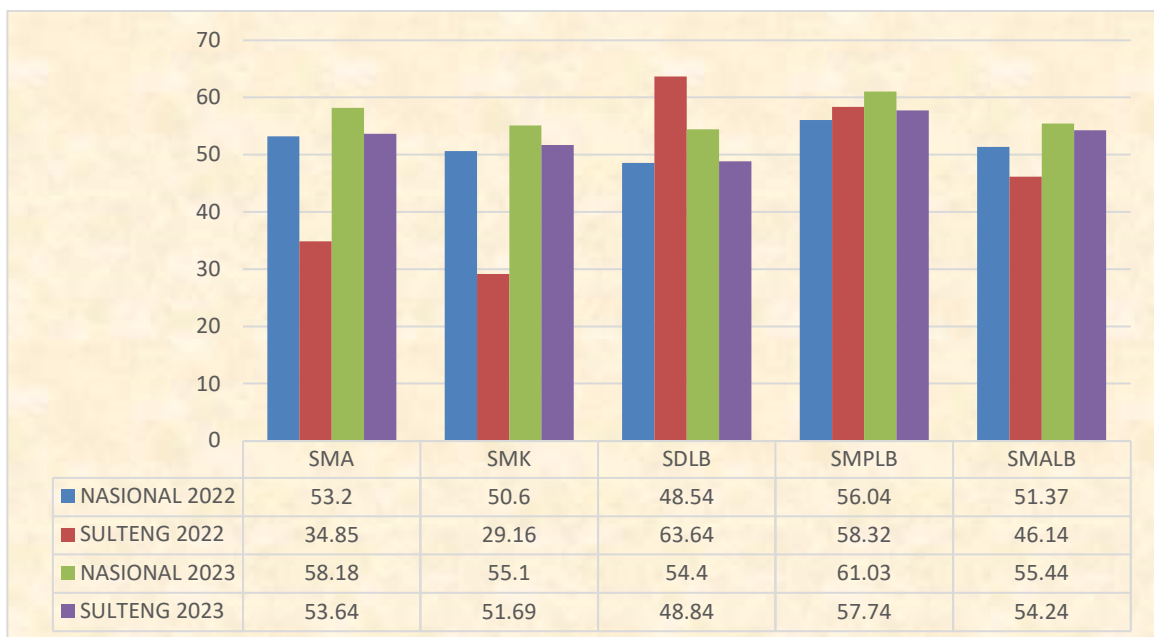
Gambar 2.44
Angka Kemampuan Literasi Sulawesi Tengah

2. Angka Numerasi

Literasi Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Literasi numerasi juga digunakan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan dan pemanfaatan interpretasi hasil analisis sebagai bahan prediksi dan pengambilan keputusan.

Seperti halnya kemampuan literasi, kemampuan numerasi juga angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tingkat SMA Tahun 2022 sebesar 53,2 persen dan meningkat menjadi 53,64 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tingkat SMK, sebesar 50,6 persen, meningkat menjadi 55,10 persen pada Tahun 2023. Pada tingkat SDLB pada Tahun 2022 sebesar 48,54, meningkat menjadi 54,40 pada tahun 2023. Tingkat SMPLB, pada

Tahun 2022 sebesar 56,04 persen dan meningkat pada Tahun 2023 mencapai 61,03 persen. Tingkat SMALB pada Tahun 2022 sebesar 51,37 persen dan meningkat mencapai 51,37 persen pada Tahun 2023. Angka Numerasi ini walaupun mengalami peningkatan, tapi masih berada dibawah rata-rata nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, program yang akan dilakukan berdasarkan Rapor Pendidikan adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pemenuhan sarana prasarana termasuk didalamnya adalah perpustakaan sekolah dan ketersediaan buku di perpustakaan dan memaksimalkan dana BOS sebanyak 5 (lima) persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Perpustakaan. Angka kemampuan numerasi Sulawesi Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.



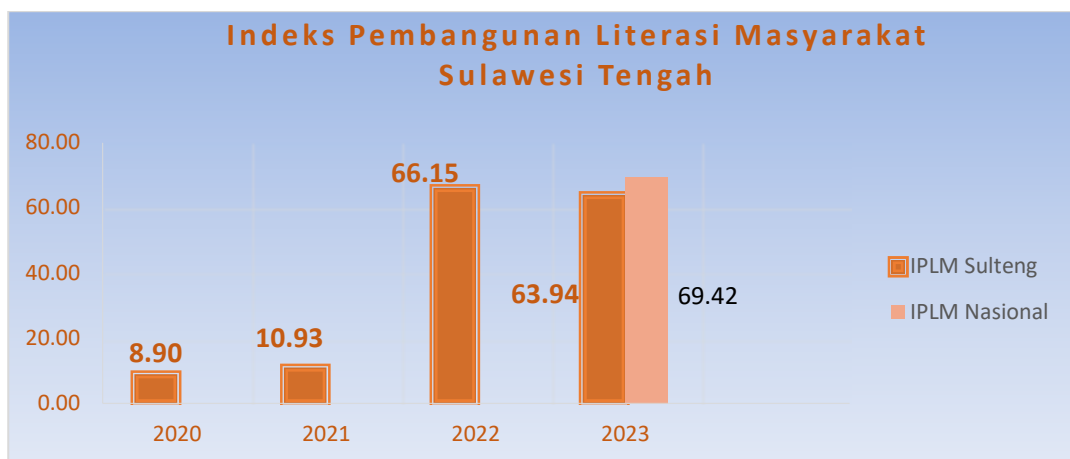
Sumber: Laporan Rapor Pendidikan Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.45
Angka Numerasi Sulawesi Tengah

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai

wahana belajar sepanjang hayat. Pencapaian nilai IPLM Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami peningkatan yakni dari 8,9 poin pada Tahun 2020 meningkat menjadi 10,93 poin pada Tahun 2021, selanjutnya pada Tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 67,96 poin, dan capaian ini masuk ke dalam kategori Sedang. Namun pada Tahun 2023, menurun menjadi 63,94 poin karena terdapat perbedaan rumus perhitungan. IPLM pada tingkat nasional Tahun 2023 sebesar 69,42 persen sehingga angka IPLM Sulawesi Tengah masih berada dibawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPLM maka strategi yang dilakukan kedepan yaitu meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan meningkatkan jumlah koleksi bacaan di perpustakaan termasuk juga pembuatan perpustakaan digital. Berikut Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sulawesi Tengah Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Perpunas, Kajian IPLM Tahun 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.46

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023

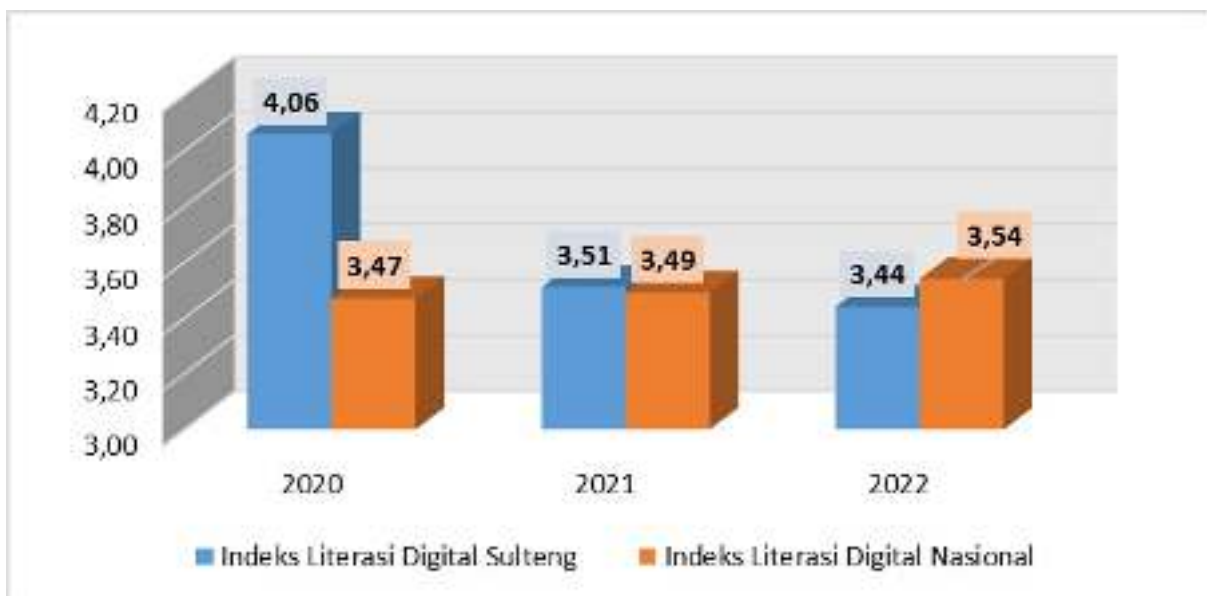
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diukur dengan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yang terdiri dari 7 komponen yaitu sebagai berikut.

1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1);
2. Perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (UPLM2);
3. Ketercukupan koleksi (UPLM3);
4. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM4);

5. Tingkat kunjungan masyarakat/hari (UPLM5);
6. Anggota perpustakaan (UPLM6); dan
7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM7).

D. Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tengah

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu pada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kemenkominfo, Januari 2021), dengan empat pilar pengukuran literasi digital yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Berikut gambar perbandingan Indeks Literasi Digital Sulawesi Tengah dan Nasional periode 2020-2022:



Sumber: Kemenkominfo, 2022 (data diolah kembali)

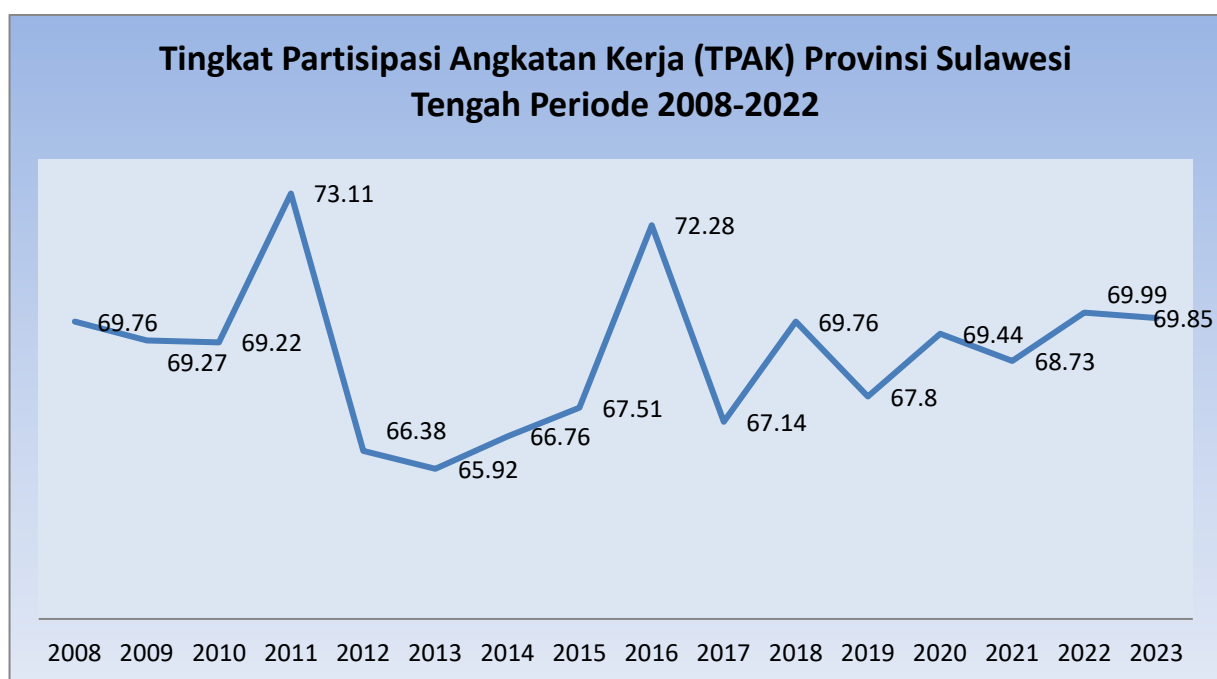
Gambar 2.47
Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2022

Indeks Literasi Digital Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah sebesar 4,06 indeks berada di atas Nasional sebesar 3,47. Pada tahun 2021 indeks literasi digital Sulawesi Tengah menurun menjadi 3,51 indeks dan masih berada di atas nasional sebesar 3,49. Tahun 2022 indeks literasi Sulawesi Tengah Kembali menurun sebesar 3,44 indeks dan berada di bawah nasional sebesar 3,54 indeks.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 69,85 persen.

TPAK Sulawesi Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif pada periode Tahun 2008 hingga Tahun 2022, yang dapat dilihat pada tabel berikut.



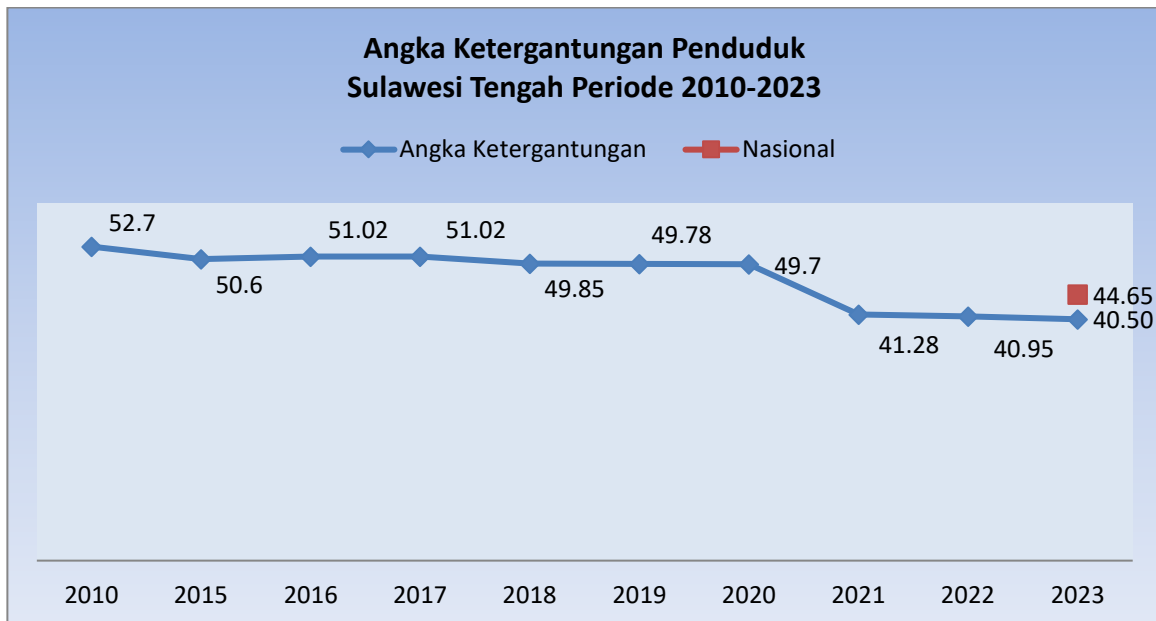
Sumber : BPS (data diolah kembali)

Gambar 2.48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2008-2022

F. Angka Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator Dependency Ratio atau Rasio Ketergantungan. Persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

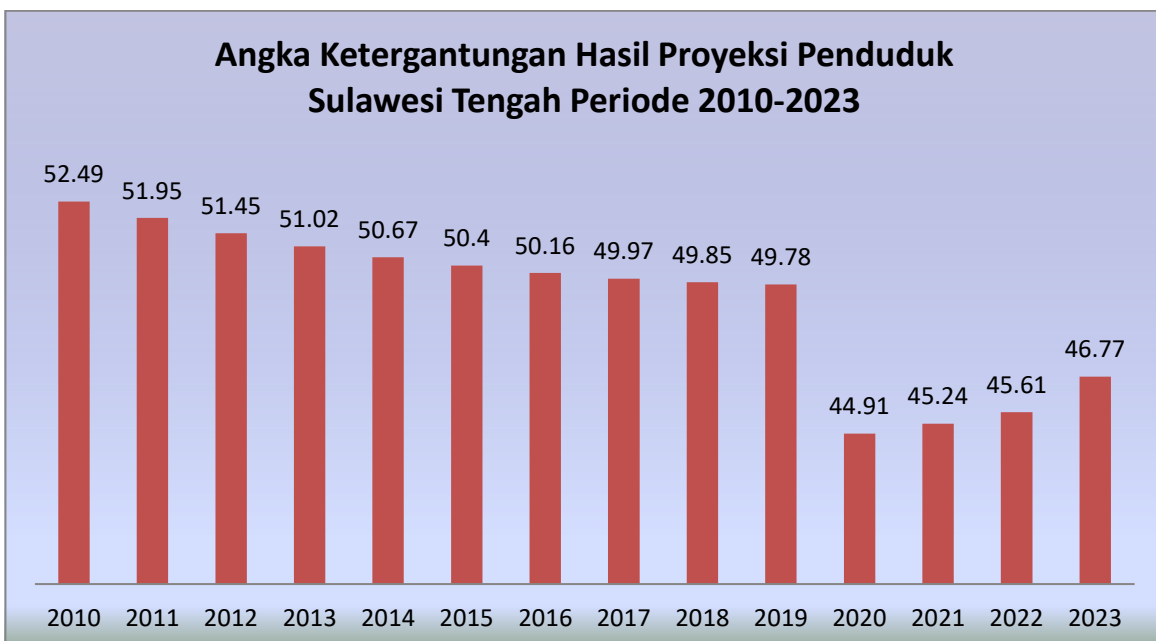
Angka ketergantungan penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2010-2023 diproyeksikan menurun. Pada Tahun 2020 angka ketergantungan Sulawesi Tengah mencapai angka 49,7 persen.



Sumber: BPS (data diolah kembali)

Gambar 2.49
Angka Ketergantungan Penduduk Sulawesi Tengah Periode 2010-2023

Selanjutnya, Angka Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 46,77 persen. Lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS (data diolah kembali)

Gambar 2.50
Angka Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Sulawesi Tengah Periode 2010-2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Infrastruktur Jalan

Pembangunan bidang infrastruktur jalan khususnya kewenangan provinsi berdasarkan kondisi jalan di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan. Panjang jalan Provinsi mencapai 1.643,74 km, sedangkan panjang jalan kewenangan pusat sepanjang 2.373,40 km, serta kewenangan Kabupaten dan Kota sepanjang 12.890,60 km.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.51
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Persen)

Capaian Indikator persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Capaian ini dihitung berdasarkan kemantapan seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah, yaitu persentase seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah.

Kondisi kemantapan jalan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang berstatus mantap sebesar 65,04 persen. Sementara itu, kondisi jalan provinsi yang berstatus tidak mantap sebesar 34,96 persen. Sementara

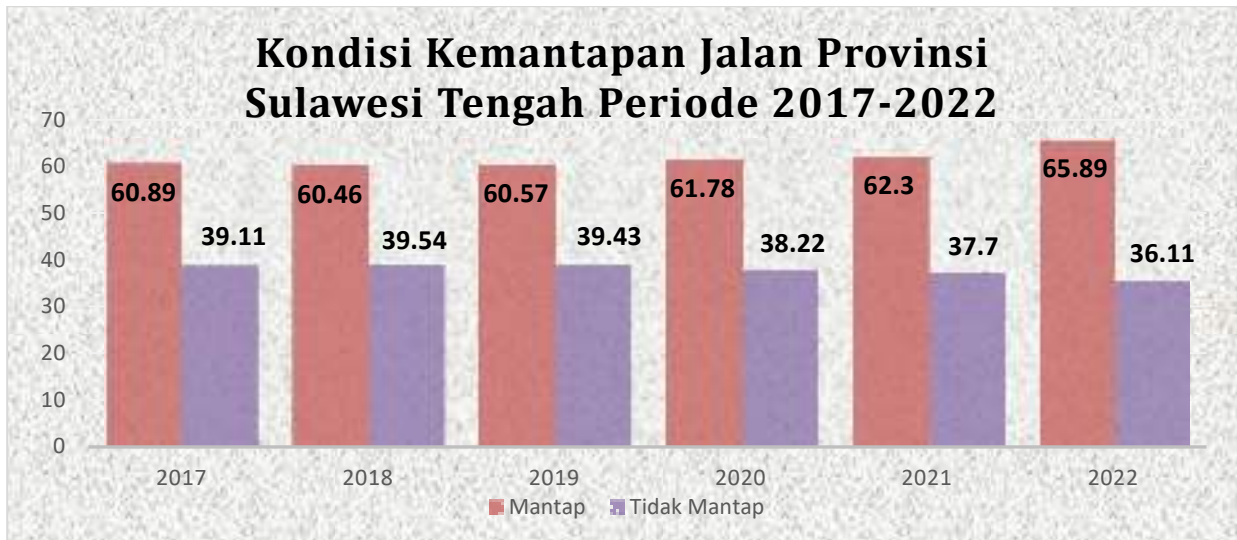
itu, kondisi jalan nasional yang berstatus tidak mantap pada Tahun 2023 sebesar 3,31 persen dan Kondisi Mantap sebesar 96,69 persen. Hal ini membuktikan bahwa kondisi kemantapan jalan nasional Sulawesi Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jalan Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Kabupaten.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.52
Kondisi Kemantapan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Periode 2017-2022

Sementara itu, kondisi kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Tengah yang berstatus mantap dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan dari yang awalnya berjumlah 62,3 persen naik menjadi 65,89 persen. Sedangkan untuk jalan provinsi yang berstatus tidak mantap mengalami penurunan pada tahun 2021 yang awalnya 37,7 persen menjadi 36,11 persen pada tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa kondisi kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan.



Sumber : BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.53
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Periode 2017-2022

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kondisi jalan tersebut, juga diikuti perkembangan moda transportasi. Jumlah moda transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 1.141.577 kendaraan dengan rincian mobil penumpang sebanyak 82.901 unit, mobil bus sebanyak 912 unit, mobil barang sebanyak 46.745 unit, dan sepeda motor sebanyak 1.011.019 unit. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan hingga menjadi 1.263.230 unit dengan rincian mobil penumpang sebanyak 678.620 unit, mobil bus sebanyak 1.695 unit, mobil barang sebanyak 32.375 unit, dan sepeda motor sebanyak 1.161.230 unit.

Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 (unit)

Tahun	Mobil Penumpang	Mobil bus	Mobil barang	Sepeda Motor	Jumlah
2019	82.901	912	46.745	1.011.019	1.141.577
2020	83.966	917	47.260	1.024.025	1.156.168
2021	94.317	952	50.638	1.099.210	1.245.105
2022	103.002	941	55.843	1.196.781	1.356.567
2023	678.620	1.695	32.375	1.161.300	1.263.230

Sumber: BPS, 2024

Selanjutnya, perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2019 sebanyak 1.603 kasus menurun menjadi 1.042 kasus pada tahun 2020, pada tahun 2021 berkurang menjadi 974 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 jumlah kecelakaan meningkat menjadi 1.144 kasus dan meningkat menjadi 1.162 kasus pada tahun 2023. Secara rinci mengenai perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas dan banyaknya Korban di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Perkembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Banyaknya Korban
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Banyaknya Korban (jiwa)		
		Mati	Luka Berat	Luka Ringan
2019	1.603	403	882	1.669
2020	1.042	329	490	162
2021	974	317	472	1.001
2022	1.144	360	430	1.383
2023	1.162	370	459	1.346

Sumber: BPS, 2024

B. Kemantapan Irigasi Sulawesi Tengah

Pembangunan infrastruktur bidang irigasi yang selama ini telah dilaksanakan tidak akan dapat bertahan lama, tanpa didukung kegiatan pemeliharaan yang berkesinambungan. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Secara umum pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi (Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015).

Pemeliharaan jaringan irigasi telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan

mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan Irigasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para petani dan masyarakat yang membutuhkan air, melalui jaringan irigasi dan bangunan air yang telah ada, agar tercipta kesetimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air yang dibutuhkan untuk mencukupi semua keperluan masyarakat terutama petani.

Selanjutnya, perkembangan kondisi kinerja pemeliharaan irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari kondisi kemantapan irigasi selamat tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas CIKASDA, 2024 (data diolah kembali).

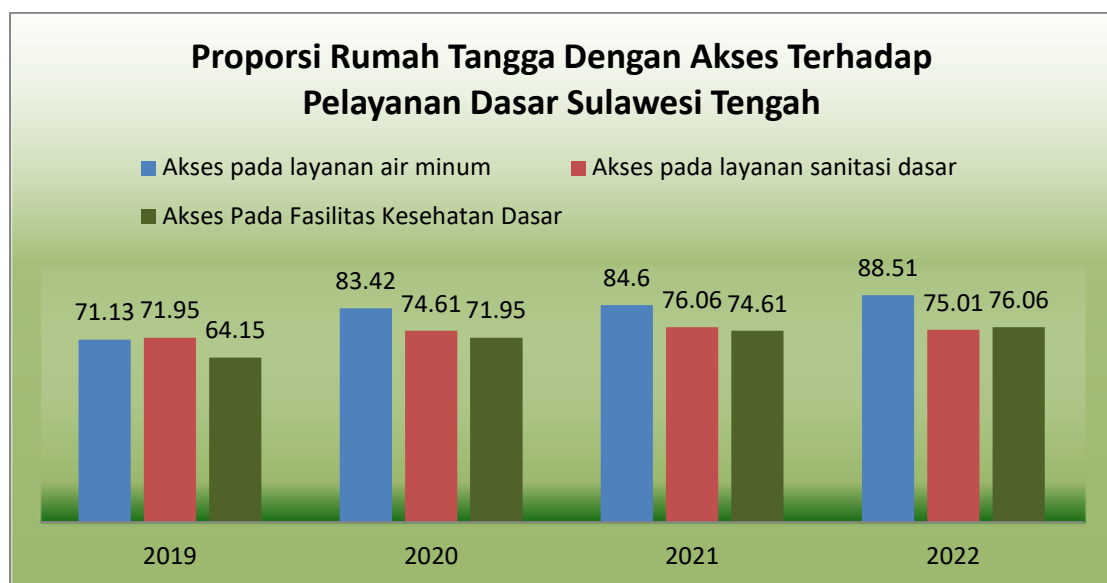
Gambar 2.54

Kondisi Kemantapan Irigasi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023 (Persen)

Pada gambar diatas memperlihatkan bahwa kondisi kemantapan irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan konjungtur, yakni pada tahun 2020 kondisi kemantapan irigasi mencapai 57,87 persen menurun menjadi 40,02 persen pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 kondisi kemantapan irigasi tersebut mengalami kenaikan menjadi 59,41 persen, dan meningkat menjadi 60,28 persen pada tahun 2023.

C. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Pelayanan Dasar

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar di Sulawesi Tengah yang diukur dengan akses pada layanan air minum, akses pada fasilitas kesehatan dasar dan akses pada layanan sanitasi dasar. Pada Tahun 2022, akses pada layanan air minum mencapai angka 88,51 persen mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, akses pada layanan sanitasi dasar Tahun 2022 yaitu 75,01 persen angka ini menurun dari Tahun 2021. Selanjutnya akses pada fasilitas kesehatan dasar pada tahun 2022 sebesar 76,06, angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.55

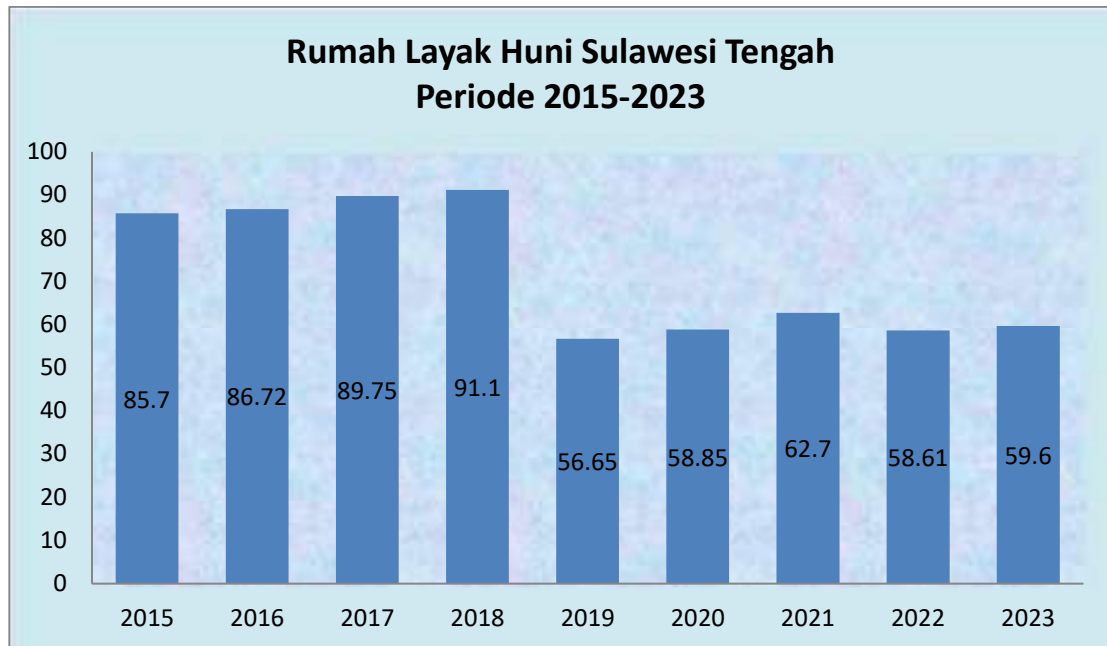
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar Sulawesi Tengah

D. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Provinsi Sulawesi Tengah

Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks pemukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs, menggunakan lima kriteria yaitu (1) Ketahanan bangunan; (2) Kecukupan luas tempat tinggal; (3) Akses air minum layak; (4) Akses sanitasi layak; dan (5) Keamanan bermukim.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 yang awalnya berjumlah 62,7 persen menjadi

58,61 persen. Selanjutnya mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 59,6 persen. Angka tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.56

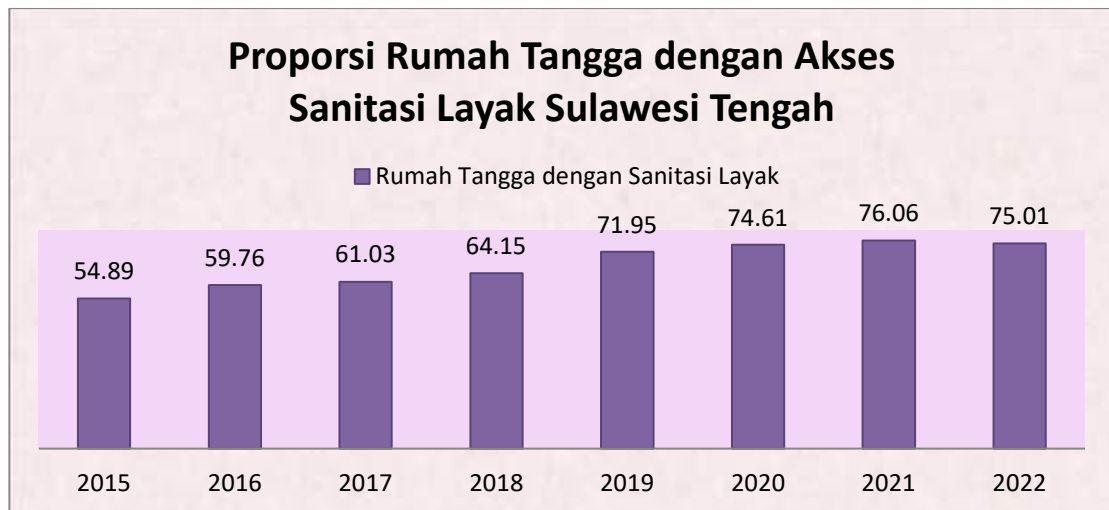
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2023

E. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Tengah

Definisi akses sanitasi layak merujuk pada definisi yang tercantum pada indikator SDGs, khususnya indikator tujuan 6 (enam) dan tujuan 11 yaitu sebagai berikut:

- Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- Tujuan 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode Tahun 2015-2021. Sementara itu, pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari angka semula pada Tahun 2021 yaitu 76,6 persen menjadi 75,01 persen.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.57

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2022

F. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Sulawesi Tengah Tahun 2011-2022

Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN setiap tahunnya bertambah. Persentase peningkatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



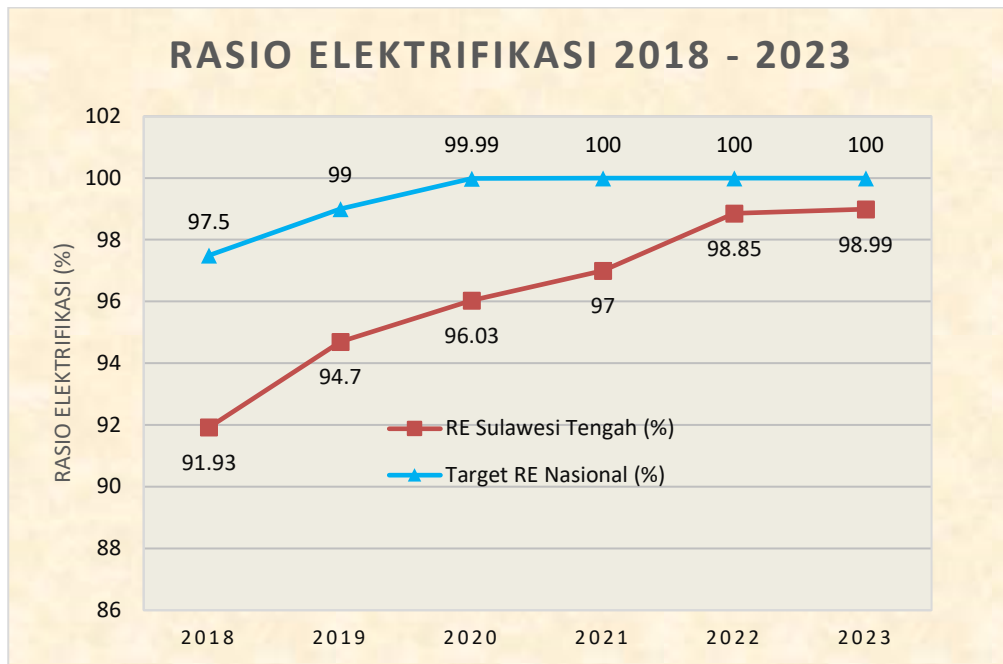
Sumber : BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.58

Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN di Sulawesi Tengah Periode 2011-2022

G. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi Sulawesi Tengah semakin tahun semakin meningkat, bahkan mendekati angka target capaian rasio elektrifikasi nasional. Target capaian rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah pada tahun berikutnya diharapkan mampu mencapai target Nasional. Pada Tahun 2022, rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah berada di angka 98,85 persen.

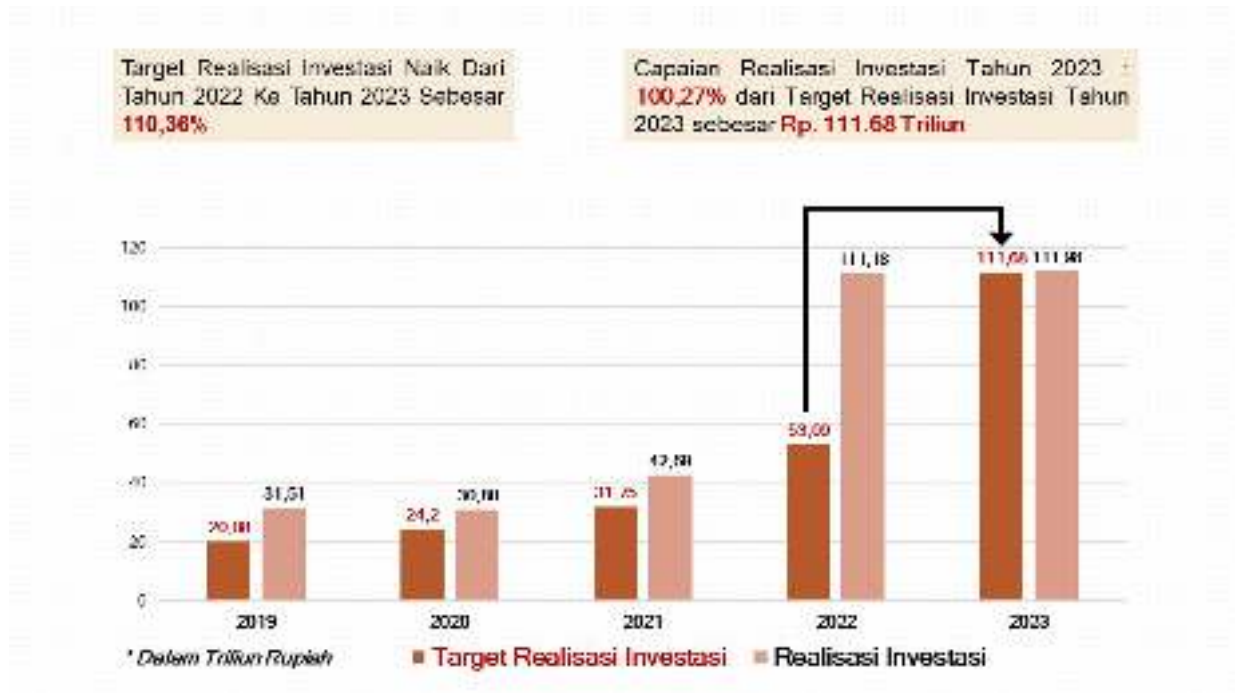


Sumber : BPS, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.59
Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2023

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kemudahan dalam iklim investasi serta memberikan keamanan dan ketertiban daerah agar pelaku usaha dapat berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk capaian realisasi investasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulteng, 2024

Gambar 2.60

Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2023

A. Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009-2020 terdiri dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.



Sumber : BPS, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.61

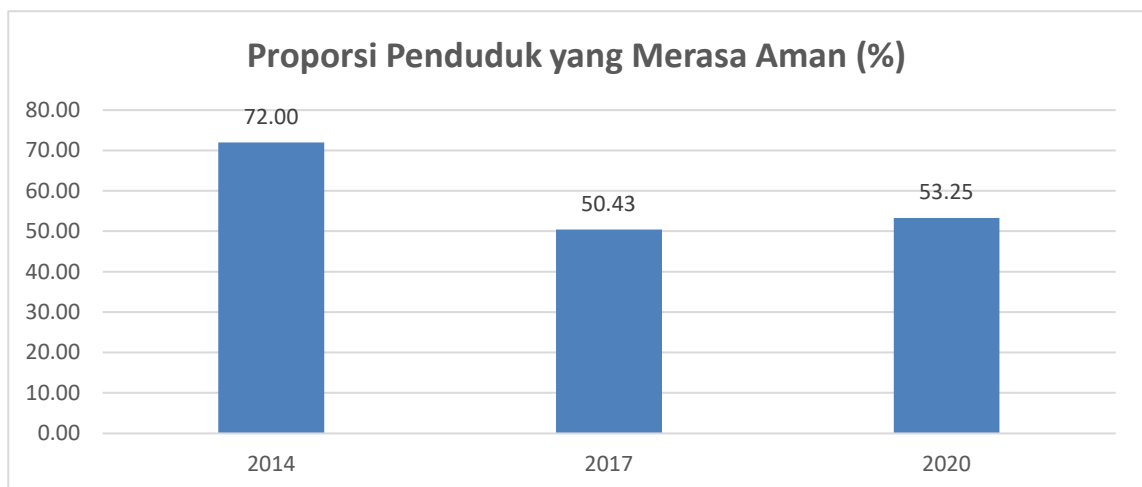
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2009-2022

Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah pada Tahun 2009 sebesar 66,02 persen, dan mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif hingga pada Tahun 2020 mencapai angka 75,85 persen. Sementara, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022 menggunakan metode pengukuran baru yang terdiri dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara Nasional Tahun 2022, Sulawesi Tengah mencapai nilai sebesar 80,92 poin atau mengalami kenaikan sebesar 2,97 poin bila dibandingkan dengan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar 77,95. Nilai demokrasi Tahun 2022 merupakan nilai tertinggi Sulawesi Tengah yang mencapai Rangking ke-9 (sembilan) dari 34 Provinsi di Indonesia. Dengan demikian, secara umum tingkat capaian Indeks Demokrasi di Sulawesi Tengah masuk kategori “Baik”.

B. Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Untuk indeks rasa aman Provinsi Sulawesi Tengah diukur melalui proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Untuk proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Susenas Modul Hansos, 2020

Gambar 2.62

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya

C. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk dapat beraktivitas dengan baik dan lancar setiap hari. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mutu pelayanan dasar trantibum meliputi: standar operasional prosedur Satpol PP, standar sarana prasarana Satpol PP, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada meliputi pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan. Penerima layanan dasar SPM Trantibum

Penerima layanan dasar trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda provinsi dan kabupaten/kota serta perkada, dengan kriteria: yang mengalami kerugian materil dan atau cedera fisik akibat penegakan perda dan

perkada dan atau berada pada jarak antara nol sampai dengan 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada.

Dalam hal terdapat warga negara terkena dampak kerugian materil akibat penegakan perda dan perkada, maka Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak. Jika terdapat warga negara terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada, maka Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama dan jika kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut maka Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum pemerintah daerah. Berikut ini adalah indikator layanan terkait ketentraman dan ketertiban umum :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) pada tahun 2021 sampai 2023 mencapai angka 100 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut:

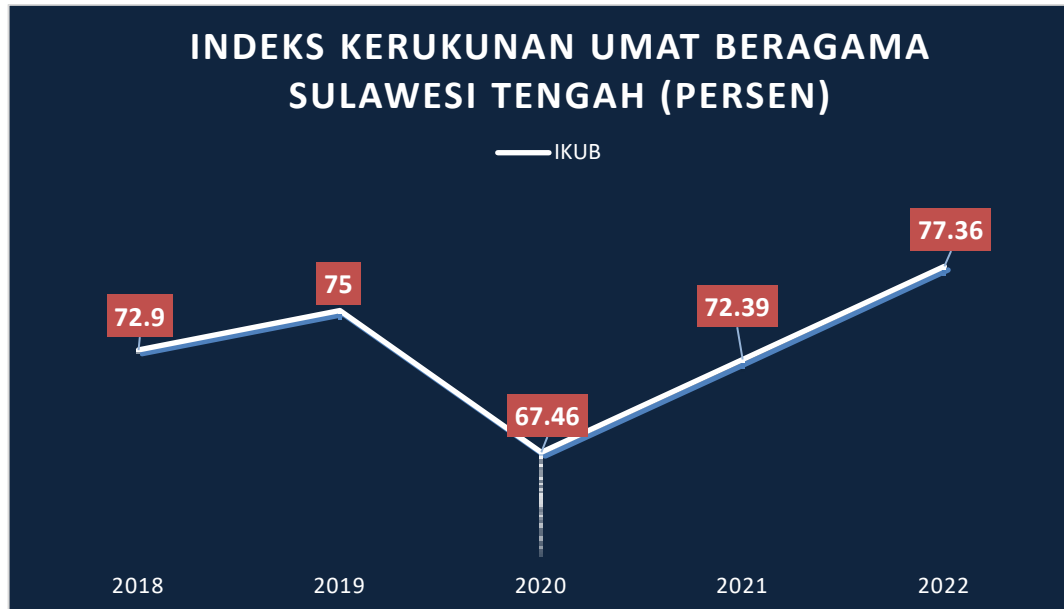
Tabel 2.27
Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		
	2021	2022
Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat		
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100%	100%

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

D. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pengukuran Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama diukur menggunakan 3 (tiga) variabel utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.



Sumber : Kementerian Agama RI, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.63

Indeks Kerukunan Umat Beragama Periode 2018-2022

Pada Tahun 2019, KUB Sulawesi Tengah diskoring sebesar 75,00 dan berada pada posisi keduabelas secara nasional. Hal itu sesuai rilis Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan Tahun 2021, posisi KUB Sulawesi Tengah tidak masuk 10 besar. Pada Tahun 2022 Sulawesi Tengah baru masuk 10 besar dengan urutan ke sembilan, dengan nilai skoring 77,36. Peningkatan indeks kerukunan umat beragama tersebut membuktikan peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Indeks Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022 yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Perekembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan, yakni dari 2,41 pada Tahun 2020 meningkat menjadi 3,23 pada Tahun 2022.



Sumber: BRIDA, Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2022 (data diolah kembali)

Gambar 2.64

Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2022



Sumber: BRIDA, Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2022.

Gambar 2.65

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022 (BRIN, 2022), komponen pilar yang unggul di Provinsi Sulawesi Tengah adalah pilar

11 “Dinamisme Bisnis”, sementara komponen pilar yang terendah yaitu pilar 10 “Ukuran Pasar”.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan yakni dari 62,15 menjadi 63,56.



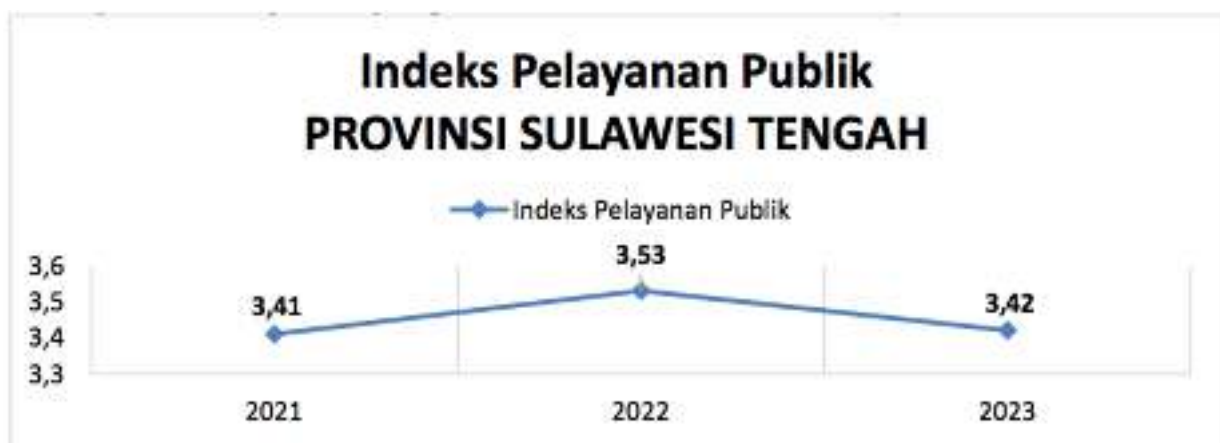
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2023

Gambar 2.66
Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020 – 2022

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan warganya hingga transparansi

dalam penyelenggaraan layanan publik. Indeks pelayanan publik dapat mencakup parameter-parameter seperti kecepatan dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan yang diberikan. Tingginya indeks pelayanan publik biasanya mencerminkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang responsif, transparan dan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi biasanya akan mendapatkan indeks pelayanan publik yang tinggi pula. Sebaliknya, jika terdapat hambatan atau ketidakmampuan dalam menyediakan layanan yang memadai, indeks tersebut dapat menurun.



Sumber: Biro Organisasi, 2023 (data diolah kembali)

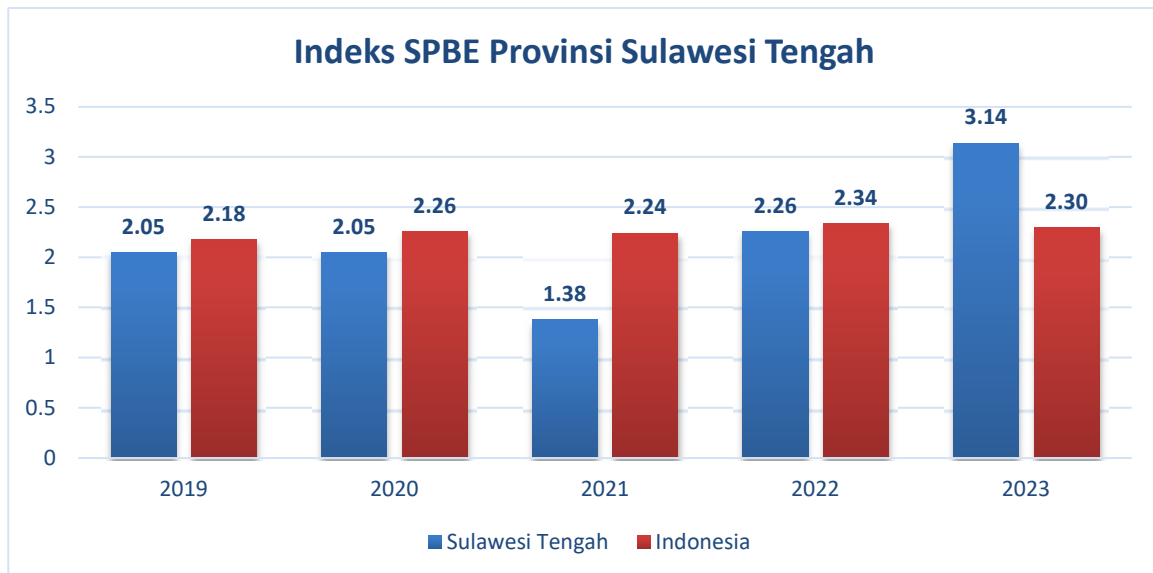
Gambar 2.67
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2023

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan di Tahun 2022 sebesar 3,53 poin namun, mengalami penurunan kembali pada Tahun 2023 sebesar 3,42 poin dengan kategori “B -“ (Baik dengan catatan). Penurunan ini disebabkan karena perbedaan OPD lokus evaluasi di tahun 2023.

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, terutama dalam hal komunikasi dan informatika, pemerintah daerah perlu mengadopsi digitalisasi untuk memastikan bahwa kinerja instansi pemerintahan bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini melibatkan pembangunan sistem pengawasan yang

profesional, independen, dan berintegritas, serta upaya menuju pelayanan publik yang bersih dan peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Penggunaan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjadi alat pengukuran efektivitas upaya pemerintah dalam mencapai tingkat digitalisasi yang optimal.



Sumber: KemenpanRB, 2024 (data diolah kembali)

Gambar 2.68

Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019 – 2023

Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB tentang Evaluasi SPBE di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2019 sampai dengan pada Tahun 2023 mengalami fluktuatif yakni sebelumnya yaitu sebesar 2,05 tahun 2019 dan tahun 2020, menurun menjadi 1,38 pada tahun 2021, dan meningkat 2,26 pada tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 3,14 dengan predikat "Baik".

D. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan alat evaluasi penting yang memberikan gambaran holistik tentang kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi. Selain itu, inovasi daerah juga memberikan pandangan yang mendalam tentang tingkat kesiapan dan performa inovatif suatu daerah. Daerah yang memiliki indeks Inovasi yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang

inovatif, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Ini memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2020 hingga 2022 meningkat dari predikat Kurang Inovatif menjadi Inovatif, namun apabila melihat skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuatif yakni Tahun 2020 sebesar 32,43 meningkat menjadi 49,57 pada Tahun 2021, dan selanjutnya menurun menjadi 45,55 pada Tahun 2022. Secara rinci mengenai perkembangan IID Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2020-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.69
Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2022

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan

Sulawesi Tengah telah mencapai perkembangan positif dalam berbagai sektor pembangunan selama dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Kemajuan pembangunan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara

merata di seluruh penduduk, dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek pembangunan. Kelestarian lingkungan juga tetap menjadi fokus, dijaga untuk menjamin kelangsungan pembangunan. Proses demokratisasi dan reformasi kelembagaan telah mencapai kemajuan yang signifikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun secara langsung, bebas, dan adil. Selain itu, penerapan desentralisasi secara masif ke tingkat kabupaten/kota telah menjadi bagian integral dari upaya pembangunan tersebut.

Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mencapai status sebagai daerah yang maju. Hingga saat ini, optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya sebagai negara kepulauan yang besar, belum sepenuhnya terwujud. Terdapat potensi besar dari sumber daya maritim yang masih perlu dioptimalkan. Penyelesaian berbagai masalah pembangunan juga tetap menjadi fokus utama, dan sektor produktif, yang menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menunjukkan peningkatan produktivitas. Meskipun Provinsi Sulawesi Tengah mulai menarik minat investor, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan riset dan inovasi, serta kapasitas infrastruktur masih menjadi kendala.

Selain itu, tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, baik dari segi individu maupun wilayah, masih cukup tinggi. Hal ini berdampak pada ketahanan sosial budaya dan ekologi penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, serta menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan terus-menerus pada proses demokrasi dan penegakan hukum yang adil diperlukan agar Sulawesi Tengah dapat terus berkembang sebagai daerah yang demokratis dan adil.

Tabel 2.28
Perbandingan Capaian Indikator Makro Provinsi dan Nasional
Tahun 2005 dan Tahun 2022

Provinsi	LPE		TPT		IPM		GINI RASIO		KEMISKINAN		PDRB PERKAPITA	
	2005	2022	2005	2022	2005	2022	2011	2022	2012	2022	2005	2022
NASIONAL	5,37	5,31	11,24	5,85	69,57	72,91	0,388	0,381	11,66	9,57	7.006	42.464
ACEH	10,12	8,21	16	6,37	69,09	72,1	0,174	0,291	10,19	6,92	5.058	40.062
SUMATERA UTARA	5,48	5,73	11,39	6,39	72,03	72,73	0,305	0,325	10,41	8,33	7.070	37.348
SUMATERA BARAT	5,71	6,11	11,36	6,39	71,19	73,25	0,115	0,293	8	5,04	10.883	11.338
RIAU	3,43	4,53	12,18	4,37	73,63	73,51	0,324	0,323	8,05	5,84	7.166	80.058
LAMPUNG	5,57	6,33	10,74	4,59	70,95	72,27	0,148	0,335	8,28	7,2	6.025	44.336
SUMATERA SELATAN	4,84	5,23	10,81	4,61	70,71	70,9	0,41	0,31	13,45	7,99	5.315	39.375
BENGKULU	3,84	4,71	8,91	3,59	71,09	72,49	0,172	0,313	17,31	15,81	3.993	28.439
LAMPUNG	4,07	4,78	8,47	4,57	68,83	70,81	0,327	0,313	15,52	11,46	4.033	38.064
KEP. BANGKA BELITUNG	3,81	4,8	7,19	4,77	70,68	72,4	0,14	0,255	5,37	5,61	7.969	18.338
KEP. BANGKA	5,57	6,07	10	6,3	72,71	75,65	0,179	0,321	6,03	5,05	21.480	87.735
DKI JAKARTA	5,01	5,23	11,77	7,18	76,07	81,63	0,405	0,41	3,7	4,61	32.728	182.909
JAWA BARAT	5,2	5,45	11,33	6,11	69,91	73,17	0,18	0,41	0,09	7,98	1.985	11.183
JAWA TENGAH	5,31	5,31	8,54	5,57	69,78	72,73	0,357	0,365	14,29	11,98	4.389	28.382
DIYOGYAKARTA	4,99	5,38	7,99	4,06	71,5	80,68	0,433	0,499	14,98	11,44	11.188	69.881
JAWA TIMUR	5,84	5,34	8,51	5,49	68,42	72,75	0,351	0,365	13,68	13,49	7.077	42.717
BANTEN	5,85	5,78	11,699	6,31	71,4	73,32	0,324	0,377	5,71	6,24	7.227	19.115
BAU	5,56	4,88	5,32	4,8	69,78	76,44	0,387	0,367	3,95	4,53	6.237	34.181
NUSA TENGGARA BARAT	4,73	4,75	10,79	7,09	69,43	69,83	0,166	0,174	18,53	19,62	1.561	18.440
NUSA TENGGARA TIMUR	4,48	4,75	4,82	3,54	69,39	69,3	0,43	0,34	19,61	20,29	4.321	13.298
KALIMANTAN BARAT	4,75	5,07	9,12	5,11	69,4	68,83	0,363	0,311	7,96	5,81	3.541	28.278
KALIMANTAN TENGAH	5,0	4,45	4,91	4,25	71,77	71,63	0,334	0,309	6,19	5,77	5.801	38.688
KALIMANTAN SELATAN	4,86	5,13	7,34	4,74	67,84	71,87	0,353	0,305	5,01	4,81	6.811	38.038
KALIMANTAN TIMUR	5,13	5,48	11,17	5,71	72,54	72,44	0,311	0,317	6,18	6,44	14.714	131.137
KALIMANTAN UTARA	4,69	5,34	6,9	4,33	68	71,88	0,4	0,27	8,6	6,86	8,6	91.424
SULAWESI UTARA	5,23	5,42	10,92	6,61	74,31	71,81	0,354	0,350	7,64	7,34	1.993	36.386
SULAWESI TENGAH	7,57	15,17	7,71	3	69,77	70,29	0,389	0,305	14,49	12,23	4.991	56.283
SULAWESI SELATAN	6,05	5,09	15,93	4,51	69,04	72,82	0,427	0,365	9,87	8,66	3.725	49.116
SULAWESI TENGGARA	7,31	5,53	10,93	3,36	67,34	72,29	0,487	0,368	13,09	11,27	3.964	37.598
GORONTALO	7,19	6,08	18,76	2,58	67,65	68,87	0,4	0,437	17,27	15,51	3.188	25.742
SULAWESI BARAT	6,8	4,8	8,6	2,38	69,74	68,95	0,471	0,472	13,01	11,98	3.993	33.578
MALUKU	6,09	5,11	10,14	6,88	69,34	70,25	0,355	0,306	20,74	18,34	7.415	17.708
MALUKU UTARA	5,1	22,94	18,08	3,98	64,39	68,4	0,474	0,305	8,05	6,37	2.444	39.185
PAPUA BARAT	4,8	7,01	8,6	5,37	64,63	67,85	0,374	0,384	27,04	27,43	5.788	52.834
PAPUA	36,8	8,57	7,11	2,83	67,09	65,35	0,361	0,359	20,19	20,4	10.104	99.121

Sumber: Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian indikator makro provinsi terhadap capaian Nasional Tahun 2005 dan Tahun 2022, maka yang menjadi tantangan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan adalah mendorong peningkatan kualitas SDM dimana capaian Indikator IPM Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2005 dan Tahun 2022 masih berada dibawah capaian IPM Nasional. Selain itu persoalan kemiskinan juga perlu menjadi perhatian utama untuk diantisipasi, dimana kondisi capaian tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2005 dan Tahun 2022 masih diatas rata-rata capaian tingkat kemiskinan nasional.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan penduduk baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi

peningkatan kemampuan (empowered) dan makin meluasnya berbagai kesempatan (opportunity) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan. Sementara di sisi yang lain penduduk juga menjadi penentu dan pelaku dalam kesuksesan pembangunan. Penduduk sebagai penentu dan pelaku utama dalam pembangunan, memerlukan kualitas dan produktivitas yang tinggi sehingga pembangunan yang dihasilkan juga akan tinggi. Kualitas dan produktivitas dapat dibangun dan ditingkatkan apabila jumlah dan laju pertumbuhan bisa dikendalikan sehingga seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, selain itu persebarannya juga perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas penduduk. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka tercapainya penduduk tumbuh seimbang harus ditingkatkan sebagai langkah penting dalam rangka pembangunan kependudukan terutama meningkatkan kualitas penduduk dan melakukan pengarahannya penduduk. Pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk harus didorong melalui pemberdayaan dan pembangunan keluarga sebagai unit terkecil sasaran pembangunan nasional. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berdasarkan evidence atau data, karena dengan data yang valid, reliable dan mempunyai cakupan yang luas akan menjadi titik tolak dalam menentukan perencanaan dan langkah-langkah pembangunan berwawasan kependudukan. Data tentang jumlah, struktur, pertumbuhan dan karakteristik penduduk serta data penunjang lainnya harus tersedia terus menerus dan dimutakhirkan setiap saat. Dinamika penduduk akan mengubah struktur, komposisi dan persebaran penduduk. Dengan melakukan proyeksi maka akan dapat diperkirakan perubahan kebutuhan yang harus dipenuhi dan fasilitas pelayanan publik yang perlu disediakan.

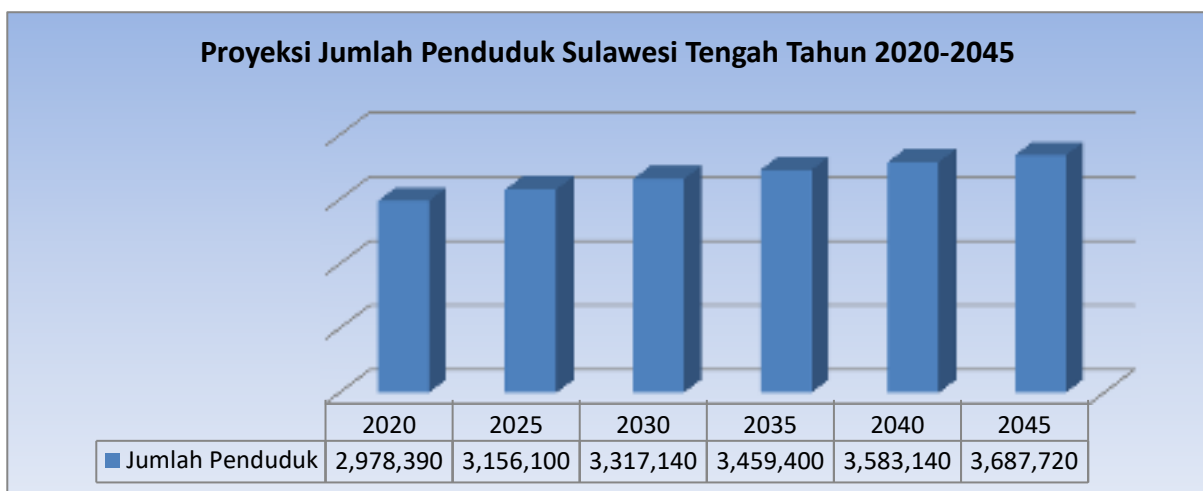
Dengan demikian, mengintegrasikan kependudukan dalam strategi ekonomi dan pembangunan nasional akan mempercepat laju pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Hasilnya akan mempercepat

pencapaian tujuan pembangunan kependudukan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan. Dengan demikian, pembangunan berwawasan kependudukan hendaknya bersifat holistik, yaitu melihat persoalan pembangunan secara lebih luas dan komprehensif. Dalam segitiga pembangunan berwawasan kependudukan disebutkan bahwa penduduk menjadi sentral pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan yang dikelola secara bersama-sama dan terintegrasi.

Rencana pembangunan harus dilengkapi dengan data dan informasi kependudukan terkini serta prakiraannya pada masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan yang akurat. Informasi-informasi tersebut dapat dihitung melalui proyeksi penduduk.

A. Jumlah Penduduk

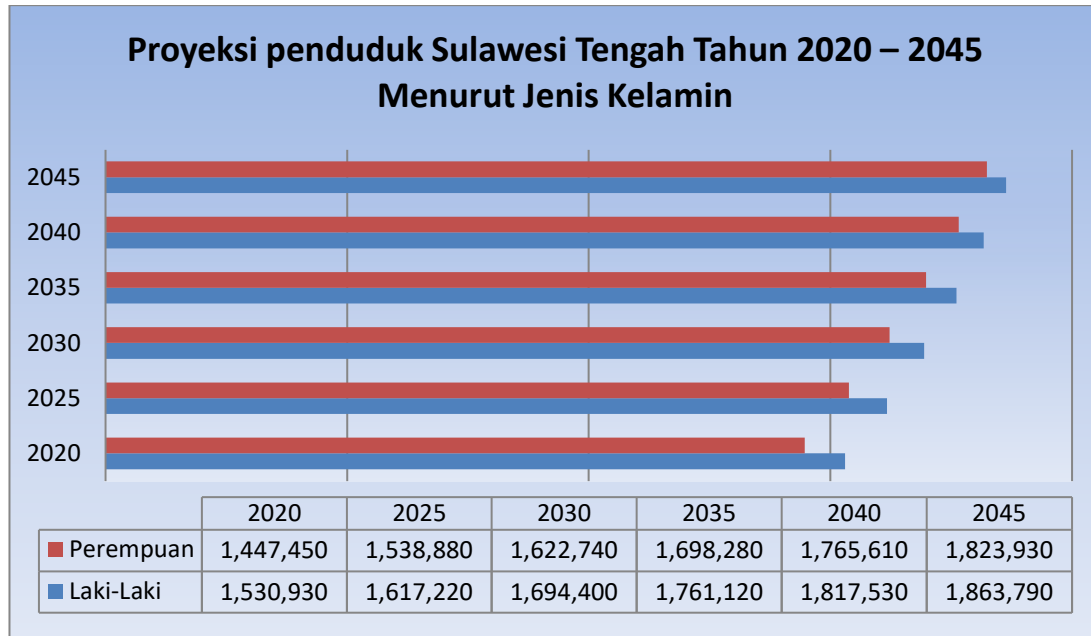
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Juni 2020 sebesar 2,98 juta orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 3,15 juta orang pada Tahun 2025, 3,17 juta orang pada Tahun 2030, dan 3,45 orang pada Tahun 2035, 3,58 juta orang pada Tahun 2040, dan 3,68 juta orang pada Tahun 2045.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.70
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2045

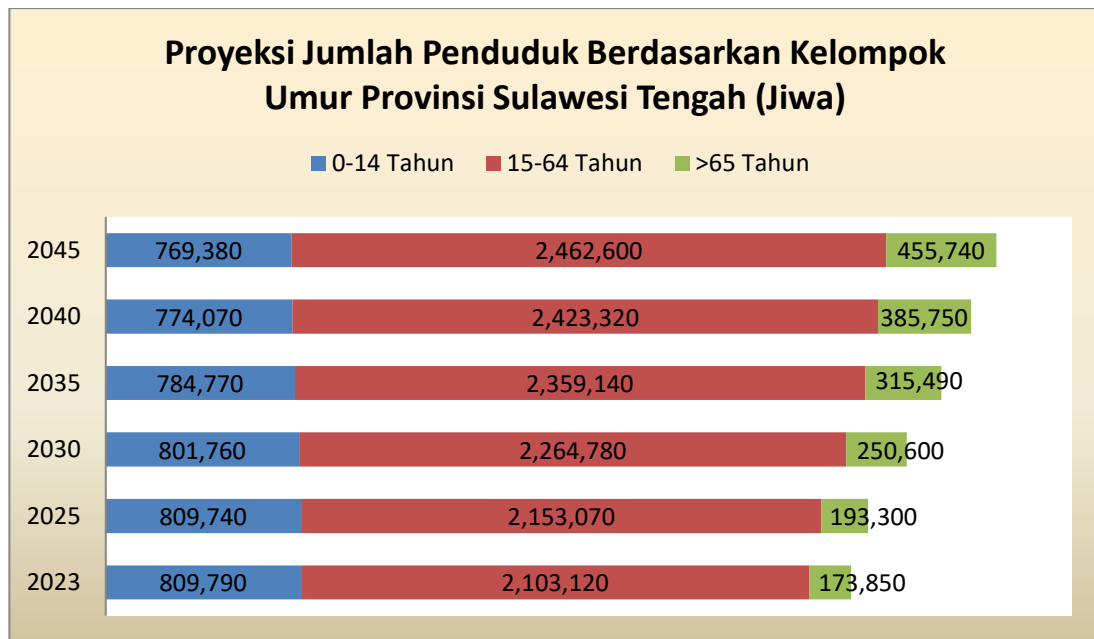
Proyeksi penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2045 menurut jenis kelamin tergambar bahwa penduduk Sulawesi Tengah hingga Tahun 2045 di dominasi oleh laki-laki dengan rata-rata berkisar 50,96 persen, seperti tersaji dalam gambar berikut:



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.71
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2045

Proyeksi menurut komposisi umum tergambar bahwa Penduduk Sulawesi Tengah didominasi oleh Usia Produktif yaitu 15 – 64 tahun, pada Tahun 2020 penduduk produktif berjumlah 67,92 persen sehingga dependensi rasio sebesar 47,24, Tahun 2025 diprediksi penduduk produktif sebesar 68,22 persen sehingga angka ketergantungan di prediksi sebesar 46,80 persen, Tahun 2030 penduduk produktif sebesar 68,20 persen dengan angka ketergantungan sebesar 46,47 persen hingga Tahun 2045 jumlah penduduk produktif sebesar 65,92 persen dengan angka ketergantungan sebesar 49,53 persen.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.72
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Provinsi Sulawesi Tengah (Jiwa)

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah hasil proyeksi didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 Tahun). Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia 15-64 Tahun mencapai 2.103.120 (jiwa), pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 2.153.070 (jiwa), tahun 2030 sebanyak 2.264.780 (jiwa), tahun 2035 sebanyak 2.359.140 (jiwa), tahun 2040 sebanyak 2.423.320 (jiwa) dan pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai 2.462.600 (jiwa) dan menandai bonus demografi karena jumlah penduduk di dominasi oleh usia produktif.

B. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.



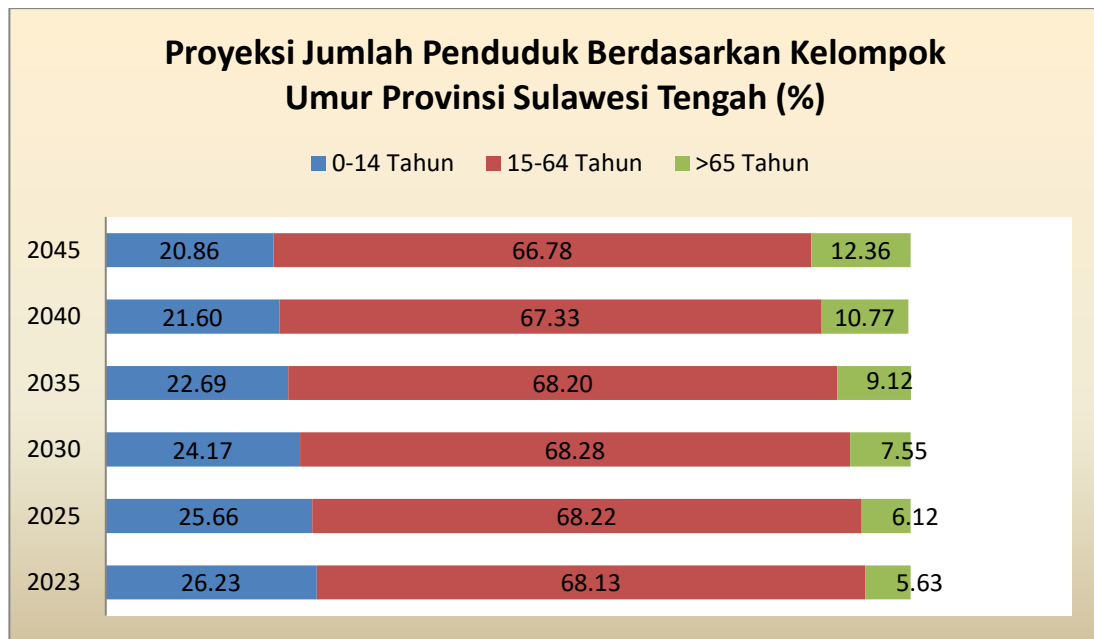
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.73
Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah Hasil Proyeksi, 2020-2035

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2020–2025 sebesar 1,17 persen secara bertahap menurun menjadi 1,08 persen pada periode 2025–2030, menurun menjadi 0,84 persen pada periode 2030–2035, selanjutnya menjadi 0,71 persen pada periode 2035-2040 dan pada periode 2040-2045 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 0,58 persen.

C. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif merujuk kepada bagian dari populasi suatu wilayah atau negara yang berada dalam rentang usia yang dianggap ideal untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan produktif. Meskipun batasan usia ini dapat bervariasi, namun biasanya mencakup kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun. Manajemen dan pengelolaan potensi penduduk usia produktif menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.74
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2045

Persentase jumlah usia produktif (15-64 tahun) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 di proyeksikan sebesar 68,22 persen meningkat menjadi 68,28 persen pada tahun 2030, selanjutnya pada tahun 2035 di proyeksikan akan berkurang menjadi 68,20 persen dan menjadi 67,33 persen pada tahun 2040, dan pada tahun 2045 usia produktif akan menurun menjadi 66,78 persen.

D. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 tahun dikalikan 100.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang ditanggung

penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Rasio ketergantungan Usia Non Produktif terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 sebesar 47,24 persen, diproyeksikan akan mengalami penurunan pada Tahun 2025 sebesar 46,59 persen, pada Tahun 2030 menurun sebesar 46,47 persen. Selanjutnya pada Tahun 2035 proyeksi rasio ketergantungan akan meningkat menjadi 46,64 persen, dan sebesar 47,86 persen pada Tahun 2040, hingga Tahun 2045 rasio ketergantungan di proyeksikan-meningkat menjadi 49,75 persen.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.75

Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

E. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah fenomena di mana suatu populasi memiliki proporsi besar dari kelompok usia produktif atau pekerja dibandingkan dengan kelompok usia yang tidak produktif, seperti anak-anak dan lansia. Bonus demografi terjadi ketika jumlah orang usia produktif meningkat secara signifikan, sementara jumlah anak-anak dan lansia relatif stabil. Ketika suatu negara atau wilayah mengalami bonus demografi, hal ini dapat menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan demografi ketika populasi usia produktif menjadi lebih tua tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang dan kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi.

Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami perubahan atau bonus demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar Tahun 2035. Namun, pada saat yang sama angka ketergantungan mengalami penurunan karena jumlah penduduk usia anak menurun. Selanjutnya proyeksi mengenai proporsi usia produktif (15-64 tahun) terhadap total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS (data diolah kembali)

Gambar 2.76
Proporsi Usia Produktif terhadap Total Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2045

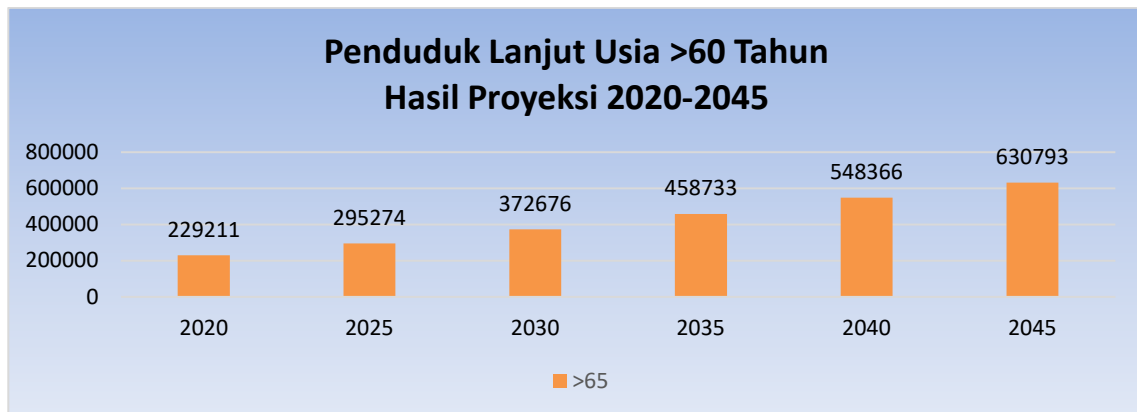
Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa bonus demografi di Provinsi Sulawesi Tengah di proyeksikan masih akan berlangsung untuk 20 tahun kedepan, meskipun nilai proporsi usia produktif terhadap total penduduk semakin menurun, yakni dari 68,22 persen pada Tahun 2025 menjadi 66,78 persen pada Tahun 2045.

F. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Penduduk lanjut usia adalah kelompok individu yang telah melewati usia pensiun dan biasanya berusia 60 tahun ke atas. Fenomena ini menjadi semakin penting seiring pertumbuhan harapan hidup dan perkembangan masyarakat yang menua. Penduduk lanjut usia memainkan peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan kesehatan suatu negara.

Proyeksi penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2020–2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 60 tahun ke atas (lanjut usia). Proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 229.211

ribu penduduk dan meningkat menjadi 630.793 ribu penduduk pada Tahun 2045. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (3,65 juta penduduk) di Tahun 2045. Dengan demikian maka pada tahun 2045 wilayah Provinsi Sulawesi Tengah layak untuk dikembangkan dan dimekarkan.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.77

Penduduk Lanjut Usia Sulawesi Tengah Hasil Proyeksi, Tahun 2020-2045

G. Fertilisasi Penduduk

Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

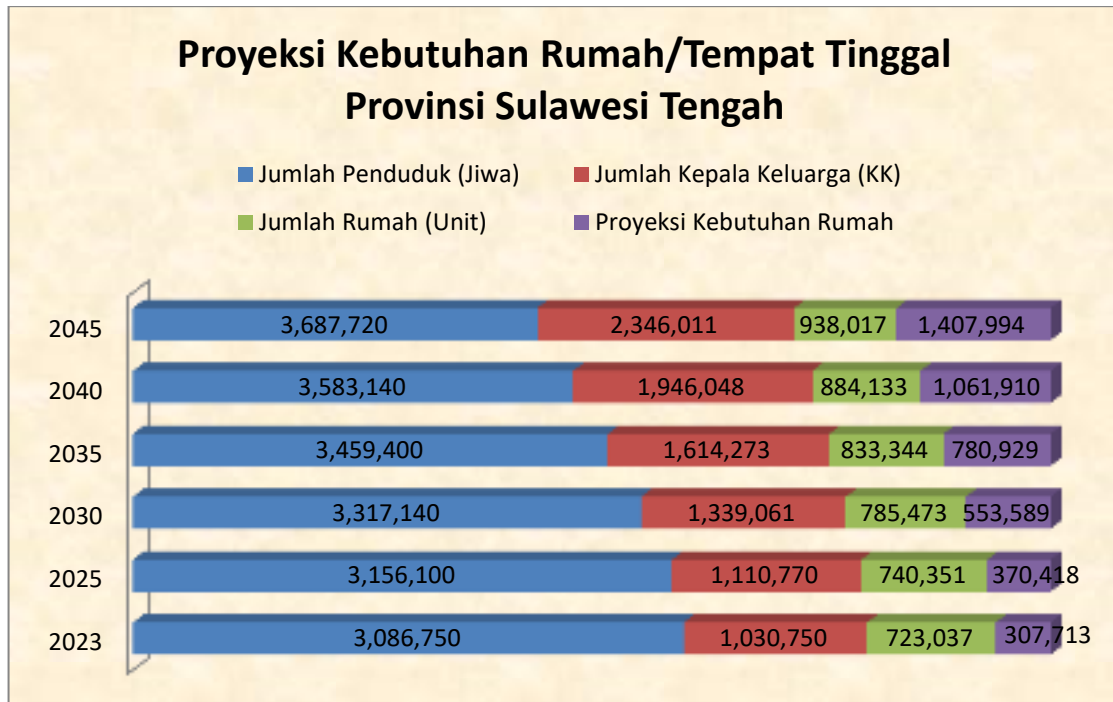
Gambar 2.78

Proyeksi Fertilisasi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2045

Tingkat fertilitas (kelahiran) atau pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan dari jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu wilayah/ daerah dalam periode tertentu. Pada tabel tersajikan Tahun 2020 rata rata fertilitas tercatat sebanyak 2.32 dengan Crude Birth Rate (angka kelahiran) sebesar 18,69 perseribu kelahiran dan jumlah kelahiran sebanyak 55,65 persen.

H. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal melibatkan estimasi jumlah hunian yang dibutuhkan untuk menampung populasi yang terus berkembang. Dengan melihat proyeksi pertumbuhan penduduk 2045 sebesar 3.687.720 yang terus berlangsung, perluasan dan pemenuhan kebutuhan perumahan menjadi salah satu aspek kunci dalam perencanaan pembangunan masa depan. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal untuk beberapa tahun mendatang diarahkan oleh pertumbuhan penduduk yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, migrasi penduduk, dan perubahan dalam struktur keluarga akan memainkan peran penting dalam membentuk pola kebutuhan tempat tinggal. Dengan adanya program perumahan yang terencana dengan baik, kita dapat memastikan ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Rencana ini harus mencakup penyediaan rumah yang terjangkau, fasilitas umum, dan aksesibilitas terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Proyeksi kebutuhan rumah Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.79

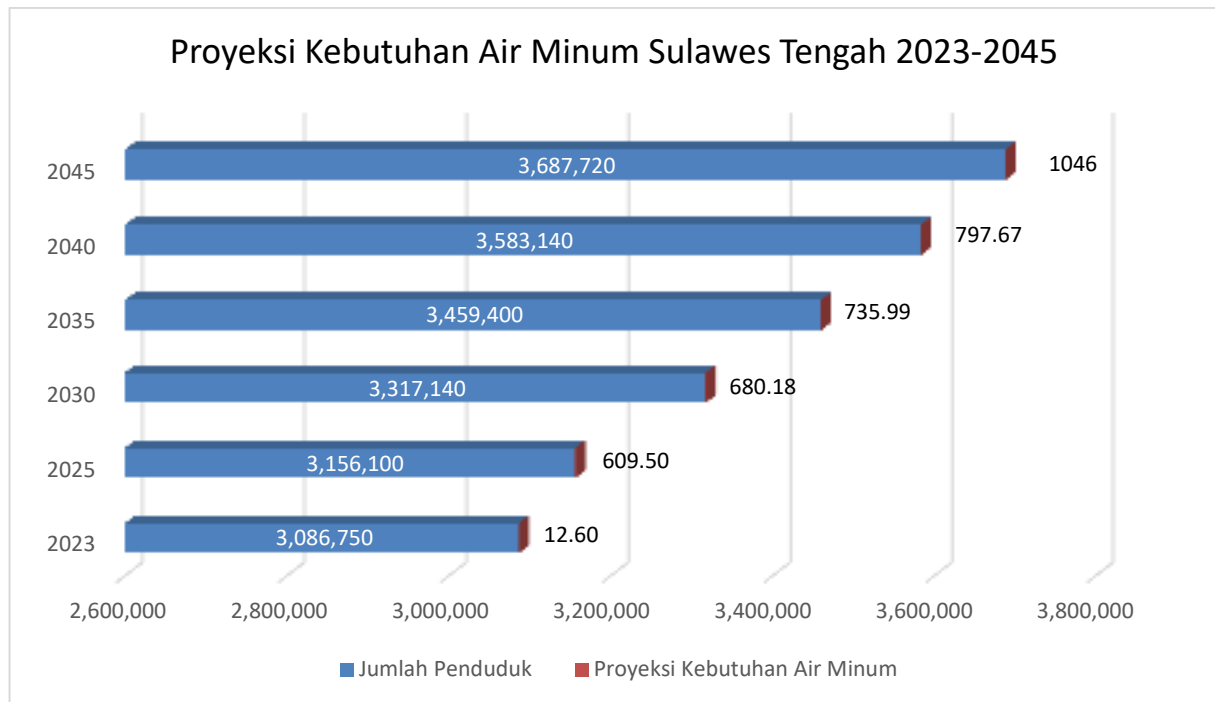
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Sulawesi Tengah

Data di atas menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan kebutuhan rumah/tempat tinggal hingga Tahun 2045, dimana pada Tahun 2023 sebesar 307.713 unit, sebesar 370,418 unit pada Tahun 2025 dan seterusnya hingga tahun 2030 sebesar 553,589, tahun 2035 sebesar 780,929, tahun 2040 sebesar 1.061,91, dan Tahun 2045 sebesar 1.407,994 unit.

I. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum merupakan langkah krusial dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi populasi yang terus bertumbuh. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlanjut, proyeksi kebutuhan air minum menjadi esensial untuk memastikan pemenuhan hak dasar setiap individu akan akses air yang bersih dan aman. Dalam proyeksi ini, hal yang harus diperhatikan adalah dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk, urbanisasi serta perubahan pola konsumsi sebagai faktor utama yang akan memengaruhi kebutuhan air. Proyeksi kebutuhan air minum juga harus mencakup analisis terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan air per kapita. Dengan masyarakat yang semakin urban, kebutuhan akan air untuk keperluan rumah tangga, industry

dan pertanian akan terus meningkat. Oleh karena itu, perluasan dan pemeliharaan infrastruktur penyediaan air harus diintensifkan agar dapat memenuhi proyeksi kebutuhan yang meningkat. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

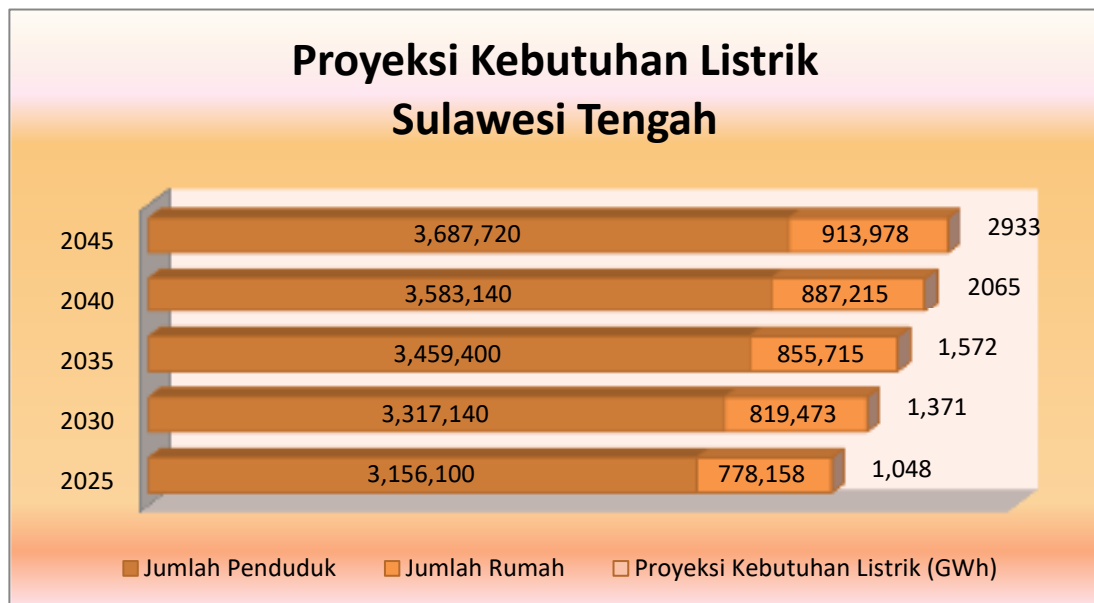
Gambar 2.80
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Sulawesi Tengah Tahun 2023-2045

Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan kebutuhan air minum pada Tahun 2023 sebesar 12,5 liter/detik dan yang terlayani sebesar 12,6 liter/detik. Proyeksi pada Tahun 2025 sebesar 609,3 liter/detik, Tahun 2030 sebesar 680,18 liter/detik, Tahun 2035 sebesar 735,99 liter/detik, Tahun 2040 sebesar 797,67 liter/detik hingga Tahun 2045 sebesar 1.046 liter/detik.

J. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik memainkan peran kunci dalam perencanaan energi untuk mendukung pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi. Dengan populasi yang terus bertumbuh dan perkembangan teknologi, proyeksi kebutuhan listrik menjadi elemen penting dalam merancang system energi

yang berkelanjutan. Proyeksi ini mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas industri, serta perubahan dalam kebutuhan konsumsi listrik per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali diikuti oleh peningkatan kebutuhan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik harus mempertimbangkan perkembangan industri, perdagangan, dan sektor jasa yang semakin berkembang. Oleh karena itu, penyusunan infrastruktur kelistrikan yang responsif dan dapat diperluas menjadi kunci untuk memastikan pasokan listrik yang memadai. Proyeksi kebutuhan listrik Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 dan RUKD Sulawesi Tengah (data diolah kembali)

Gambar 2.81
Proyeksi Kebutuhan Listrik Sulawesi Tengah (GWh)

Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, proyeksi kebutuhan listrik hingga Tahun 2045 semakin meningkat dimana pada Tahun 2025 sebesar kebutuhan listrik untuk rumah tangga sebesar 1.048 GWh, Tahun 2030 sebesar 1.371 GWh, Tahun 2035 sebesar 1.572 GWh, Tahun 2040 sebesar 2.065 GWh dan Tahun 2045 sebesar 2.933 GWh. Sedangkan pada Tahun 2023 kebutuhan listrik untuk rumah tangga dalam RUKD tersebut adalah 1.140 GWh. Tahun 2023, produksi listrik dari PLN sejumlah 1.263,02 GWh (BPS, 2024).

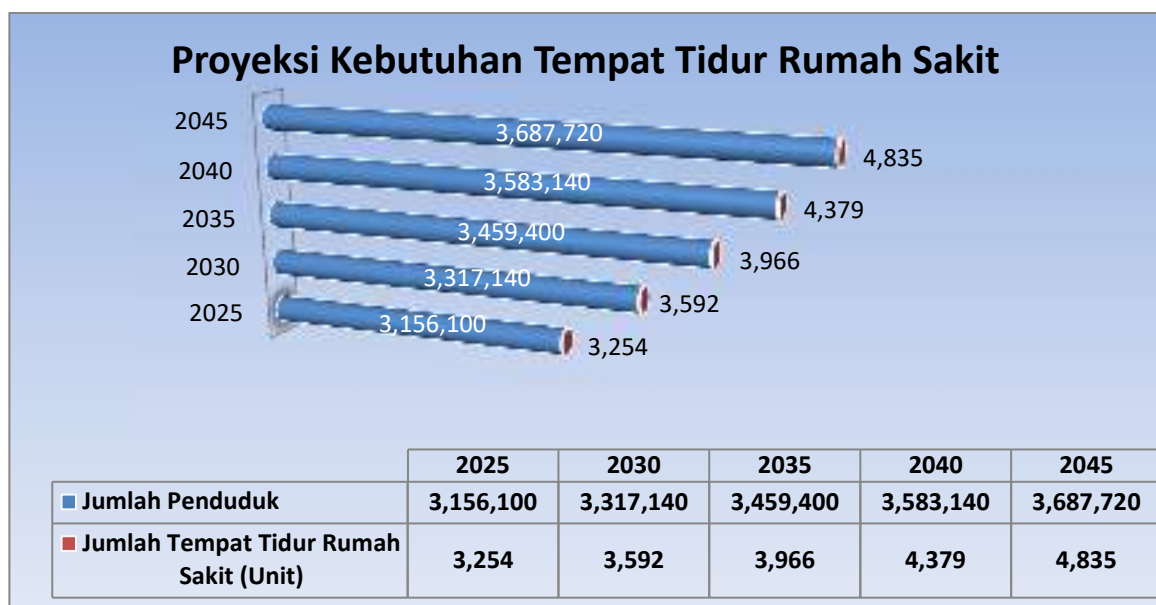
K. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi bagian integral dalam merencanakan pelayanan kesehatan yang memadai untuk suatu populasi yang terus berkembang. Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung dan dinamika perubahan kesehatan masyarakat, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Proyeksi ini mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Faktor utama yang perlu diperhitungkan adalah pertumbuhan penduduk dan perubahan pola penyakit. Dengan populasi yang terus bertambah, proyeksi harus memperhitungkan peningkatan jumlah pasien, serta perubahan dalam pola penyakit seperti peningkatan penyakit kronis dan kebutuhan pelayanan kesehatan spesifik usia tertentu.

Pada Tahun 2022, jumlah total daya tampung rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4.060 tempat tidur. Jumlah tersebut telah memenuhi rasio ideal antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk sebesar 1:1000. Jika dihitung dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang sebesar 3.066.143 jiwa, maka rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk di Sulawesi Tengah sebesar 1: 755. Angka tersebut jauh lebih besar dari rasio ideal, sehingga berdasarkan proyeksi penduduk 2025-2025, penambahan tempat tidur rumah sakit dapat dilakukan pada Tahun 2040 dan 2045. Demikian halnya dengan penyediaan fasilitas puskesmas dan posyandu. Data eksisting Tahun 2022 menunjukkan rasio jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk serta rasio jumlah posyandu dengan jumlah penduduk di Sulawesi Tengah telah melebihi rasio ideal, bahkan sampai dengan Tahun 2045.

Hal yang menjadi catatan terkait dengan penyediaan fasilitas kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah jangkauan pelayanan rumah sakit, puskesmas dan posyandu yang belum mampu melayani penduduk yang berada di daerah terpencil karena faktor jarak tempuh dan aksesibilitas yang

masih minim. Selain itu, permasalahan lainnya adalah jumlah fasilitas kesehatan yang telah memadai tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kesehatan karena distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dimana ketersediaan tenaga kesehatan masih terpusat di wilayah perkotaan. Khusus untuk Puskesmas, persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar yaitu memiliki dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi serta tenaga kefarmasian, hanya sebesar 30 persen. Proyeksi kebutuhan tempat tidur rumah sakit (unit) Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2023 Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

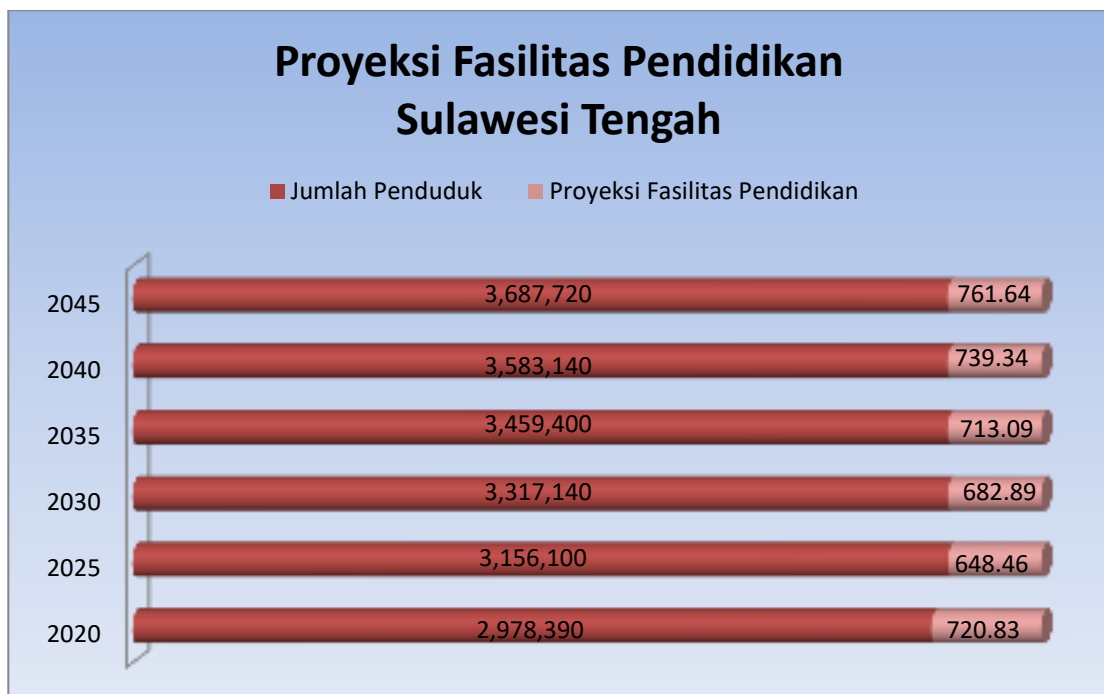
Gambar 2.82
Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur Rumah Sakit Sulawesi Tengah (Unit)

Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan jumlah tempat tidur rumah sakit pada Tahun 2025 yaitu 3.254 unit, Tahun 2030 yaitu 3.592 unit, Tahun 2035 yaitu 3.966 unit, Tahun 2040 yaitu 4.379 unit dan tahun 2045 yaitu 4.835 unit.

L. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan merupakan langkah penting dalam perencanaan pengembangan sistem pendidikan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan meningkatkan akses pendidikan. Dalam melihat masa depan pendidikan, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan menjadi

landasan utama dalam upaya untuk menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Proyeksi ini tidak hanya melibatkan perhitungan jumlah sekolah, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kritis seperti kapasitas kelas, fasilitas olahraga, teknologi pembelajaran, dan keberlanjutan. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi proyeksi ini. Dengan populasi yang terus berkembang, perlu dipertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang memadai. Peningkatan akses pendidikan di semua tingkatan, termasuk pendidikan inklusif, juga perlu menjadi fokus dalam proyeksi ini. Proyeksi Fasilitas Pendidikan di Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut.



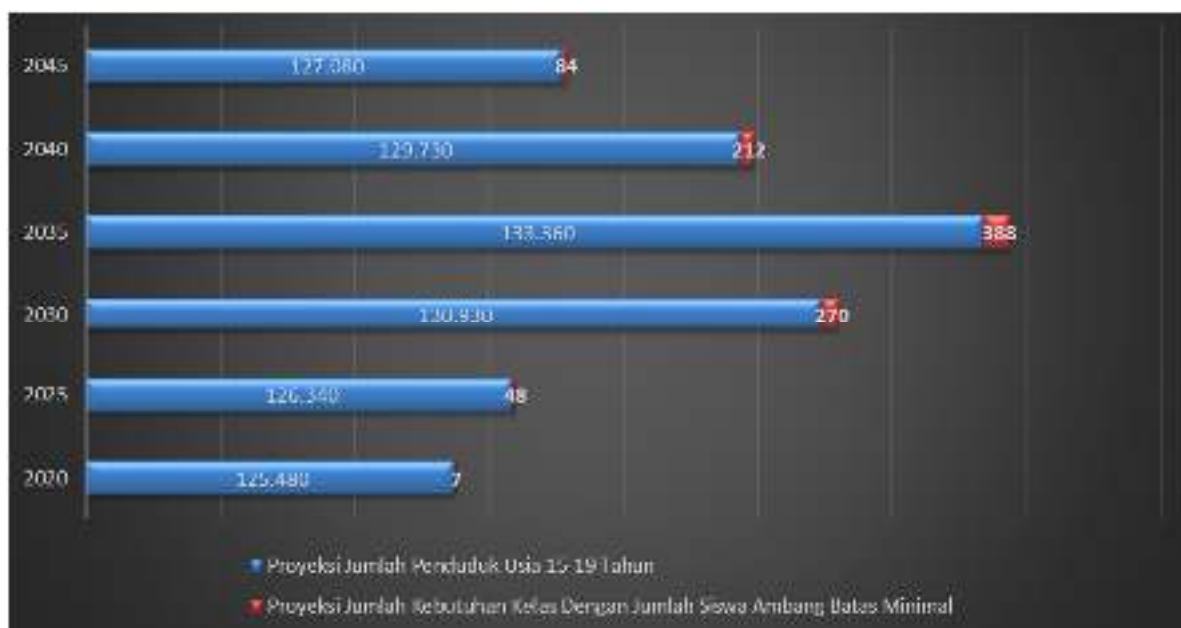
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.83
Proyeksi Fasilitas Pendidikan Sulawesi Tengah (Unit)

Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan kebutuhan fasilitas pendidikan dalam hal ini SMA/MA/SMK pada Tahun 2023 sebesar 720,83 unit, pada Tahun 2025 sebesar 648,46 unit, Tahun 2030 sebesar 682,89 unit, Tahun 2035 sebesar 713,09 unit, tahun 2040 sebesar 739,34 unit dan Tahun 2045 sebesar 761,64 unit.

Sesuai Permen Diknas No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, bahwa setiap satu kecamatan satu sekolah SMA sederajat dan jumlah kecamatan 176 minimal sekolah. Pada tahun 2023 sekolah SMA 236 unit, SMK 188 unit, SLB 32 unit. Untuk jumlah sarana pendidikan telah memenuhi standar ideal sesuai Permen Diknas No. 24 tahun 2007

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, jumlah kelas saat ini sebanyak 6.059 kelas. Jumlah rombongan belajar (Rombel) setiap kelas maksimal adalah 36 orang siswa dan jumlah minimal adalah untuk SMA/MA adalah 20 orang, SMK berjumlah 15 orang, maka kebutuhan kelas dengan rombongan belajar maksimal (36 orang Siswa) sudah terpenuhi. Namun jika jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dengan menggunakan ambang batas minimal, maka tambahan ruang kelas setiap tahun perencanaan adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (data diolah kembali)

Gambar 2.84
Proyeksi Kebutuhan Kelas (Unit)

Jumlah tambahan kelas sesuai dengan grafik diatas dengan asumsi bahwa kelas yang ada saat ini masih dalam kondisi layak fungsi.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

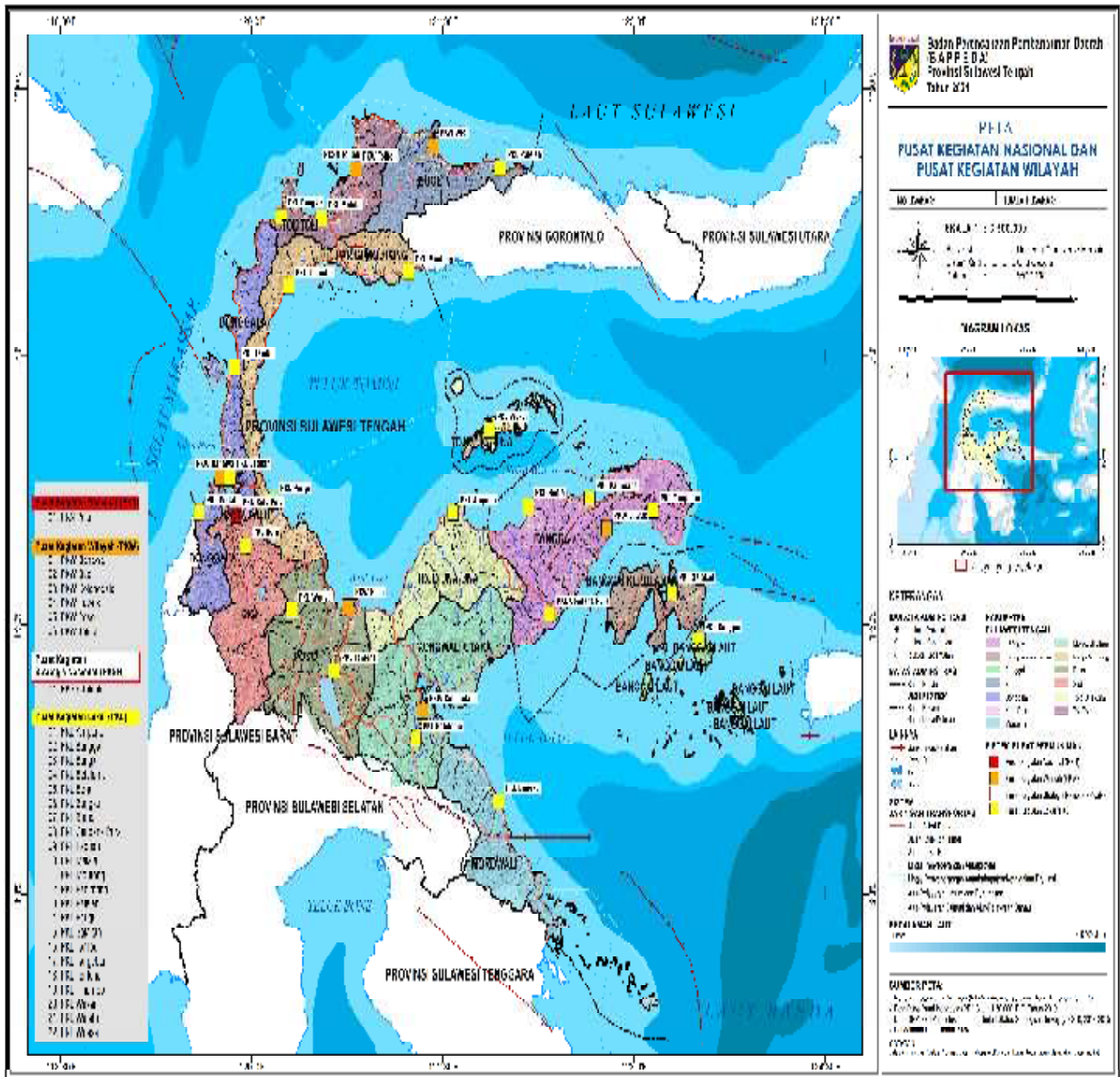
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah yaitu Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Penetapan PKN, PKSN, dan PKW oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh Pemerintah Daerah diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Penambahan sistem pusat permukiman dapat dilakukan apabila terdapat usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PKN, PKSN, PKW, dan PKL Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042 adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palu di Kota Palu.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi: (1) PKW Banawa di Kabupaten Donggala; (2) PKW Buol di Kabupaten Buol; (3) PKW Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara; (4) PKW Luwuk di Kabupaten Banggai; (5) PKW Poso di Kabupaten Poso; dan (6) PKW Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu PKSN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: (1) PKL Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una; (2) PKL Banggai di Kabupaten Banggai Laut; (3) PKL Bangkir di

Kabupaten Tolitoli; (4) PKL Beteleme di Kabupaten Morowali Utara; (5) PKL Bora di Kabupaten Sigi; (6) PKL Bungku di Kabupaten Morowali; (7) PKL Bunta di Kabupaten Banggai; (8) PKL Cendana Pura di Kabupaten Banggai; (9) PKL Labuan di Kabupaten Donggala; (10) PKL Malala di Kabupaten Tolitoli; (11) PKL Moutong di Kabupaten Parigi Moutong; (12) PKL Pagimana di Kabupaten Banggai; (13) PKL Paleleh di Kabupaten Buol; (14) PKL Parigi di Kabupaten Parigi Moutong; (15) PKL Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan; (16) PKL Tambu di Kabupaten Donggala; (17) PKL Tangeban di Kabupaten Banggai; (18) PKL Tentena di Kabupaten Poso; (19) PKL Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong; (20) PKL Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una; (21) PKL Watatu di Kabupaten Donggala; dan (22) PKL Wuasa di Kabupaten Poso.



Sumber: Dikembangkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042

Gambar 2.85

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Berdasarkan PKN, PKSN, PKW, dan PKL Provinsi Sulawesi Tengah

Konsep pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Klaster Perwilayahan yang dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah. Pusat pertumbuhan

wilayah secara potensi dan fungsi di bagi atas 4 Klaster yaitu: (1) Klaster Perkotaan Pasigala; (2) Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara; (3) Klaster Industri Morubang; dan (4) Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju.



Sumber: Dikembangkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042

Gambar 2.86
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Berdasarkan 4 (Empat)
Klaster Perwilayahan Sulawesi Tengah

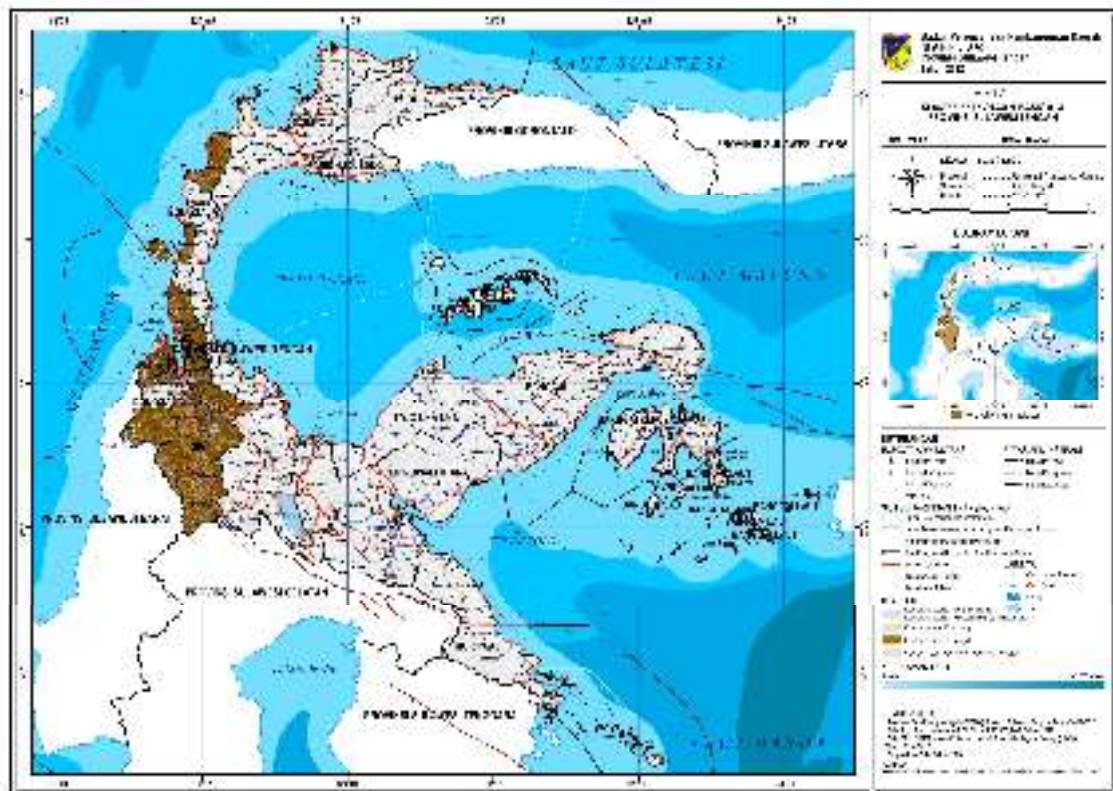
1. Klaster Perkotaan Pasigala

Klaster Perkotaan Palu-Sigi-Donggala yang selanjutnya disebut Klaster Perkotaan Pasigala adalah klaster perwilayahan yang meliputi Kota Palu, sebagian Kabupaten Sigi, dan sebagian Kabupaten Donggala dengan arahan konsep pengembangan Klaster Perkotaan Pasigala sebagai berikut:

- a. Pembatasan pengembangan kawasan budi daya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi.
- b. Pengembangan kawasan permukiman penyangga di sebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala.

- c. Peningkatan sistem jaringan prasarana regional di luar Kawasan Rawan Bencana sangat tinggi dan tinggi.
- d. Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional.
- e. Pengembangan Kota Palu sebagai bentuk kota yang kompak dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri didukung upaya Mitigasi Bencana; dalam perkembangannya, Kota Palu yang indah namun rawan bencana dikembangkan dengan Konsep Kota Taman Bumi atau Geopark City (Ripparkot Palu, 2022), dengan dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, pariwisata berbasis geowisata, dengan mitigasi bencana yang berkualitas; pengembangan Pariwisata di Kabupaten Donggala dengan tema Sunset City dan Kota Tua Donggala, yang didukung destinasi wisata lainnya sebagai suatu paket wisata; dan pengembangan agrowisata di Kabupaten Sigi.
- f. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman regional di Kabupaten Donggala; dan
- g. Pengembangan dan pemantauan jaringan sumber daya air sebagai pengurangan risiko bencana likuefaksi.

Gambar berikut memperlihatkan 3 wilayah Klaster Perkotaan Pasigala, yaitu: Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Gambar 2.87
Klaster Perkotaan Pasigala

Indikasi program pada Klaster Perkotaan Pasigala adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Metropolitan Pasigala yang ekologis dengan fasilitas moderen dan tahan terhadap bencana. Dikembangkan berbasis *resilient city* yaitu konsep perencanaan kota dimana warganya mampu memfungsikan berbagai sistem ketika ada gangguan seperti bencana alam atau bencana lainnya seperti pandemi.
- Menyelaraskan RTRW tiga wilayah di Klaster Perkotaan Pasigala dengan mempertimbangkan Rencana Pengembangan Metropolitan Pasigala.
- Pengembangan Metropolitan Pasigala yang memperhatikan resiko bencana dengan melakukan konservasi pada kawasan-kawasan rawan bencana.
- Konservasi pada Kawasan Sejarah Kebencanaan Kota Palu (Segi Tiga Geo Koro) yaitu Kawasan Teluk Palu dan Sekitarnya yang rawan terhadap bencana tsunami, Kawasan eks area likuefaksi Petobo, dan Kawasan eks area likuefaksi Balaroa.

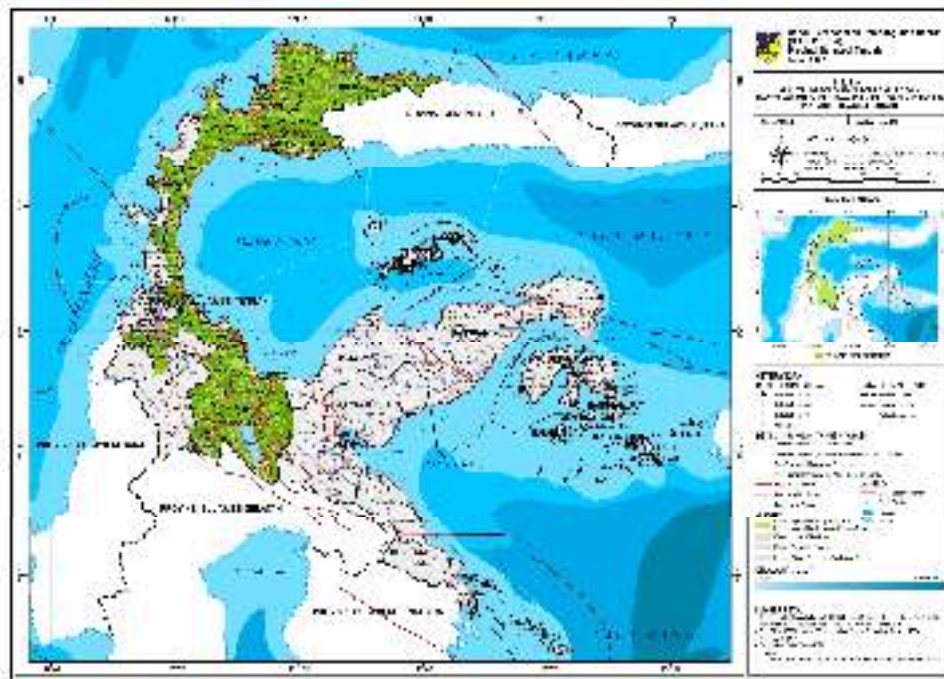
- e. Peningkatan status Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu menjadi Bandara Internasional.
- f. Riset dan pembangunan Bandar Udara Lapaloang Donggala.
- g. Pengembangan perkeretaapian Klaster Pasigala yang terintegrasi dengan Perkeretaapian Pulau Sulawesi.
- h. Pengelolaan pelayaran, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Utama, Pembangunan Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Donggala.
- i. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman yang sehat dan produktif.
- j. Pengembangan KEK Palu. Meningkatkan kemampuan manajerial dan mengembangkan fasilitas-fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus Palu (KEK Palu) sesuai rencana bisnis.
- k. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.
- l. Perencanaan dan pembangunan Jalan Bypass Tambu-Kasimbar.
- m. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman untuk rumah korban bencana, termasuk manajemen dan pengelolaan kawasan perumahan.
- n. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan konsep *green city* dan *resilient city*. Menerapkan struktur sarana prasarana dan bangunan tahan gempa dengan jalur-jalur evakuasi yang jelas. Penyediaan hunian baru dan pembangunan rumah khusus Nelayan.
- o. Pengelolaan dan pengolahan sampah, pengembangan sistem air limbah, pembangunan prasarana SPAL untuk IPLT Regional.

2. Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Kawasan Pangan Nusantara

Klaster Agropolitan ada 2 yaitu Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara. Klaster Agropolitan Bolipamuso terdiri dari wilayah Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso. Selanjutnya Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara mencakup wilayah Kabupaten Poso, sebagian Kabupaten Donggala,

sebagian Kabupaten Sigi, dan sebagian Kabupaten Tolitoli. Arahana konsep pengembangan Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Hulu pengembangan produksi pertanian di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, sebagian Kabupaten Sigi, dan sebagian Kabupaten Donggala.
- b. Hilir berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu: (1) Kabupaten Parigi Moutong sebagai agroindustri; (2) Kabupaten Poso sebagai sentra agribisnis dan agrowisata, didukung pariwisata *Geopark* Danau Poso dan pariwisata Negeri 1000 Megalith; (3) Kabupaten Donggala sentra agribisnis yang didukung pariwisata; dan (4) Kabupaten Sigi untuk pengolahan hasil pertanian, perikanan darat, yang didukung agrowisata.
- c. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan jalur Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara.
- d. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis, dan agrowisata.
- e. Percepatan pengembangan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli; dengan *pilot project food estate* di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Gambar 2.88

Klaster Agropolitan: Bolipauso dan Kawasan Pangan Nusantara

Indikasi program pada Klaster Agropolitan BOLIPAMUSO

- a. Peningkatan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura berbasis agribisnis, khususnya untuk mendukung bahan pangan di IKN.
- b. Dukungan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasarannya.
- c. Pengembangan keterpaduan infrastruktur dan moda transportasi pada jalur Agropolitan Bolipamuso dan jalur Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara.
- d. Rencana Pembangunan Jalan Bypass Tambu-Kasimbar.
- e. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.
- f. Peningkatan daya tarik wisata perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi: penyusunan Masterplan *Geopark* Danau Poso dan dukungan untuk penetapan Danau Poso sebagai Nasional *Geopark*; penataan Kawasan *Geopark* Danau Poso.

- g. Pengembangan perkeretaapian di Klaster Agropolitan Bolipamusu dan Kawasan Pangan Nusantara yang terintegrasi dengan Perkeretapian Pulau Sulawesi.
- h. Penyelenggaraan penataan ruang penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang: penyusunan perangkat pengendalian Kawasan Danau Poso.
- i. Penyelenggaraan jalan: peningkatan jalan lingkungan PSU permukiman.
- j. Pengelolaan sumber daya air (SDA): pembangunan mitigasi bencana meliputi: (1) Perkuatan Tebing/Normalisasi Modo; (2) pembangunan bangunan pengaman pantai Negeri Lama, dan pembangunan bangunan pengaman pantai Desa Harmoni Dusun Bila.
- k. Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru: pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- l. Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan: pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- m. Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru: pembangunan rumah khusus Nelayan dan pembangunan rumah susun paramedis RS. Anuntaloko.
- n. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman yang sehat dan produktif.
- o. Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru: pembangunan PSU Rumah Komersil.
- p. Pengelolaan perikanan budi daya: pembangunan KJA Ikan Air Tawar dan Pengembangan Kawasan Shrimp Estate.
- q. Pengelolaan perikanan budi daya: pengembangan instalasi pada UPT Balai Benih (spesies endemik danau poso).

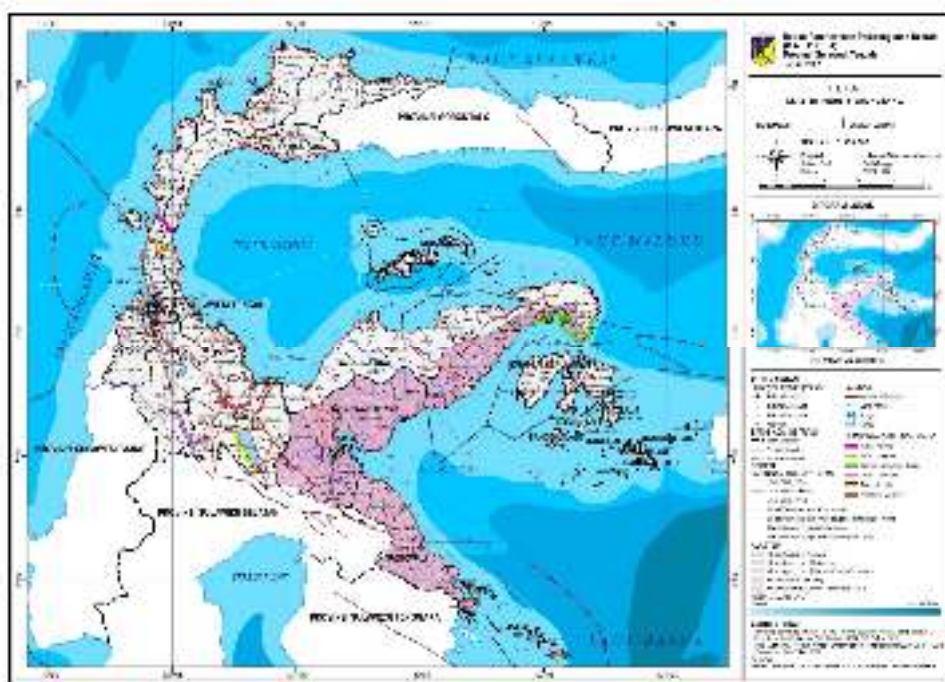
Indikasi program pada Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Kawasan Pangan Nusantara (KPN):

- a. Peningkatan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura berbasis agribisnis, khususnya untuk mendukung bahan pangan di IKN.
- b. Dukungan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasarannya.
- c. Pengembangan keterpaduan infrastruktur dan moda transportasi pada jalur Agropolitan Bolipamuso dan jalur Kawasan Pangan Nusantara.
- d. Pengembangan pariwisata pertanian: penataan kawasan agrowisata.
- e. Penyelenggaraan jalan: pembangunan Jalan pada Kawasan Pangan Nusantara.
- f. Pengelolaan pelayaran: pembangunan Pelabuhan KPN (Dampelas 4).
- g. Pengelolaan pelayaran: pembangunan pelabuhan/dermaga di kawasan KPN Talaga Dampelas.
- h. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Pembangunan Drainase Kawasan Pantai Barat.
- i. Pengelolaan sumber daya air (SDA): pembangunan irigasi tersier di Kawasan KPN.
- j. Pengelolaan sumber daya air (SDA): konstruksi pembangunan irigasi teknis KPN Manggalapi.
- k. Pengelolaan sumber daya air (SDA): konstruksi pembangunan Embung KPN.
- l. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian: pengembangan kawasan pertanian berupa bantuan benih jagung hibrida, dan benih unggul lainnya.
- m. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian: pengembangan kawasan pertanian berupa pembangunan rumah potong hewan modern.
- n. Pengelolaan perikanan budi daya: pengembangan kawasan perikanan berupa pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) dan pengadaan bibit dan pakan KJA.

3. Klaster Industri Morubang

Klaster Industri Morubang adalah klaster perwilayahan yang meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai sebelah Selatan, dengan Arah konsep pengembangan Klaster Industri Morubang terdiri atas:

- a. Pengembangan kawasan industri yang memiliki dampak multiplier efek terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan.
- b. Hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu.
- c. Penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan Kawasan Budi Daya yang berbatasan dengan Kawasan Lindung.
- d. Pengembangan sempadan pantai.
- e. Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Gambar 2.89
Klaster Industri Morubang

Indikasi program pada Klaster Industri Morubang:

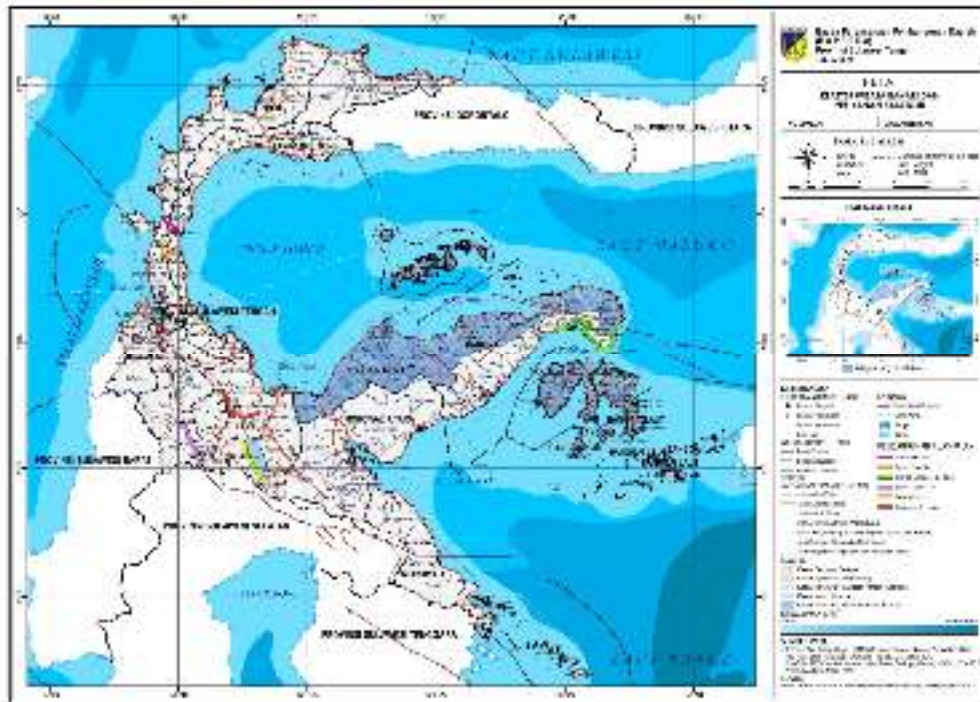
- a. Pembangunan rumah swadaya melalui Program BSPPS.
- b. Pembiayaan perumahan melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- c. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.
- d. Pengembangan perkeretaapian di Klaster Industri Morubang yang terintegrasi dengan Perkeretapian Pulau Sulawesi.
- e. Pembangunan PSU rumah komersil.
- f. Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru: pembangunan rumah khusus Nelayan; pembangunan rumah susun pekerja.
- g. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman yang sehat dan produktif.
- h. Pembangunan smelter berupa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas nikel terintegrasi dengan penambangan.
- i. Perencanaan dan pembangunan Kawasan industri Morowali.
- j. Peningkatan Jalan Lingkungan PSU

4. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju

Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju meliputi Kabupaten Banggai sebelah Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Arah konsep pengembangan Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju terdiri atas:

- a. Peningkatan kualitas obyek wisata bahari dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana.
- b. Pembuatan suatu paket terintegrasi antar Wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran.
- c. Penetapan Kawasan Perlindungan Setempat.
- d. Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari.
- e. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami.
- f. Peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Gambar 2.90
Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju

Indikasi program pada Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU:

- Peningkatan daya tarik wisata: perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi: penyusunan Masterplan Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional Kepulauan Togean, disertai melanjutkan pengusulan Kawasan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional.
- Perencanaan dan perancangan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi: penataan Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional Kepulauan Togean (Pulau Papan dan Wakai).
- Pembangunan dan peningkatan PSU Permukiman.
- Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru: pembangunan rumah swadaya melalui Program BSPS dan pembangunan rumah khusus nelayan.
- Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi, pembangunan rumah korban bencana.

- f. Pengembangan perkeretaapian di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju yang terintegrasi dengan Perkeretapian Pulau Sulawesi.
- g. Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- h. Penyediaan Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pembangunan PSU) Rumah Komersil.
- i. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman yang sehat dan produktif.

Pusat pertumbuhan secara fungsional sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (*hinterland*). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha.

Di Sulawesi Tengah telah ditetapkan Sistem pemukiman sebagai pusat pusat pertumbuhan terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.yaitu PKN Palu di Kota Palu.

Indikasi arahan zonasi PKN disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
- c. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada Kawasan Rawan Bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan

- d. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah perkotaan terpadu.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota meliputi:
- a. PKW Banawa di Kabupaten Donggala;
 - b. PKW Buol di Kabupaten Buol;
 - c. PKW Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - d. PKW Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - e. PKW Poso di Kabupaten Poso; dan
 - f. PKW Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.

Indikasi arahan zonasi PKW disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dengan pengendalian pengembangan ruangnya ke arah horizontal;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - e. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional sebagai Kawasan yang mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara maka ditetapkan PKSN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.

Indikasi arahan zonasi PKSN disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara bersyarat dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.
4. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi:
- a. PKL Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. PKL Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. PKL Bangkir di Kabupaten Tolitoli;
 - d. PKL Beteleme di Kabupaten Morowali Utara;
 - e. PKL Bora di Kabupaten Sigi;
 - f. PKL Bungku di Kabupaten Morowali;
 - g. PKL Bunta di Kabupaten Banggai;
 - h. PKL Cendana Pura di Kabupaten Banggai;
 - i. PKL Labuan di Kabupaten Donggala;
 - j. PKL Malala di Kabupaten Tolitoli;
 - k. PKL Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - l. PKL Pagimana di Kabupaten Banggai;
 - m. PKL Paleleh di Kabupaten Buol;
 - n. PKL Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - o. PKL Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - p. PKL Tambu di Kabupaten Donggala;

- q. PKL Tangeban di Kabupaten Banggai;
- r. PKL Tentena di Kabupaten Poso;
- s. PKL Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong;
- t. PKL Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una;
- u. PKL Watatu di Kabupaten Donggala; dan
- v. PKL Wuasa di Kabupaten Poso.
- w. PKL Pandanjaya

Indikasi arahan zonasi PKL disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten dan kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- b. Komposisi pola ruang kawasan dengan mempertimbangkan sinergi antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Fungsi kawasan sebagai pusat lokal untuk perdagangan dan jasa dan permukiman.
- d. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten.
- f. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Sistem Pusat Permukiman sebagai berikut:

- 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
 - a. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi Pengembangan transportasi massal kawasan perkotaan PASIGALA.
 - b. Program pengembangan iklim penanaman modal: penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi.

- c. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat: peningkatan kerjasama antar wilayah secara komplementatif.
 - d. Program penanggulangan bencana: penanganan pasca bencana, rehabilitasi kota akibat bencana alam.
 - e. Program penanggulangan bencana: penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam.
 - f. Program penyelenggaraan penataan ruang: pengendalian pemanfaatan ruang pada lokasi Kawasan Rawan Bencana.
2. Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum: peningkatan kapasitas pelayanan air minum di kawasan perkotaan.
 - b. Program pengembangan iklim penanaman modal: penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi.
 - c. Program penanggulangan bencana: penanganan pasca bencana, rehabilitasi kota akibat bencana alam.
 - d. Program penanggulangan bencana: penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam.
 - e. Program penyelenggaraan penataan ruang: pengendalian pemanfaatan ruang pada lokasi Kawasan Rawan Bencana.
3. Perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- a. Program pengembangan pertahanan dan keamanan: peningkatan sistem pertahanan dan keamanan perbatasan Negara.
 - b. Program pengembangan permukiman: penataan kawasan permukiman di kawasan perbatasan Negara
4. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan: pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi.
 - b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat: pengembangan pusat kesehatan.
 - c. Program pengelolaan pendidikan: pengembangan pusat pendidikan.

- d. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengembangan Simpul Transportasi.
- e. Program pengelolaan mineral dan Batubara: pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.
- f. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya: pengembangan pusat konservasi dan mitigasi.